

AGAMA & NEGARA :

**PERCIKAN PEMIKIRAN EMPAT TOKOH ISLAM
MASA PERGERAKAN NASIONAL**



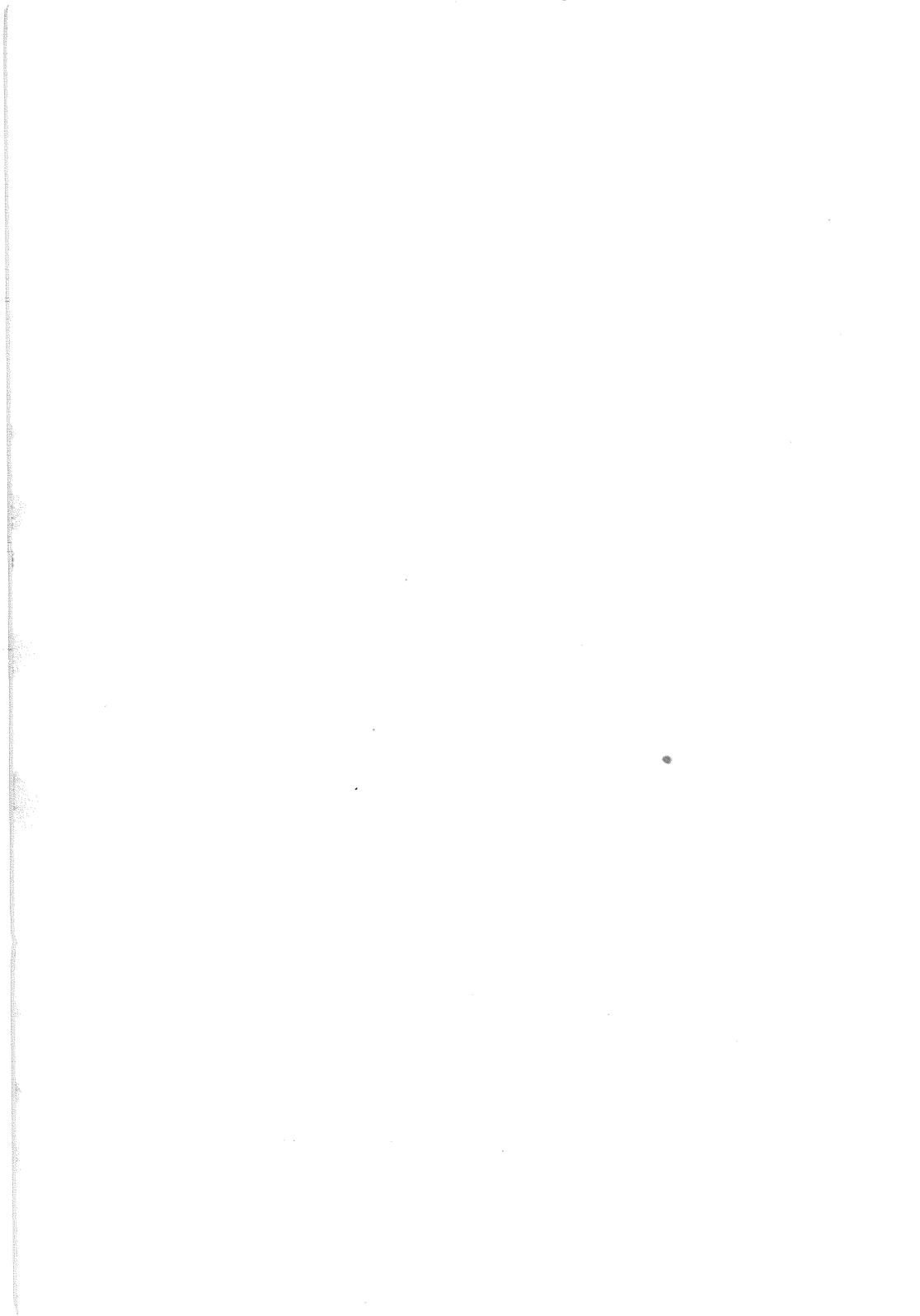
AGAMA & NEGARA :

PERCIKAN PEMIKIRAN EMPAT TOKOH ISLAM MASA PERGERAKAN NASIONAL

Dwi Purwoko
M. Hisyam
M. Asfar Marzuki
Surmiati Ali



Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(PMB - LIPI)
Jakarta, 2000



KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan hasil penelitian PMB-LIPI yang dibiayai oleh Daftar Isian Proyek (DIP) Tolok Ukur Wacana Islam Tentang Hubungan Agama Dan Negara Tahun 1999-2000. Sebelum dibukukan, hasil penelitian ini telah diseminarkan pada tanggal, 30 Nopember 2000 di Puslitbang Kemasyarakatan Dan Kebudayaan dengan pembahas Prof. Dr. Deliar Noer. Banyak masukan dari beliau yang berguna untuk memperbaiki hasil penelitian tersebut. Kami selaku Kapuslitbang mengucapkan terimakasih atas kesediaannya untuk membahas hasil penelitian ini.

Buku ini membahas pemikiran beberapa tokoh ulama Islam pada masa pergerakan nasional. Percikan pemikiran mereka masih menjadi bahan referensi bagi pemikiran ataupun tokoh Islam masa kini dalam hubungan hubungan dengan agama dan soal-soal kenegaraan.

Topik tentang Islam dalam hubungan dengan negara agaknya tetap aktual, sejak masa pergerakan nasional hingga kini. Munculnya suara-suara agar dalam upaya amandemen UUD 45, tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya) yang dihapus dari Mukadimah UUD 45, dimasukkan kembali, merupakan bukti bahwa persoalan ini masih menjadi perhatian masyarakat.

Sebagaimana diakui oleh para penulisnya bahwa buku ini masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu saran dari pembaca sangat dihargai. Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Desember 2000

Kepala Puslitbang PMB-LIPI

Dr. Riwanto Tirtosudarmo

NIP : 320003397



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i.
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
❖ MUKADDIMAH..... <i>Oleh Dwi Purwoko</i>	1 - 10
❖ PANDANGAN H. AGUS SALIM MENGENAI HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA <i>Oleh : Surmiati Ali</i>	11 - 38
❖ PEMIKIRAN K.H. MAS MANSUR KEMAJUAN BANGSA DAN NASIONALISME..... <i>Oleh : Muhammad Hisyam</i>	39 - 68
❖ PANDANGAN KH. HASYIM ASY'ARI TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA..... <i>Oleh : Asfar Marzuki</i>	69 - 98
❖ WACANA NATSIR MENGENAI HUBUNGAN AGAMADAN NEGARA PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL..... <i>Oleh : Dwi Purwoko</i>	99 - 137

WACANA ISLAM INDONESIA TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA : SEBUAH KAJIAN SEJARAH MUKADDIMAH*

Dwi Purwoko

Memasuki abad 20 perkembangan ke arah terbentuknya negara Indonesia menemukan fase baru. Fase ini ditandai oleh munculnya kesadaran kebangsaan di kalangan elit masyarakat pribumi yang pelan tapi pasti mempengaruhi massa melalui jalur organisasi modern.

Dalam dasawarsa kedua abad ini beberapa organisasi modern telah lahir dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda, tetapi arahnya semakin jelas yakni perlunya bangsa ini melakukan emansipasi perlawanan terhadap kolonialisme. Ada fenomena penting periode ini, yakni pencarian ideologi yang dapat mempersatukan semua unsur rakyat pribumi dalam satu wadah persatuan. Pencarian ini diwarnai dengan munculnya perdebatan di antara komponen bangsa. Komponen bangsa yang dimaksud adalah golongan nasionalis Islam di satu pihak dengan nasionalis yang netral agama di lain pihak.

Tidaklah mengherankan bila golongan yang pertama melontarkan ide-ide yang bersumber pada Islam ketika Indonesia sedang mencari bentuk ideal ideologi persatuan. Pada awalnya gagasan-gagasan muncul sebagai reaksi dan perlawanan terhadap penjajahan orang kafir atas orang Islam beserta simbol-simbolnya. Reaksi dan perlawanan yang dilandasi oleh keimanan ini berkembang menjadi cikal bakal pembentukan nasionalisme. Deliar Noer dalam studinya misalnya sampai pada kesimpulan bahwa nasionalisme Indonesia dimulai sebenarnya dengan nasionalisme Islam (Deliar Noer, 1982:8).

* MUKADDIMAH (pendahuluan) ini diedit oleh M. Hisyam. Terimakasih saya ucapkan kepadanya. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan penulis, Surmiati Ali dan AsfarMarzuki yang telah memberi komentar terhadap Mukkadimah ini.

Persamaan agama agaknya telah menjembatani hubungan antar etnis dan meliputi berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara. Kesamaan yang telah ada dipakai untuk memperkokoh dan "persatuan" dan membangkitkan kesadaran kebangsaan. Memang ada organisasi-organisasi yang lahir atas dasar kebangsaan seperti Budi Utomo, Pasundan, Jong Sumatera Bond dan sebagainya - tetapi kebangsaan dalam pengertian mereka masih terpusat pada suku bangsa atau bersifat ethnocentis. Sedangkan Sarekat Islam dan Muhammadiyah telah menggunakan "konsep bangsa" dalam pengertian antar etnis dan bebas dari rasa kedaerahan. Kedua organisasi Islam ini telah tersebar ke berbagai wilayah kepulauan Nusantara pada dekade kedua abad 20. Hal ini telah membuka jalan ke arah pembentukan nasionalisme dan merupakan bibit persatuan Indonesia. Di dalam dua organisasi itu orang merasa berada dan menemukan wadah persaudaraan antar kaum senasib di tanah air yang dapat dipersatukan. Atas dasar kenyataan ini kalangan Islam merasa tidak melihat alasan yang kuat jika cinta tanah air saja menjadi landasan persatuan tanpa melandaskan diri pada agama. Mereka beranggapan bahwa Islam sesungguhnya lebih sesuai untuk dijadikan dasar dan landasan persatuan untuk membangun bangsa (Taufik Abdullah (ed.), 1991:241).

Tetapi pandangan kalangan Islam itu dinilai oleh kalangan nasionalis netral agama sebagai terlampau terpengaruh oleh gerakan Pan Islam yang tidak saja akan mempelemah persatuan nasional, bahkan membahayakan (Taufik Abdullah (ed.), 1991:238). Sebabnya, Pan Islam merupakan gerakan yang berorientasi pada dunia Islam internasional.

Uraian singkat di atas memberi gambaran bahwa dalam periode ini telah lahir pikiran, gagasan dan penafsiran dari kalangan pemimpin Islam Indonesia yang mempunyai makna sangat penting tidak saja dalam perkembangan perjuangan ke arah terbentuknya negara bangsa, melainkan juga sumbangan intelektual Indonesia yang bernilai tinggi.

Khazanah intelektual tersebut merupakan rintisan awal pemikiran elite Islam Indonesia, tetapi mempunyai pengaruh yang dalam terhadap warna pemikiran yang lahir sesudah zaman ini. Ini merupakan indikator bahwa pemikiran Islam masa pergerakan nasional mempunyai bobot yang tinggi. Percikan pemikiran itu tersebar di berbagai media, koran, majalah, brosur, manuskrip dan buku. Jika dikumpulkan dan

disusun kembali akan merupakan sebuah keutuhan yang dapat dipelajari dan ditafsir menurut teori ilmu pengetahuan yang selalu berkembang. Atas dasar pemikiran ini, sebuah penelitian perlu dilakukan. Pemikiran intelektual Islam yang berkembang dalam hubungannya dengan pencarian ideologi bangsa dan nasionalisme ini dikonsepsikan sebagai pemikiran tentang "hubungan antara agama dan negara".

Konsepsi hubungan agama dan negara memang sangat luas. Konsep ini dapat diartikan sebagai pendapat, aspirasi dan harapan bagaimana semestinya agama berfungsi sebagai pengatur negara. Dengan pengertian ini, pandangan tentang hubungan agama - negara secara teori dapat digolongkan menjadi dua tipe utama, yakni agama berada di luar institusi negara, dan agama menjelma dalam institusi negara (Muhammad al Bahiy, 1986).

Di dalam kedua tipe utama ini tentunya terdapat pandangan yang samar-samar dan sulit untuk ditarik ke dalam salah satu tipe dasar tersebut. Hal ini menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Pemikiran tentang hubungan agama dan negara mempunyai pengaruh luas terhadap perkembangan masyarakat. Teori SP Varma menyatakan bahwa peranan golongan pemikir, dan biasanya dari kalangan elit dan tokoh sangat besar pengaruhnya dalam proses perkembangan masyarakat (Lihat SP Varma, 1992 : 503). Oleh karena itu, mengetahui pemikiran yang dihasilkan oleh golongan ini merupakan bagian dari upaya untuk memahami perkembangan masyarakat.

Meskipun tidak mudah untuk menyelusuri bukti-bukti tertulis hasil pemikiran muslim di Nusantara sejak tersosialisasinya agama Islam di kepulauan ini, tetapi sejarah telah membuktikan bahwa kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang berasas pada pemikiran mutlaknya agama ditransformasi dalam penetaan negara. Gelar-gelar Sultan di Jawa seperti "Sayidin Panatagama Khalifatullah" jelas merupakan simbol fungsi agama dalam tatanan negara. Institusi Qadhi yang menjadi bagian dari pranata kesultanan juga daat memperkuat hipotesis tentang kemutlakan representasi agama dalam kehidupan negara. Memang dalam beberapa periode sejarah terdapat pertentangan yang tajam antara kraton dan ulama, tetapi hal ini lebih bersifat konflik politik daripada menafsirkan agama dalam tatanan negara.

Kolonialisme telah merubah tatanan. Pengaruh kolonialisme juga menimbulkan perubahan pemikiran. Ketika muncul gagasan nasionalisme Indonesia di awal abad 20 perdebatan pun terjadi antara yang menghendaki Islam menjadi dasar penyatuan bangsa dan pemerintahan serta pengaturan negara dengan golongan yang menghendaki agar agama bersifat netral terhadap negara. Ketika itulah muncul banyak tulisan, baik di surat-surat kabar maupun terbitan lainnya yang membicarakan pemikiran yang menyangkut hubungan agama dan negara. Dinamika pemikiran pada periode ini mempunyai pengaruh nyata pada terbentuknya negara Indonesia dan perkembangan politik hingga kini.

Penelitian ini mencoba melihat wacana Islam dan negara dengan melihat pemikiran tokoh/ulama terutama dalam periode pergerakan nasional. Periode ini diambil dengan pertimbangan bahwa pemikiran yang dihasilkan oleh tokoh zaman ini mempunyai fungsi yang aktual dalam pembentukan negara Indonesia merdeka. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa konsep ulama Islam pada zaman pergerakan tentang hubungan agama dan negara ketika negara melakukan tindakan yang represif terhadap rakyat Islam yang terjajah.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran tokoh pergerakan yang mempunyai *concern* terhadap penerapan ajaran Islam dalam kehidupan negara yang dicita-citakan.

Penelitian ini menjadi penting karena hubungan antara agama dan negara selalu menjadi masalah ketika ia diperbincangkan dalam wacana publik. Perdebatan mengenai hubungan antara keduanya telah mulai sejak kekuasaan yang mengatasnamakan agama telah menimbulkan rasa ketidakadilan.

Di satu pihak tradisi Islam melalui para ulamanya membenarkan hal itu, di lain pihak tak sedikit ulama yang menolaknya. Baik yang mendukung hubungan positif maupun yang menolaknya mempunyai argumen yang kuat dan menyadarkan diri pada sumber yang utama yakni tradisi dan sejarah awal agama ini. Di Indonesia, di mana Islam telah mensejarah lebih dari 600 tahun juga tersimpan wacana yang kaya tentang ini.

Sebut saja sekedar contoh, M. Natsir melihat adanya kaitan antara agama dan negara. Deliar Noer juga melihat bahwa Islam meliputi dua aspek yakni agama dan masyarakat atau politik. Islam tidak memisahkan persoalan rohani dan dunia, tetapi mencakup dua segi, hukum islam (syariat) yang mengatur dua segi tersebut, hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan sesamanya (Deliar Noer, 1982). Dengan demikian Deliar tidak memisahkan masalah agama dan politik. Hal ini juga selaras dengan pendapat A. Rahman Zainuddin yang melihat wacana Islam dalam membicarakan masalah kekuasaan politik. Ia menjelaskan bahwa Islam mengemban suatu bentuk yang ideal di tengah-tengah masyarakat manusia (Meriam Budiardjo, 1986:189).

Di pihak yang menolak keterkaitan mekanis agama dan negara terdapat nama Nurcholish Madjid dan Munawir Sadjali . Mereka melihat bahwa injeksi politik dalam lingkungan agama telah merusak citra agama itu sendiri. Mestinya ajaran-ajaran Islam yang harus mengatur politik, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, elit dan penguasa politik mengeksploitasi orang dan konsep Islam untuk kepentingan mereka. Hasilnya bukannya politik yang terbimbing oleh moral agama tapi justru agama dimanipulasi untuk memobilisasi massa agar menerimanya guna melayani tujuan sesaat partai politik (Dale F Eicklman dan James Piscatori, 1996: 68).

Perdebatan tentang ini pada skala Internasional bahkan lebih ramai. Dalam buku mengenai Masalah-Masalah Teori Politik Islam yang disunting Mumtaz Ahmad misalnya mendiskusikan karya-karya Fazlur Rahman, Fathi Osman, Javid Iqbal, Ahmad Mousavi dll di mana mereka menunjukkan adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk merumuskan kembali politik Islam dalam konteks realitas dan problem politik masa kini (Mumtaz Ahmad, 1996).

Memang ada kecenderungan diskusi tentang Islam dan negara didasarkan pada asumsi bahwa Islam tidak membedakan antara agama dan politik karena dalam pemikiran Islam kerangka rujukannya adalah kesatuan keduanya: *din wa daullah*, "agama dan negara" (Dale F Eickelman, James Piscatori, 1998:60).

Perkembangan pemikiran Islam tentang kaitan antara agama dan negara agaknya tidak lepas dari penetrasi kekuasaan asing (penjajah) terhadap negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. John L. Esposito misalnya menganalisis bahwa pada kedua pihak agama dijadikan tempat kembali sebagai kekuatan politik yang ampuh yakni dengan cara mengilhami gerakan-gerakan nasionalis anti kolonial dalam merebut kembali kemerdekaan yang pernah lepas (John L. Esposito (ed.), 1987: 5). Respons Islam atas kolonialisme di Indonesia antara lain telah membentuk kepemimpinan bagi gerakan massa nasionalis Indonesia pertama melalui Sarekat Islam (SI). (John L. Esposito (ed.), 1987: 7 dan Fred R. Von Der Mehden, 1968:212).

Kebangkitan SI tidak bisa dilepaskan dari pandangan bahwa orang kafir Belanda tidak mempunyai hak memerintah rakyat Indonesia yang muslim, dan karenanya Indonesia harus lepas dari kekuasaan kafir dan mendirikan pemerintahan sendiri yang independent. Bahkan secara umum pandangan dari pergerakan nasional terutama yang dimotori pergerakan islam melihat kolonialisme sebagai musuh dan harus dihancurkan (Lihat juga Deliar Noer, 1982:xvi).

Sebenarnya jauh sebelum periode pergerakan nasional, perlawanan atas kolonialisme telah muncul dan dipelopori oleh para kyai dan haji. Dalam kaitan ini Snouck Hurgronje melihat Mekkah merupakan jantung kehidupan agama kepulauan Nusantara, yang setiap saat memompakan darah segar ke seluruh tubuh penduduk muslim di Indonesia. Di kota ini para mukminim berkenalan dengan bangsa-bangsa lain yang terjajah. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara kehidupan rohani di kota ini dengan kehidupan ummat beragama di tanah airnya. Keterkaitan ini merupakan gangguan bagi pemerintahan kolonial (Aqib Suminto, 1996). Kuatnya peranan Mekkah ini dikatakan oleh C. Poensen bahwa tanah Arab khususnya Mekkah bukan saja merupakan tempat untuk menyatunya jamaah-jamaah haji dari berbagai penjuru dunia, melainkan juga pusat bertemunya politisi dan pemimpin Islam dari pelbagai negara berpenduduk Islam yang memakai kesempatan ini untuk membicarakan kepentingan dan rencana-rencana politik mereka. Di tempat inilah mereka bertukar pikiran dan pendapat. Jamaah-jamaah haji yang pulang ke tanah air dibekali dengan kitab-kitab, selain untuk meningkatkan kualitas beragama juga memupuk kesadaran akan harga

diri serta identitas bangsa Islam yang berada di bawah pemerintahan kafir (Deliar Noer, 1982: 31).

Meskipun demikian dalam beberapa hal Snouck kurang sependapat dengan Poesen karena tidak semua haji-haji berbahaya bagi pemerintahan kolonial, tetapi keduanya sependapat bahwa ada keterkaitan yang erat antara perkembangan pemikiran Islam di tanah Arab dengan di Indonesia. Dengan demikian, perkembangan diskusi tentang hubungan antara agama dan negara di sana dipengaruhi oleh sejumlah faktor baik diskursus agama maupun konteks kesejarahan.

Dimuka telah dikemukakan bahwa secara teoritis konsep hubungan antar agama dan negara adalah pikiran, pendapat, aspirasi dan harapan bagaimana semestinya agama berfungsi sebagai pengatur negara. Secara metodologis, konsep teoritis seperti ini tidak dapat di "amati" kecuali dengan cara menurunkannya ke dalam konsep-konsep yang operasional.

Adapun konsep Operasional dari konsep teoritis hubungan agama dan negara dapat dirinci seperti di bawah ini :

- a. Konsep kriteria kepemimpinan (imamah) menurut tokoh yang dimaksud.
- b. Konsep mereka tentang bentuk negara, dan negara yang ideal.
- c. Ajaran-ajaran tertentu dari Islam yang perlu diwujudkan dalam menata kehidupan negara.
- d. Pandangan tentang perlu tidaknya negara campurtangan dalam kehidupan agama.
- e. Pandangan mengenai Institusi apa (dari agama) yang harus ada dalam negara seperti pengadilan agama.
- f. Pendapat mengenai siapa yang melegitimasi sebuah pemerintahan/kekuasaan. Pandangan mereka mengenai apakah Belanda sah memerintah rakyat Indonesia?
- g. Pandangan mengenai perlu tidaknya bentuk negara Islam
- h. Pandangan mengenai nasionalisme
- i. Konsepsi tentang pelaksana kekuasaan
- j. Pandangan mengenai kewenangan kekuasaan dan mekanisme pertanggungjawabannya.

Dari batasan permasalahan dan operasionalisasi konsep tersebut di atas, maka metode yang relevan untuk mempelajari wacana hubungan agama dan negara dengan menelusuri pemikiran tokoh-tokoh Islam di Indonesia, baik yang tertuang dalam karya-karya mereka berupa buku-buku, manuskrip, pamflet, artikel dsb. Selain itu juga dapat ditelusuri melalui laporan rahasia, dokumen negara di Arsip yang berkaitan dengan tokoh dan topik tersebut.

Bahan-bahan di atas adalah data yang akan ditafsirkan. Tentunya penafsiran terhadap teks menurut pemahaman penulisnya dalam konteks ruang dan waktu ketika teks itu dibuat. Tentunya tafsir ini menyinggung juga pendekatan sejarah politik di bawah mana subjek penelitian ini dapat dimasukkan.

Penelusuran bahan dimulai dari nama-nama tokoh yang diperkirakan mempunyai peninggalan karya pemikiran dalam bentuk tulisan. Untuk sementara tokoh-tokoh tersebut didaftar di bawah ini :

1. HOS Tjokroaminoto
2. Haji Misbach
3. H. Agus Salim
4. H. A. Hasan
5. H. Mas Mansur
6. H. Farchruddin
7. H. A. Karim Amrullah
8. M. Natsir
9. H. A. Sanusi
10. Ki Bagus Hadikusumo
11. KH Wahab Hasbullah
12. KH. Hasyim Asy'ari
13. dst.

Pemikiran yang berserakan dari tokoh-tokoh di atas di pilah-pilah menurut katagori yang relevan dan tidak relevan dengan subjek penelitian. Dari hasil pemilahan diambil empat tokoh yakni H. Agus Salim yang di tulis oleh Surmiati Ali, H. Mas Mansur yang ditulis M. Hisyam, M. Natsir yang ditulis Dwi Purwoko dan KH. Hasyim Asy'ari yang ditulis Asfar Marzuki. Dengan demikian tulisan ini merupakan sebuah bunga rampai dimana masing-masing merekonstruksi salah satu dari tokoh-tokoh tersebut.

Keempat tokoh di atas dipilih salah satu dasarnya adalah karena mereka mewakili dua tipe pendidikan yang berbeda. Natsir dan H. Agus Salim berlatarbelakang pendidikan Belanda (Barat), sedangkan KH. Mas Mansyur dan KH Hasyim Asy'ari bergelut dalam dunia pendidikan pesantren. Dua tipe pendidikan yang berbeda terkadang mempengaruhi sikap politik dan pemikiran mereka.

Dalam merekontruksi pemikiran keempat tokoh itu, data biografi merupakan penunjang yang sangat penting dalam merekontruksi pemikiran tokoh yang bersangkutan. Demikian juga dengan data primer (karya tokoh yang bersangkutan) ditelusuri di Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta dan Bandung. Khusus di Jakarta data primer ditelusuri di perpustakaan nasional, perpustakaan Idayu, Arsip Nasional. Selain itu data primer diperoleh dari koleksi pribadi, yang bisa jadi disimpan oleh anak keturunannya. Adapun data sekunder diperoleh melalui bacaan ilmiah maupun populer, terutama yang berkaitan dengan sejarah periode 1900 sampai dengan 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (ed.), *Sejarah Ummat Islam Indonesia*, Jakarta: MUI, 1991.
- Ahmad, Mumtaz (ed.), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996
- Budiardjo, Meriam , *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- El-Affendi, Abdelwahab, *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Esposito, John L. (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses, dan Tantangan*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Eickelman, Dale F. dan Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Bandung: Mizan, 1996.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Suhelmi, Ahmad, *Soekarno Versus Natsir* Jakarta: Darul Falah, 1999
- Varma, S.P, *Teori Politik Modern*, Jakara: Rajawali, 1992.

PANDANGAN H. AGUS SALIM MENGENAI HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

Surmiati Ali

1. Pendahuluan

Sejarawan Taufik Abdullah mengatakan bahwa permasalahan biografi, adalah, jika mempelajari biografi seseorang tokoh sejarah dapat mendekatkan kita kepada gerak langkah sejarah yang sebenarnya dan membuat kita lebih memahami tentang pergumulan manusia dengan zamannya. Yang dituntut oleh pandangan hidupnya maupun harapan masyarakatnya. Pemikiran Taufik yang menyatakan pentingnya studi biografis itu seirama dengan pengertian biografis itu sendiri, yaitu menulis dengan jujur riwayat hidup seseorang sejak ia lahir sampai meninggalnya, dengan mengungkapkan berbagai macam-macam aspek dari kehidupannya, sifat kepribadian, perjuangan dan pandangan hidupnya. (Alfian, 1980)

Buya Hamka pernah menyatakan pendapatnya tentang seorang tokoh yaitu Haji Agus Salim yang akan dibahas dalam peneltiamn ini. Dia adalah seorang manusia yang nilainya sama dengan sejuta manusia, bahkan lebih. Jarang-jarang Tuhan memberikan manusia dialam ini, apalagi kepada suatu bangsa. Bila kita membicarakan manusia Agus Salim, kita teringat seorang pujangga, seorang filosofi, seorang wartawan, seorang orator, seorang politikus, seorang pemimpin rakyat, seorang ulama. Bangsa Indonesia dapat mencabik dada dan menghadapkan kepada dunia : Haji Agus Salim adalah seorang Nasionalis sejati. Dan seorang Muslim dengan yakin akan dapat mengatakan Agus Salim adalah seorang reformis Islam yang kedudukannya sama dengan Muhammad Abduh di Mesir.

Dari Latar belakang pemikiran Hamka tersebut penulis ingin menelusuri pemikiran haji Agus Salim akan tetapi bukanlah dari berbagai aspek seperti yang dikatakan Hamka tersebut di atas akan tetapi dibatasi pemikiran haji Agus Salim mengenai negara dan hubungannya dengan agama. Karena asal usul pemikiran politik Haji

Agus Salim, memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan pergerakan bangsa Indonesia terutama umat Islam pada masa itu. Hal itu berkaitan pula dengan sikap politik pemerintahan kolonial Belanda terhadap bangsa dan agama Islam. Pemerintahan kolonial Belanda menganggap remeh bangsa Indonesia dan merendahkan agama Islam yang dipeluknya. Dia adalah perpaduan antara intelektualitas, kesederhanaan dan kematangan berpolitik, pemikir dan politisi Islam yang melampaui zamannya. Bung Karno pernah mengatakan pendapatnya tentang Haji Agus salim, "The Grand Old Man Haji Agus salim adalah seorang Ulama Intlek. Saya pernah meneguk air yang diberikan oleh Haji Agus Salim, sambil ngeleset dibawah kakinya Haji Agus Salim. Saya merasa berbahagia bahwa saya ini dulu dapat minum air pemberian Tjokroaminoto, minum air pemberian Haji Agus Salim. Haji Agus Salim juga salah seorang guru saya, terutama sekali tentang sosialisme dan politik internasional, amat *broad minded*, amat terpelajar, amat lucu kata Bungkarno. Sedangkan Muhammad Roem menghayati betul bagaimana Haji Agus Salim menderita bekerja memperjuangkan kemerdekaan bangsa yang diilhami Islam. (Tamar Jaya, 1954).

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka penelitian ini mencoba mengkaji kembali wacana pemikiran Haji Agus Salim mengenai apakah agama sebagai dasar negara. Perjuangannya dan pemikiran-pemikirannya yang berlian sangat relevan dengan situasi Indonesia yang sedang diambang disintegrasi bangsa. Perlu kiranya mengacu kembali kepada pemikiran-pemikiran haji Agus Salim untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan yang tengah terjadi di daerah-daerah sekarang ini.

Permasalahan penenlitan ini adalah wacana pemikiran seorang tokoh pergerakan khususnya Haji Agus Salim (1884 sampai sebelum Indonesia merdeka). Karena Haji Agus Salim tampil dipanggung sejarah pada periode pergerakan nasional, oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada periode tersebut. dari hasil kajian ini kita dapat memetik nilai-nilai positif untuk menatap masa depan Indonesia agar terwujudnya persatuan dan kesatuan sebagaimana cita-cita tokoh terdahulu tersebut.

Lingkup penelitian mencakup tiga permasalahan, pertama yang berhubungan dengan latar belakang kehidupan Haji Agus Salim sejak masa kecil sampai dewasa, baik lingkungan keluarganya maupun pendidikannya. Kedua mengenai perjuangannya dalam organisasi pergerakan nasional. Ketiga mengenai pemikirannya khususnya mengenai dasar negara dan agama.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Mengkaji secara kritis dan analitis pemikiran dan perjuangan Haji Agus Salim pada masa pergerakan nasional dan kebangkitan Islam Indonesia. Serta mengungkapkan pula generasi berikutnya yang mengikuti aliran pemikiran beliau.

Selain itu penelitian ini mengungkapkan latar belakang kehidupan sosial budaya Haji Agus Salim yang membawa kehidupannya menjadi seorang tokoh pergerakan nasional, dan tampil sebagai pejuang yang berfikiran kritis untuk mencapai kesatuan dan persatuan bangsa.

Kegunaan penelitian, tentunya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan cermin dan suri tauladan bagi tokoh-tokoh elit politik yang sekarang sedang berkuasa. Hasil perjuangan tokoh terdahulu untuk mewujudkan negara Republik Indonesia jangan sampai dinodai dengan kepentingan kelompok atau partai mereka sendiri, dan hendaknya mereka menteladani kepada tokoh-tokoh terdahulu seperti Haji Agus Salim yang senantiasa mementingkan dan memperjuangkan untuk rakyat Indonesia secara utuh.

Penelitian ini sudah tentu menggunakan metode Sejarah atau *historical methode* yang biasanya melakukan pendekatan sebagai berikut:

Pencarian sumber-sumber tertulis sebagai sumber sejarah yang terdiri data primer seperti karya-karya tulis Haji Agus Salim yang ditulis pada masa hidupnya. Kemudian karya tulis yang ditulis oleh para sejarawan tentang kehidupan Haji Agus Salim terutama yang berhubungan dengan tema penelitian ini

Kritik sumber, kritik sumber dilakukan setelah pengumpulan data, untuk melihat keaslian sumber autentisitas (kritik ekstern) dan validitas (sumber kritik intern). Melalui sumber kritik ini diharapkan

data yang berserakan dapat disusun menjadi fakta sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Interpretasi sumber yang telah diseleksi melalui kritik sumber. Dengan mempergunakan pendekatan multi-dimensional. Dalam proses interpretasi ini penulis mempergunakan konsep dan teori-teori ilmu sosial yang lain, agar fakta itu dapat hidup dan berbicara. Kemudian penulis harus merangkai dan menghubungkan fakta-fakta sejarah tersebut sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang integral, harmonis dan logis.

Penelitian ini mengalami kesulitan dan hambatan. Banyak dokumen-dokumen yang terdapat di Perpustakaan Nasional yang tadinya disimpan dengan baik ternyata sekarang dokumen tersebut sudah banyak yang tidak ada. Sebagaimana contoh majalah-majalah sekitar tahun 1926 misalnya Fajar Asia, Etlikh dan Annur dalam katalog masih ada tertulis dengan penjelasan beberapa jilid akan tetapi setelah dicari sudah tidak ada lagi. Kesulitan ini membuat hasil penelitian belum memuaskan. Sudah tentu hasil penelitian ini akan terus diperbaiki sesuai dengan temuan data-data berikutnya.

Meskipun dari hasil-hasil penelitian sangat sukar ditemukan tulisan-tulisan yang membicarakan hal-hal yang berkaitan studi tentang agama dan negara di Indonesia adalah kawasan kajian yang tidak pernah basi, terutama Islam dan politik di Indonesia. Dimulai oleh orientalis besar C. Snouch Hurgronje sekitar seabad yang lalu kemudian diteruskan oleh Indonesianis asing dan pribumi seperti H.J Benda, Allan Samson, Donald Emerson, Deliar Noer, Taufik Abdullah dan lain-lain.

Masa Kecil H. Agus Salim

Haji Agus Salim dilahirkan di kota Gedang Bukit Tinggi 8 Oktober 1884, putra dari seorang Jaksa yang bekerja di Medan. Nama kota Gedang adalah sebuah desa di Minangkabau terkenal dengan penduduknya yang mengutamakan pendidikan barat, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian Haji Agus Salim dilahirkan di tengah-tengah keluarga Islam yang taat. Kehidupan kampung ini lebih

mengutamakan menjadi pegawai pemerintah Belanda daripada pola hidup bertani atau berdagang.

Cara berpikir orang kampung ini lebih modern jika dibandingkan orang-orang kampung lainnya, gaya hidup mereka lebih modern, mereka banyak fasih berbahasa Belanda. Kehidupan mereka pun pada saat itu tercermin dari gaya hidup sehari-hari maupun suasana rumah dan keadaan semuanya diatur secara Eropa. Dari kampung kecil yang terletak di tepi ngarai (tebing) yang curam inilah lahir banyak sekali para tokoh intelegensia Indonesia. Di antara mereka ada yang menjadi pegawai tinggi pemerintah, menjadi dokter, advokad, jaksa, guru dan banyak pula yang menjadi pemimpin rakyat. Satu ciri khas penduduk kampung ini adalah mengutamakan pendidikan secara Eropa, demikian pula anak-anak mereka pun berpendidikan secara Eropa (Alamsyah Rais, 120).

Haji Agus Salim dilahirkan ditengah-tengah keluarga modern sebagai masyarakat Minang Kabau lainnya, keluarga Salim adalah juga teguh dan taat terhadap agama Islam. Ajaran agama Islam pada masa itu belum dirasakan sebagai sumber dinamika dan kemajuan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi sumber dinamika dan kemajuan dirasakannya terletak pada faktor interaksi sosial dan budaya dengan masyarakat bangsa lain, itulah sebabnya yang menjadi dasar motivasi untuk lebih maju, baik dikalangan pria dan wanitanya yang secara moral sangat membantu dan bermanfaat bagi generasi mudanya, meskipun demikian mereka pemeluk agama Islam yang taat.

Latar belakang kehidupan keluarga Haji Agus Salim dan lingkungannya itu sangat mempengaruhi sikap pribadi beliau, oleh karena itu semangat untuk maju di bidang intelektual seperti pendidikan dan bekerja sebagai pegawai pamong praja, dokter, guru dan lain-lainnya dapat tersalur dengan sebaik-baiknya, sekaligus banyak peminatnya. Sedangkan yang memiliki minat menjadi ulama sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena ulama-ulama yang ada pada masa itu belum mampu menterjemahkan Islam secara rational dan kreatif, tetapi lebih bersifat doktrin. Menurut Salim, ulama tersebut hanya mengutamakan segi ibadah dan fikih dan terlupakan segi kemasyarakatan-nya.

Masa Sekolah

Pada usia 7 tahun Agus Salim dimasukkan sekolah dasar Belanda yaitu ELS (Eropeesche lagere School) di kota Bukit Tinggi sekitar 5 Km dari kampung Haji Agus Salim. Dimasukkannya Agus Salim ke sekolah tersebut mendatangkkan reaksi yang sangat keras dari famili ayahnya, mereka khawatir Agus Salim berubah menjadi Kristen (Pustaka,10). Meskipun demikian Agus Salim tetap bersekolah di ELS. Kecerdasan otak Agus Salim sudah menarik perhatian guru-gurunya orang Belanda, rasa simpati yang terlihat dengan permintaan ingin membina dan mengarahkan Agus Salim sepenuhnya baik disekolah maupun di rumahnya. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh kedua orang tuanya. Hanya diizinkan ketika saatnya makan pagi, siang dan malam ditambah waktu sesudahnya boleh tinggal dirumah gurunya. Pada usia 13 tahun sesudah menamatkan ELS dengan gemilang (1898) Agus Salim berangkat menuju kota Batavia (sekarang Jakarta) untuk melanjutkan sekolahnya. Salim meninggalkan kampung halamannya berangkat dengan kapal laut, sesampai di Batavia ia masuk sekolah HBS (Hoger Burgelijkie) yaitu sekolah menengah Belanda di Batavia. Hanya 5 tahun Agus Salim berhasil menyelesaikan studinya di tahun 1903 dengan gemilang dan sekaligus menjadi juara. Pada masa itu hampir tidak ada anak pribumi yang bersekolah di bangku HBS kecuali yang dapat belajar hanya Agus Salim dan P.A. Hoesein Djajadiningrat dan yang selebihnya adalah anak-anak bangsa Eropa. Kecerdasan otak Agus Salim yang luar biasa diakui oleh gurunya yang juga oleh sarjana-sarjana Belanda. Bahkan menurut ramalan gurunya Haji Agus Salim akan menjadi orang penting atau pemimpin bagi bangsa Indonesia (Balai Pustaka, 11). Kecemerlangan otak Agus Salim ini dikagumi oleh Raden Ajeng Kartini “Kami tertarik sekali kepada anak muda, kami ingin melihat anak muda itu bahagia, anak muda itu namanya Salim, yang dalam tahun ini mengikuti ujian penghabisan sekolah HBS dan ia keluar sebagai juara umum (pertama) dari ketiga sekolah HBS. Anak muda itu ingin sekali pergi ke Belanda untuk belajar menjadi dokter sayang sekali keadaan keuangannya tidak memungkinkan. Gaji ayahnya cuma F.150 sebulan”. (Kartini, 1249)

Sedangkan menurut Kartini sendiri dirinya tidak mungkin pergi ke negeri Belanda karena pada saat itu adat budaya masyarakat Timur belum memberikan keleluasaan terhadap kaum wanita. Oleh karena itu setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Kartini memberikan saran kepada pemerintah agar supaya jatah bea siswanya dilimpahkan saja kepada Agus Salim. Usul tersebut diterima baik oleh pihak pemerintah yang selanjutnya ditawarkan kepada Agus Salim. Tetapi Salim menganggap cara demikian adalah penghinaan terhadap dirinya. Akhirnya tawaran itupun ditampiknya seraya mengatakan "Kalau Pemerintah mengirim saya karena anjuran Kartini, bukan karena kemauan pemerintah sendiri lebih baik tidak".

Itulah cuplikan surat Raden Ajeng Kartini kepada Ny. Abedanon dan Kartini sendiri ingin membantu Agus Salim untuk melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda sebagaimana dinyatakan dalam suratnya berikut ini. "Apakah tak mungkin orang lain menikmati manfaatnya gubernemen menyediakan untuk kami berdua sejumlah uang sebesar 4.800 gulden guna menyelesaikan pendidikan kami. Apakah tidak bisa uang itu dipindahkan kepada orang lain yang juga perlu dibantu, mungkin lebih banyak kepentingan daripada kami! Alangkah indahnya apabila pemerintah bersedia membiayai seluruh biaya pendidikannya yang berjumlah kira-kira 800 gulden. Bila tak mungkin, kami akan berterima kasih, seandainya Salim dapat menerima jumlah 4.800 gulden yang disediakan untuk kami itu. Untuk kekurangan atau sisa yang lainnya kami dapat meminta bantuan orang lain. (R. Kartini, 1954). Maka biarkan dia menikmati kesenangan itu, kesenangan itu, kesenangan yang sudah lama kami dambakan yang kini diraih lepas dari jangkauan kami. Berikan kami rasa bahagia dengan membahagiakan orang lain yang mempunyai keinginan-keinginan, perasaan dan cita-cita yang sama dengan kami". Kami tahu artinya merasakan sesuatu yang hidup dalam sukma, kami mengerti betapa pemuda Salim mengandung hasrat yang membara dalam dada. Maka jangan biarkan jiwa hidup yang muda serta indah itu mati dikuncup, jangan biarkan tenaga yang segar hilang percuma ! Ya harus dirawat dan didayagunakan sebaik mungkin untuk kebajikan rakyat yang begitu gandrung pada tenaga-tenaga yang

langka ini. Banyak sekali yang dapat dilakukan oleh Salim sebagai dokter untuk rakyatnya. Dan sesungguhnya adalah idaman Salim untuk bekerja untuk rakyat kita (Kartini, 1954).

Itulah kekaguman Kartini terhadap Agus Salim ingin pula memperjuangkan cita-citanya melanjutkan sekolah ke negeri Belanda. Memang Agus Salim memiliki minat yang besar terhadap pendidikan, oleh karena itu ia berusaha mendapat beasiswa ke negeri Belanda, bahkan ada yang menganjurkan supaya melanjutkan pendidikan di Stovia saja. Namun semua usaha yang dilakukan itu mengalami kegagalan.

Agus Salim memang tak pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Hindia-Belanda. Tentang hal ini ada beberapa anggapan yang dikemukakan oleh sumber yang berlainan. Versi lain mengatakan bahwa Agus Salim telah menolak tawaran Kartini sambil mengatakan : “Kalau Pemerintah Belanda mengirim saya hanya karena anjuran Kartini dan bukan karena kemauan pemerintah, lebih baik ...” namun versi lain mengatakan bahwa anggapan tersebut tidak masuk akal, karena Agus Salim tidak tahu tentang adanya himbuan Kartini.

Dalam tulisan ini ada baiknya kita mengemukakan pendapat Agus Salim ketika ia masih remaja, cuplikan tersebut sebagaimana ia ucapkan ketika ia memberi kuliah di depan mahasiswa Cornell University di Amerika, dalam posisinya sebagai dosen tamu (*guest lecturer*) pada tahun 1953 cuplikan tersebut adalah sebagaimana dibawah ini :

“Ketika saya berumur 13 tahun, saya dikirim sekolah ke Batavia, ketika itu saya telah menyelesaikan bagian pertama pendidikan agama sebagai orang Melayu dan Islam. Maka saya mulai sekolah sesuai aturan Barat. Saya mulai masuk sekolah aturan Belanda pada usia tujuh tahun; boleh dikata ketika itu masuk kelinci percobaan pertama orang-orang bumiputra yang diberikan pendidikan Barat, menurut ia Prof. Snouck Hurgronje datang pada tahun sekitar 1880 dan adalah kebijaksanaannya untuk mencobakan pendidikan Barat di Hindia Timur, tujuannya adalah untuk merangkul lapisan atas bangsa Indonesia masuk kedalam kultur Belanda dan dengan demikian mengharapakan mereka

mau bekerjasama dengan Belanda. Tujuan kedua dari kebijaksanaan Snouck Hurgronje adalah menjauhkan orang tersebut dari ajaran Islam yang sampai waktu itu menyebabkan mereka menjaga jarak dan kurang tertarik kepada pengaruh Barat. Terus terang saja, ketika ayah saya memasukkan saya dan kakak saya ke sekolah Belanda orang-orang di kampung saya agak heboh dan bertanya-tanya : apakah mereka mau dijadikan orang Kristen” (Muchtar. K1954).

Selanjutnya Agus Salim menceritakan, bahwa secara terus terang pendidikan tingkat menengah di HBS dulu sesungguhnya telah berhasil menjauhkan dirinya dari Islam. Tidak hanya dari agama Islam saja, sesungguhnya dari semua agama. Ketika itu adalah akhir abad ke 19 dan tahun-tahun pertama memasuki abad ke 20 dimana pendidikan ilmu pengetahuan dianggap umum sebagai berlawanan dengan agama. Maka ketika menempuh dan melalui HBS selama 5 tahun eksisnya Agus Salim merasa tak dapat berpegang kepada satu agamapun secara sungguh-sungguh hanya karena keluarganya termasuk taat beribadah secara Islam. Maka seakan-akan melanjutkan tradisi, saat itu banyak orang-orang muda seperti dia.

Agama hanya sebagai sesuatu yang dibutuhkan orang-orang kurang terdidik, kalau tidak orang akan memasuki jalan sesat. Berkata Agus Salim “Maka ketika aku sering menunjukkan kurang keyakinan terhadap agama, ayahku hanya berkata, bahwa orang Belanda yang telah melalui pendidikan tinggi di Universitas pun ada yang masuk agama Islam ini adalah satu bukti bahwa pendidikan Barat sama sekali tidak bertentangan dengan keyakinan agama.”

Pada Akhirnya dengan dorongan ayahnya pula, Agus Salim mulai membawa dua buku hasil karya Prof. Snouck Hurgronje, dimana ia merasa tak menemukan apa yang dicarinya, walaupun demikian Agus Salim merasa bahwa apabila ada orang yang besar pengaruhnya terhadap perjalanan hidupnya itu adalah Prof. Snouck Hurgronje. Karena anjuran profesor ini pulalah pemerintah Belanda kemudian juga mencobakan eksperimen baru untuk menempatkan orang pribumi Indonesia atau irlandia sebagai tenaga konsulat Belanda di beberapa negara. Itulah

diantaranya cuplikan kisah Agus Salim di depan mahasiswa Cornell University, lebih kurang 4 dasawarsa kemudian (Muchtart, 1954).

Pada usia 19 tahun, Agus Salim sudah dihadapkan pada suatu kenyataan yang tidak diharapkan sebelumnya. Sementara dirinya menganggur, datanglah permintaan orang tuanya agar Agus Salim secepatnya bekerja di pemerintah. Minat membaca Salim memiliki kesempatan yang sangat baik untuk menjadi pegawai negeri pemerintah akan tetapi beliau merasa enggan bahkan mulai timbul rasa bencinya terhadap penguasa kolonial Belanda. Itulah sebabnya harapan orang tuanya tidak dapat dipenuhinya. Sikap Agus Salim itu memunculkan suatu masalah dengan orang tuanya, timbul ketegangan antara orang tua dengan dirinya. Sementara itu Agus Salim bekerja sebagai penerjemah, kemudian ia tinggalkan dan ia bekerja sebagai pembantu notaris (P.B.K. 1995) Dalam usia 21 tahun, Agus Salim meninggalkan Jakarta merantau ke Indragiri untuk bekerja pada kongsi pertambangan. Disaat itu pula, pemerintah menawarkan sebagai konsul Belanda di Jeddah untuk mengurus jemaah Haji Indonesia di Arab. Pada mulanya tawaran pemerintah Belanda itu ditolaknya, tetapi karena sikap tersebut menambah berat sakit yang diderita ibunya kemudian meninggal dunia. maka akhirnya diterima juga tawaran untuk memenuhi pesan terakhir dari ibunya yang tercinta. Agus Salim bekerja di Indragiri hanya satu tahun (1905-1906).

Pada tahun 1906 Agus Salim berangkat menuju Jeddah sebagai konsulat Belanda sampai tahun 1911. 5 tahun lamanya, selama berada di Jeddah dia mempelajari Islam dan selama 5 tahun itu dia menunaikan ibadah Haji di Mekkah. Pada kesempatan itu Agus Salim bertemu dengan pamannya Sjech Ahmad Khatib yang dikenal sebagai seorang ulama besar pada masa itu. Ia keturunan dari Abdul Latief Khatib. Dengan demikian antara dengan Agus Salim memiliki pertalian darah sebab Agus Salim adalah cucu dari Badur Rachman Dt. Rangkayo Basa yang merupakan saudara kandung dari Abdurrachman Lathif Khatif yang keduanya anak tuanku Imam Abdullahin Abdul Aziz Sjech Awal Khatif, sebagai ulama pelopor pembaharuan di Minangkabau yang berkedudukan di Mekkah (sejak tahun 1876, beliau berada di Mekkah

dan juga sebagai imam di Masjidil Haram). Pada kesempatan itulah Agus Salim belajar pengetahuan agama dan berdiskusi dengan beliau mengenai berbagai Masalah agama Islam. (Solichin Salam, 1961) Dengan modal kemampuannya yang menguasai beberapa macam bahasa dunia dan memiliki pengetahuan yang luas, maka dalam usaha mendalami ajaran agama Islam lebih banyak membandingkan dengan penuh kritik daripada mendengarkan fatwa guru semata, itulah sebabnya yang membedakan antara Agus Salim dengan ulama-ulama lain yang pernah berguru kepada beliau, diantaranya Sjech Taher Jalaluddin, Syech Muhammad Jamail Djambek, Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Andullah Ahmad, Sjech Jamil Djaho, Sjech Sulaiman Rasuli, K.H. Dahlan, K.H. Hasyim Ashari, dll.

Bagi Agus Salim mempunyai bakat di dalam berbagai bahasa diantaranya bahasa Arab, membuka pintu untuk mempelajari Agama Islam secara dalam, pengetahuan agama Islam yang dipelajarinya telah menimbulkan kesan yang teramat dalam pada dirinya. Hal ini ditulis kemudian pada sebuah surat kabar bendera Islam pada tanggal 2 Mei 1927 yang dikutip oleh Deliar Noer dalam buku Gerakan Islam Modern Indonesia sebagaimana dituliskannya, "Semasa itu keIslamanku seolah-olah bawaan kebangsaan saja dan bukanlah menjadi agama keyakinan yang bersungguh-sungguh. Tetapi selama 5 tahun berada di Saudi Arabia lima kali naik haji, dan bertambahlah sikap terhadap agama, daripada tidak percaya menjadi syak dan daripada syak menjadi yakin mengakui keadaan Allah dan agama Allah".

Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1911 Agus Salim, membawa pengetahuan keIslamman yang sangat baik, sehingga ia menjadi seorang tokoh ulama dan alim dan sekaligus menguasai bahasa Arab dengan fasih. Atas dasar itulah ia berpikir bahwa umat Islam di Indonesia khususnya di Minangkabau mengalami kemunduran. Yang menurut beliau "bahwa umat Islam Indonesia mundur karena salah memahami atau menafsirkan ajaran-ajaran Islam".

Pada perkembangan berikutnya, Haji Agus Salim bekerja di jawatan pekerjaan umum (BOW : Burgerlijke Openbare Worker) di

Jakarta hanya sekitar 1 tahun (1911-1912) kemudian ia kembali ke kampung halamannya kota Gedong kemudian mendirikan HIS atau sekolah dasar.

Agus Salim tiga tahun (1912-1915) merintis dan meletakkan dasar-dasar pendidikan modern pada sekolah dasar yang didirikannya HIS di kampungnya kota Gadang. Kemudian beliau bersama anak istrinya pergi merantau menuju Jakarta dan kemudian menetap di Bogor. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ia bekerja di kantor percetakan Indonesia (*Indonesische Dreklerij*) Tidak lama dia bekerja disana kemudian ia pindah lagi ke Jakarta dan iapun selalu berpindah-pindah pekerjaan, dari hasil penelitian dikumpulkan oleh Mardauas, betapa banyak pekerjaan yang dirasakan oleh Agus Salim sebagai berikut:

Dalam kongres PSII tahun 1930 di Yogyakarta, Salim terpilih menjadi ketua partai dan pada tahun itu juga ia dikirim ke Djenewa Negeri Belanda. Tahun-tahun berikutnya ia semakin sibuk sehingga tahun 1932 H. Agus Salim memimpin kongres Al Islam di Malang bersama-sama Tjokroaminoto. Dalam kongres berikutnya (kongres PSII) yang juga diadakan di Malang Salim menjadi ketua dewan partai, kemudian pada tahun 1936 H. Agus Salim mendirikan partai penyedar. Dua tahun lamanya H. Agus Salim absen dalam politik yaitu dari tahun 1940-1942, ia banyak mencurahkan perhatiannya dalam bidang agama dan kebudayaan.

Kehidupan H. Agus Salim selalu berpindah-pindah ke Jakarta, sampai tahun 1920-an begitupun pekerjaannya ia menjadi Hoofd redacteur untuk bahasa Melayu pada komisi Bacaan Rakyat yang berganti nama menjadi Balai Pustaka. Kemudian pindah lagi ke Bataviasche Nieuwsblad, suatu kantor persurat kabaran, namun sampai tahun 1934 beliau masih mau bekerja untuk Balai Pustaka karya terjemahan terakhir adalah "Tjerita Mowgli". Anak didikan Rimba yang dikarang oleh Rudyard Kipling, tetapi tidak pernah lama-lama dalam suatu tempat pekerjaan. Beliau juga pernah mendapat tawaran bekerja dari pemerintah untuk menjadi pejabat inspektur pajak di Banjarmasin,

tetapi tawaran itupun ditolak, bahkan ; biar makan kerikil, dari pada saya menerima tawaran Belanda”. (PDK, 1995)

Dari hasil penelitian PDK dijelaskan adalah sampai tahun 1936, H. Agus Salim lebih banyak pengasuh surat kabar, diantaranya menjadi redaksi bersama Abdul Muis dari “de Inlandsche Evalute” pada tahun 1917, kemudian menjadi redaktur Neraca pada tahun 1920 yang berada di Jakarta. Bersama Cokroaminoto ia menerbitkan surat kabar “Fadjar Asia” (1927-1930). Ia juga menjadi redaktur “majalah Mustika” yang terbit di Yogyakarta pada tahun 1931-1932, 4 tahun kemudian Agus Salim membuka sebuah kantor AIPO (*Advies en Informatieve Bureau*/penerangan umum) juga menjadi redaktur majalah “Pergerakan” yang terbit di Jakarta (PDK, 1995).

Penelitian PDK juga menjelaskan H. Agus Salim selalu tampil dalam berbagai kesempatan beliau menjadi penasehat ahli dalam soal-soal ke Islaman . Bagi diri H. Agus Salim merupakan suatu kesempatan untuk memperdalam tentang sejarah Islam, hukum Islam dan mendalami kembali Al Qur’an dan lain-lain. Sebagaimana dikatakannya di Cornell University di Ithaca pada tahun 1953 yaitu : “Saya menjadi penasehat soal-soal ke Islaman pad a perhimpunan Muhammdiyah, juga pada Al Irsyad dalam sarekat Islam serta pada perhimpunan pemuda pelajar Islam (JIB) (PDK, 1955).

Sebagaimana dijelaskan oleh penelitian PDK bahwa H. Agus Salim pada tahun 1930 diundang oleh Kupres yaitu pemimpin perkumpulan sarekat sekerja sosialis Belanda (NVV) dalam rangka menghadiri sidang Biro Internasional Perburuhan di Genewa. Sesampainya ditempat sidang Kupres meminta teks pidato yang akan disampaikan oleh H. Agus Salim untuk diterjemahkan, kenapa ? Tanya Kupres dijawab lagi; “sebab saya mau bicara dalam bahasa Perancis”. Dijelaskan lagi dari Kajian PDK bahwa anekdot seperti ini sering terjadi bila lawan bicaranya mempunyai maksud-maksud untuk memperdaya dirinya. Sebagaimana pernah dilakukan pada waktu masih di Jeddah (1906-1911).

Kepergian H. Agus Salim ke Genewa, beliau juga meluangkan waktunya untuk mengadakan pertemuan dengan pengurus perhipunan Indonesia di Negeri Belanda. Diantaranya adalah Moch. Hatta, Datuk Nazir Pamuncak, Sukirman, Soemiro, Iskaq, Sami, dll. Beberapa informasi tentang perkembangan di Indonesia (tanah air) pada saat itu disampaikannya untuk menambah semangat jiwa perjuangan mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda. acara tatap muka dengan pemuda pelajar bagi Salim adalah sudah menjadi kebiasaan. Seperti dengan Hatta, sebelum Hatta pergi ke Belanda sudah beberapa kali berkunjung ke rumah Salim. Bahkan mengenal Salim, menurut Hatta adalah sejak masih duduk di bangku sekolah (MILO) di Padang, melalui tulisan-tulisan Salim yang dimuat dalam *Neratja* (1918). Kemudian dilanjutkan pada waktu Hatta sekolah di Jakarta (PHS-Sekola Dagang Menengah). Bersama anak muda lainnya seperti Bander Johan, Amir, Kasiman Singodimedjo, Moh. Watsir, Sarjan, Sujono, dll. Sering nyari kepada Agus Salim, sehingga terjalin hubungan yang akrab bahkan banyak yang mengikuti jejak yang pernah dirintisnya (PDK, 1995).

Nama Indonesia semakin dikenal di luar negeri hal itu dapat dipahami dengan diundangnya H. Agus Salim ke Swiss dan Belanda sebagai wartawan surat kabar *Fadjar Asia*. Perjumpaan dengan berbagai wartawan Eropa telah membawa angin segar bagi bangsa Indonesia. H. Agus Salim telah membawa nama bangsa Indonesia ke tingkat internasional dan sekaligus menaikkan derajat putra bangsa Indonesia pada masa itu. Padahal sebelumnya Indonesia belum pernah dikenal oleh dunia luar yang mereka ketahui hanya hutan belantara dengan demikian dunia internasional khusus Eropa mulai mengenal dan mengetahui negeri Indonesia dan putra bangsanya yang juga cerdas seperti orang-orang Eropa. Atas dasar itulah nama Indonesia senantiasa dimasukkan dalam agenda-agenda pembicaraan atau dalam tulisan-tulisan di majalah Eropa (PDK, 1955).

H. Agus Salim sebagai wartawan yang mempunyai daya pikir kritis dibidang persuratkabaran, kemahirannya bukan hanya itu saja akan tetapi juga ia aktif dalam organisasi dan pada tahun 1915 H. Agus Salim mulai terjun ke dunia politik dengan memasuki Sarekat Islam (SI).

Haji Agus Salim Dalam Pergerakan Nasional (S.I).

Jika berbicara SI (Sarekat Islam) tidak dapat dilepaskan dengan seorang tokoh HOS Tjokroaminoto, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa SI identik dengan Tjokroaminoto dan sahabat dekat H. Agus Salim dalam perjuangan SI selanjutnya. Kongres pertama SI pada bulan Januari 1913 di Surabaya membawa nama Tjokroaminoto semakin termasyhur terutama di Surabaya. Dapat dikatakan bahwa kongres akbar SI merupakan perhelatan Tjokroaminoto yang termulia. Betapa tidak dia sebagai pemimpin SI dan sekaligus sebagai cabang (Surabaya) menjadi tuan rumah dan dihadiri 10.000 orang. Kesuksesan menyelenggarakan kongres melambangkan nama Tjokroaminoto dalam jajaran elite Syarekat Islam. Apalagi setelah pemerintah menerima permohonan pengalaman status badan hukum SI, meskipun status ini tidak sepenuhnya melegakan segenap pengurus SI namun pemerintah Kolonial Belanda sangat berhati-hati dalam menanggapi permohonan tersebut. Pemerintah kolonial Belanda merasa ketakutan jika timbul suatu persatuan menentang penjajah, ibaratkan dari dalam mengganggu kelancaran pemerintahan kolonial Belanda.

Pada perkembangan berikutnya anggota SI semakin bertambah diperkuat dengan masuknya tokoh-tokoh seperti Abdul Muis, Wondoamiseno, Sosrokardono, Alimin Prawirodirdjo, Raden Gunawan dsbnya. Semua tokoh ini bersatu untuk memperkuat SI. Organisasi inilah yang merupakan era baru bagi kaum Islam Indonesia untuk mulai bergerak dan berjuang dalam meraih kemerdekaan Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah Kolonial Belanda mulai berusaha penetrasi ke dalam tubuh organisasi guna mengacaukan lajunya organisasi SI. Untuk itu akses untuk ke dalam organisasi SI sangat diperlukan dengan maksud mengadu domba atau mengacaukan gerak lajunya organisasi ini. Menurut suatu hasil penelitian, bagaimana caranya mengacaukan organisasi tersebut maka diperlukan pula isu-isu politik yang bersifat mengacau, serta menghambat dengan dipersulitnya izin mendirikan cabang-cabang SI di daerah Indonesia lainnya. Oleh karena itu pemerintah kolonial Belanda meminta H. Agus Salim untuk meneliti

keberadaan dan sepak terjang SI. Dari hasil penelitiannya ke dalam tubuh SI itu maka akhirnya ia masuk sebagai anggota organisasi SI pada tahun 1915 sebagaimana telah disebutkan terdahulu.

Pada perkembangan berikutnya tahun 1915, H. Agus Salim dan keluarganya sudah menetapkan untuk tinggal di Jakarta disamping ia memasuki cikal bakal gerakan politik di Indonesia di kalangan kaum muslimin, terutama pada 20 tahun sejak Sarekat Islam didirikan. Sebelum berencana Sarekat Dagang Islam, didirikan oleh K.H. Samanhudi, M. Asmodimedjo, M. Kertisaruno, M. Sumawerdayo, dan M. Hahi Radjah di Solo. Pada perkembangan berikutnya 11 November 1912 SDI menjadi SI atau Sarekat Islam.

Pada tahun 1915 H. Agus Salim masuk Sarekat Islam, pada perkembangan berikutnya ia terpilih menjadi anggota pengurus besar, cabang SI bersama-sama Tjokroaminoto, Abdul Muis, Wondowiseno, Sasroharsono, Suryopranoto, Alimin Prawirodirjo. Bersama-sama dengan para tokoh-tokoh ini H, Agus Salim memajukan SI dengan sekuat tenaga dan menjadikan pula SI menjadi suatu partai yang besar dan berpengaruh di Indonesia. Dengan demikian SI berkembang dengan pesat dan menjelang akhir tahun 1919 anggotanya sudah mencapai dua juta orang, terbagi atas 80 cabang yang bertebaran di seluruh tanah air. Kemajuan SI yang demikian pesat memerlukan manajemen yang kuat untuk mengelola organisasi ini, namun kelemahan SI terletak dalam bidang administrasi atau kecakapan dalam berorganisasi yang baik, sehingga pemerintah Belanda menghalang-halangi dibentuknya pengurus pusat, dan sejak tahun 1917 SI mulai di infiltrasi oleh aturan-aturan sosialis (kiri/komunis).

Sebagai akibat dari infiltrasi ini, akhirnya timbul perpecahan di tubuh organisasi SI ini sehingga SI pecah menjadi dua bagian yaitu SI putih (Islam) dan SI merah yang berhaluan komunis, hal ini terjadi pada tahun 1920.

Minat H. Agus Salim dalam memajukan S.I. sangat besar, dengan pemikiran-pemikirannya yang brilian yang dilontarkannya di arena organisasi, membuat dia terpilih untuk menjadi Pengurus Besar

Cabang S.I. dan tercatat pula dia pada saat itu sebagai pemimpin termuda dalam S.I. Mulailah ia berkibrah untuk memajukan organisasi Islam yang dicintainya itu. Mulai dari situlah karier politik dan pemikiran-pemikirannya sangat ditakutkan dan diperhitungkan oleh lawan dan kawannya. Hal ini terlihat pada perkembangan berikutnya dialah yang membuat S.I. semakin dikenal oleh masyarakat luas dengan mengemukakan ide bahwa “perlu adanya suatu media atau surat kabar untuk menyampaikan kepada masyarakat cita-cita dan perjuangan S.I. baik untuk masa kini atau masa yang akan datang”.

Pemikiran dan sepak terjang H. Agus Salim tersebut mengundang makna yang sangat berharga dalam memajukan S.I. dan punya arti politik yang sangat penting untuk masa depan Indonesia. Sudah tentu dalam organisasi ini akan berhadapan dengan pemerintah Kolonial Belanda, rasa terjajah yang sangat menyakitkan rakyat, maka timbullah rasa ingin bangkit untuk berjuang melawan penjajahan Belanda. Kesadaran ini muncul ketika rakyat telah membaca tulisan Salim pada surat kabar Neratja.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut beberapa tahun kemudian H. Agus Salim dan Abdul Muis, banyak membuat tulisan-tulisan di surat kabar harian Neratja, H. Agus Salim sendiri pernah memegang tampuk pimpinan redaksi. Hal ini pernah di kemukakan oleh Moh. Hatta, bahwa pada tahun 1918, pada saat masih duduk di bangku sekolah MULO di Padang, beliau sesudah mengenal nama Salim dan Abdul Muis melalui tulisan-tulisannya di surat kabar harian Neratja “untuk saya yang bersekolah di Padang pada masa itu, buah pena Salim yang tajam itu dengan kata-katanya yang tajam dan menarik minat pembaca, sehingga menjadikan saya seorang yang gemar membaca surat kabar Neratja. Salim di lembaran harian Neratja, yang goresan penanya memuat pendapat antara pemerintah dan kaum pergerakan S.I. Perbedaan pendapat ini memukau para pembaca karena dibahas secara kritis dan menarik.

Pada masa ini pulalah muncul gejala-gejala yang kurang baik, yakni adanya gejala perpecahan di tubuh S.I. Pada awalnya bertitik tolak

dari perbedaan pendapat mengenai keanggotaan partai di Dewan Rakyat (Volksraad). Pada kelompok Semaun, Darsono, Sosrokardono dan lainnya yang mengatakan bahwa Volksraad adalah sebagai suatu pertunjukkan kosong dan juga suatu akal dari kaum kapitalis untuk mengelabui mata rakyat jelata dalam memperoleh sesuatu yang lebih banyak. Atas dasar itulah mereka yang berpendapat menganjurkan kepada Abdul Muis dan Tjokroaminoto yang duduk di Volksraad sebagai wakil S.I. supaya menarik diri sekaligus melepaskan keanggotaan dari parlemen.

Situasi semakin kurang baik, karena perbedaan pendapat semakin tajam, yaitu pada saat setelah diketahuinya bahwa Semaun, Darsono, dan lainnya banyak terlibat menjadi anggota Indische Social Democratische Vereebiging atau ISDV. ISDV ini adalah suatu perkumpulan campuran dari berbagai ras yang pada mulanya bersifat sosialis. Organisasi ini didirikan oleh Hendricus Yosephus Marie Sneevliet dan Adilf Baars yang kemudian berubah menjadi *Perserikatan Komunis* pada tahun 1914 sesudah berhasilnya revolusi Rusia. (PDK, 1995)

Sudah tentu sikap Samaun dan sahabat-sahabatnya sudah terpengaruh oleh orang-orang ISDV dan kondisi seperti ini sangat berbahaya bagi organisasi S.I yang berlandaskan Islam. Situasi ini sangat menarik perhatian di kalangan S.I. diantaranya adalah reaksi dari Salim. Setelah mengadakan penelitian dengan teliti dan serius, untuk mencari rahasia yang sebenarnya tentang motif dan misi yang dibawa organisasi tersebut, Salim melakukan penelitian yang dimuat di harian Neratja pada 1 Oktober 1917 yang berbunyi “ ... adalah suatu kaum yang harus kita jauhkan daripada pergerakan kita, suatu kaum yang hendak menerbitkan perceraian antara bangsa kita yaitu kaum yang hendak membagi bangsa kita atas kaum pekerja dengan kaum pemodal. Kaum itu ialah kaumnya yang membatalkan hak milik yang memakai nama “Socialist” yang dibangun dan dikembangkan dalam negeri ini oleh tuan Sneevliet, tuan Baars dll. ... Kaum sosialis itu membuta tuli saja hendak memindahkan sengketa dan perselisihan di rumah tangganya (Eropa) ke tanah air kita akan bersengketa atau berselisih dalam rumah tangga kita”.

H. Agus Salim tetap ikut S.I. haluan Tjokroaminoto, sedangkan Semaun ke PKI. Kedua pemimpin ini Tjokro dan Salim memperkuat dan memperhebat perjuangan S.I. bahkan juga H. Agus Salim ikut dalam gerakan serikat sekerja, pindah ke PPPB (Pandhuis Bond) bersama Surjopranoto. Dalam kongres nasional ke enam yang dipimpin oleh Salim dan Abdul Muis, kaum komunis dijauhkan dari golongan S.I oleh palang pintu “para disiplin”.

Pada tahun 1923 H. Agus Salim mulai kariernya dalam organisasi Islam, yaitu Pan Islamismenya dengan memimpin Al Islam Kongres Pertama. Sejak itu mulailah ia keluar sebagai pemimpin terbesar di Indonesia. Kemudian tahun 1923 itu juga Salim menjadi anggota Volksraad sampai tahun 1925. Kemudian dalam tahun ini juga ia kembali ke dunia wartawan dan memimpin harian “Hindia Baru” di Djakarta.

Sebagai pemimpin central S.I. ia bersama Tjokroaminoto merupakan tiang tengah yang kuat pada saat S.I. berubah bentuk menjadi PSI, Salim kelihatan bekerja keras dan berupaya dalam kongres Al Islam. Karir Salim terus menanjak, kehadirannya di S.I. semakin dibutuhkan. H. Agus Salim terpilih sebagai pengurus besar CSI dan sekaligus tercatat sebagai pemimpin muda dalam SI. Dari sini pemikiran politiknya sangat diperhitungkan oleh lawan dan kawannya. Itulah sebabnya pada kemudian hari ia memberi warna SI. Hal ini terlihat dalam ucapannya “untuk menyebarluaskan cita-cita perjuangan SI kita memerlukan alat, yaitu surat kabar, agar rakyat mengetahui tujuan dan cita-cita serikat Islam”.

Sudah tentu ucapan H. Agus Salim seperti ini punya arti politis yang sangat penting secara bersama di bawah bendera SI, melawan penjajah Belanda, yang lebih penting lagi bagi Salim adalah mencetuskan ide-ide Al Islami dalam menembus baik di kalangan masyarakat intelektual maupun masyarakat awam. Secara keseluruhan di Indonesia, sehingga usaha terciptanya masyarakat Islam Indonesia yang berdaulat dan merdeka secara perlahan-lahan terwujud. Dalam mewujudkan ide-ide tersebut H. Agus Salim bersama Abdul Muis sering

menulis artikel di surat kabar Harian Neratja, dan sekaligus juga H. Agus Salim menjadi pemimpin redaksinya.

H. Agus Salim mengingatkan kepada anggota organisasi SI bahwa ada bahaya di tubuh SI dengan tumbuhnya paham baru dan tentunya akan menggerogoti perjuangan SI selanjutnya dan khususnya akan mempengaruhi gerak lajunya Islam di Indonesia yang sedang bangkit melalui gerakan politik. Bahkan juga akan memperlemah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghalau pemerintahan kolonial Belanda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Paham komunis makin menampakkan diri. Hal ini ditangkap oleh H. Agus Salim sebagai suatu untuk membelok organisasi SI dari yang Islami ke komunis, terutama dalam mempengaruhi anggota-anggotanya. Konflik ideologi muncul ke permukaan sehingga organisasi SI terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpihak kepada sosialis Max (komunis) dikenal dengan SI merah dan kelompok kedua sudah tentu Islam sebagai prinsip dasar yang dipelopori oleh H. Agus Salim dan Abdul Muis. Menurut kedua tokoh ini persoalan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan perjuangan partai yang berlandaskan Islam, maka mereka berdua sangat gigih memperjuangkan agar paham tersebut tidak berkembang dalam tubuh organisasi SI oleh karena itu mereka membentuk atau membuat disiplin partai bagi anggota yang terlibat dalam paham komunis.

Pemikiran H. Agus Salim Tentang Negara.

Perkembangan pemikiran H. Agus Salim sangat berkaitan dengan politik kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia dan agama Islam pada masa itu. Sikap kolonial Belanda yang sangat meremehkan bangsa Indonesia sangat dirasakan sejak beliau bersekolah, meskipun Salim mempunyai otak brilian dia diberi kesempatan untuk lebih maju yang paling menyakitkan lagi khusus untuk pribumi Indonesia disebut irlander. Tingkah laku politik kolonial Belanda terhadap bangsanya inilah yang menyebabkan H. Agus Salim bercita-cita untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari cengkraman kolonial Belanda.

Sebelum menguraikan pemikiran Haji Agus Salim mengenai negara, maka ada baiknya lebih dahulu menguraikan politik dan negara dalam agama Islam. Apakah Islam mewajibkan pendirian negara, untuk dapat menjawab persoalan ini dengan benar, lebih dahulu harus memahami cita-cita khusus Islam dan asal kitab sucinya, kemudian kita akan jelaskan apakah yang disebut negara, kemudian menjadi jelas kepada kita, tidak ada kebimbangan, bahwa masyarakat Muslim pertama semasa hayat Rasulullah SAW di Medinah telah dapat dikatakan hampir memiliki negara sejalan dengan undang-undang formal. Islam tidak hanya membawa aqidah keamanan yang benar semata atau ketentuan akhlak utama yang menjadi dasar masyarakat semata-mata membawa serta syariat yang jelas lagi adil. Syariat inilah yang mengatur manusia, prilakunya dan hubungannya dengan negara Islam dengan negara-negara lain. Semua yang berbagai macam ini dan prinsip-prinsip umum menjadi landasannya. Sekalipun kadang bersifat garis besar telah meletakkan syariat-syariat yang digunakan untuk mengatur persoalan tersebut.

Menurut Haji Agus Salim Nabi Muhammad SAW, yang diutus oleh Tuhan mengembangkan Islam diatas dunia ini sudah saat itu 12 abad lebih dahulu dari Marx mengajarkan sosialisme. Persatuan sosialisme baru didapat diabad ke 19, Sosialisme Marx anti Tuhan, tetapi tujuannya yang hendak dicapai masyarakat berdasarkan sama rasa dan rata yang bebas dari kemiskinan, sudah lebih dahulu dibentangkan oleh Islam, agama Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat manusia. Sayangnya ulama-ulama hanya mengutamakan segi ibadatnya dan fikih dan melupakan segi kemasyarakatan itu daripada Islam. Mengerjakan segi kemasyarakatan itu juga perintah Allah dalam al-Qur'an. Dari ulama-ulama kita pada umumnya didikan langgar yang pengetahuannya berat sebelah tidak dapat diharapkan, bahwa mereka akan sanggup menelaah segi kemasyarakatan itu dalam Islam. Inilah kewajiban bagi kaum intelektual yang mempelajari ilmu-ilmu sosial Tjokroaminoto sudah mulai memperingatkan kepada umat Indonesia akan membantu sekuat-kuat tenaga.

Jika dipahami dengan cermat betapa dalamnya wawasan yang dikandung di dalam benak Haji Agus Salim, ia telah berhasil mengadakan suatu pengamatan secara kritis dan mendalam terhadap keadaan umat juga terhadap bangsa waktu itu. Bidikannyapun berdimensi masa itu dan masa depan. Rasa tanggung jawabnya sebagai pemikir dan pejuang atas nasib jutaan umatnya. Antara lain ia lahirkan melalui suatu himbauan dan ajakan kepada cerdik pandai kemudian untuk menjabarkan ajaranan Islam secara ilmiah. Sehingga kemajuan pertumbuhan umat dapat sejalan dengan gerak kemajuan kelompok masyarakat tertentu lainnya dapat mengimbangi gerak kemajuan kelompok tertentu lainnya.

Faham sosialisme diperoleh Haji Agus Salim pertama kali diperoleh dari gurunya yang mengajarkan ekonomi di GBS Salemba, guru itu adalah seorang sosial demokrat akan tetapi untuk lebih dalam Haji Agus Salim belajar lagi di Jeddah pada tahun 1906, dan dari situ ia lebih yakin bahwa sosialisme yang dia pelajari selama ini akan diperkaya dengan apa yang dipelajari di Jeddah. Menurut Salim Islam sosialisme yang diperintahkan Allah. Sedangkan ajaran Marx untuk mencapai sosialisme lain coraknya, sudah tentu ajaran itu menyesatkan orang Islam.

Lebih lanjut untuk mengetahui pemikiran Haji Agus Salim mengenai masalah-masalah kenegaraan maka ada baiknya ditelusuri dialog Syafii Maarif dengan Muhammad Roem ketika ia mengalami kesulitan mengumpulkan bahan untuk disertasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Haji Agus Salim adalah pejuang Muslim dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan sudah sama-sama dimaklumi. Juga bahwa haji Agus Salim adalah diantara tokoh yang turut menyiapkan UUD 1945, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan lain-lain sudah sama diketahui. Tetapi bagaimana sebenarnya posisi Haji Agus Salim bila ditanya tentang persoalan Islam dan Negara atau masalah hubungan agama dan negara. Syafii Ma'arif seorang penulis disertasi tentang Negara Islam pada saat itu masih kesulitan untuk menjawabnya pemikiran haji Agus Salim tersebut, Menurut beliau karena literatur untuk menjawab itu belum cukup dan masih terbatas untuk menelusuri

pemikiran Haji Agus Salim tentang dasar negara yang disampaikan dalam sidang-sidang Panitia Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan pada bulan-bulan menjelang Proklamasi kemerdekaan. Pada bulan-bulan menjelang proklamasi dapat ditelusuri. Kesulitan mencari dokumen ini Syafii mengirim surat kepada Muhammad Roem, dalam surat kepada Muhammad Roem beliau mengajukan tiga pertanyaan tentang sikap Haji Agus Salim :

1. Haji Agus Salim dengan ketajaman intelektualnya telah mampu melihat bahwa penciptaan suatu negara Islam di tengah-tengah rakyat yang lebih 90% masih buta huruf tidak bakal berjalan dengan baik. Fondasi yang kukuh (religio Intelektual) mutlak diperlukan untuk bangunan sebuah negara Islam moderen. Saya tidak kutip terus dibawah angka 2 dan 3 akan tetapi pada garis besarnya , menurut pengertian saya begitulah pengertian Haji Agus Salim karena itu, maka asumsi saudara itu kira-kira sudah betul. Dalam pada itu saya tidak dapat mengecek sebab Haji Agus Salim juga tidak pernah menuliskan pandangannya dengan tegas." (Salim, 241). Menurut Muhammad Roem pertanyaan Syafii Ma'arif apa sebab Haji Agus Salim banyak diam dalam BPUPKI, yang sedang membicarakan tentang dasar negara, dasar Islam atau Pancasila, maka saya ingat membaca dalam notulen salah satu sidang; "seperti kita ketahui, Haji Agus Salim adalah salah seorang dari Panitia 9, yang membuat preambulo dari UUD 1945 yang kemudian diberi nama Jakarta Charter, tentang tentang sidang-sidang itu tidak ada notulen, akan tetapi waktu Ketua Panitia Ir. Sukarno menyampaikan dan membela hasil dari Panitia 9 itu kepada sidang pleno, ia akhirnya bicara seperti berikut : Terimalah hasil ini, ini Nasionalis (lima orang, yaitu Ir Sukarno, Hatta, Moh Yamin, Maramis, Soepomo, (Salim 242) dan dari golongan Islam adalah Haji Agus Salim, Ki Bagus, Wahid Hasyim dan Kahar Muzakkir). Haji Agus salim memandang dirinya terikat oleh kompromis itu, yang Sukarno menjadi juru bicaranya. Akan tetapi dalam sidang itu pleno itu Wahid Hasyim menyusulkan Islam sebagai dasar negara. Waktu Wahid Hasyim memajukan usul tersebut, maka Haji Agus Salim masih mengemukakan, bahwa

anggota Panitia sembilan terikat oleh kompromi yang tercapai, dan menghasilkan Jakarta Charter. (Syafii Maarif, 1990)."

Menurut Syafii Ma'arif, memang agak sulit menelusuri pemikiran Haji Agus Salim mengenai hubungan agama dan negara, sekalipun kita dapat menduga bahwa beliau telah punya konsep tentang hal tersebut. Tetapi bagaimana konsep tersebut?, Syafii sendiri tidak dapat menjelaskan. Meskipun demikian untuk membantu terjawabnya persoalan ini ia menjelaskan hasil wawancaranya dengan Muhammad Natsir di Jakarta pada tanggal 13 November 1983. "Natsir pada dasarnya mengemukakan, "Pandangan Haji Agus Salim tentang Negara serupa dengan pendapat Masyumi merumuskan konsepnya tentang negara yang hendak ditegakkan. Haji Agus Salim bertanya, Apakah Seperti konsep Kartosuwiryo? Masyumi Menjawab. Tidak. Bagi Masyumi negara adalah alat untuk merealisasikan tujuan Islam". (Syafii Maarif. 1990).

Jika kita telusuri ketika Haji Agus Salim menguraikan dasar negara Pancasila pertama sekali yang ia pentingkan adalah tidaklah boleh menyalahi pokok dasar yang per-tama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa tegasnya tidak akan boleh menyimpang daripada hukum agama yang berdasarkan kepada wahyu daripada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan firman Tuhan surat Al Maidah. Maka barang siapa yang tidak membuat hukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitabNya agamanya yang berturut-turut yaitu Taurat, Injil dan al-Qur'an, maka mereka itu kafir.

Tak pelak lagi pemikiran yang dilontarkan Haji Agus Salim ditengah-tengah hiruk pikuknya gejala orang muda yang tengah kehausan mencari alternatif jalan hidupnya telah mendapat sambutan yang hangat dan atusias dari kalangan terpelajar itu sendiri. Tak kurang dari Muhammad Hatta, Bahder Johan, Amir Sardjan dan Mohammad Roem, Sjamsurizal, Kasman Singodimedjo, Muhammad Natsir dan masih banyak lagi yang lainnya yang merupakan nama yang selalu hadir dan mengadakan tatap muka dengan Haji Agus Salim. Mereka inilah yang banyak menyerap dan ditulari ide-ide Haji Agus

Salim. Oleh Karena itu sering disebut Sebagai "Salimis" (Ismail Qoyim 235).

Pola pemikiran yang ditanamkan oleh Haji Agus Salim selanjutnya berkembang ditengah masyarakat dan bertemu dengan pola pemikiran lain yang terlahir dari proses sosial yang sedang berlangsung. Pertemuan ini menjadi lebih bermakna setelah dihadapkan kepada kerangka falsafah perjuangan bangsa di dalam menghadapi kolonialisme Belanda. (Ibnu Qoyim, 1954)

Persinggungan antara pola Islam yang antara lain dipelopori oleh Haji Agus Salim itu dengan pola non Islam berikutnya melahirkan persaingan yang ketat dan terus menerus. Bahkan tidak hanya berlangsung dimasa kolonial, melainkan terus berjalan sampai zaman kemerdekaan Indonesia dan seterusnya.

Ciri yang menonjol dalam pemikiran haji Agus Salim dalam sepek terjang kehidupan adalah pemikiran yang integral atau kaffah atas gejala tingkah laku manusia , baik tingkah laku ekonomi, sosial politik, budaya maupun tingkah laku lainnya yang semua itu didasarkan kepada nilai pengabdian seorang hamba *atas khaliknya yaitu Allah*. Dengan demikian corak nondikotomis. Sepantasnyalah Dr. Syafii Ma'arif mengatakan bahwa Haji Agus Salim adalah Bapak intelektual Indonesia Muslim Indonesia. Ini barangkali saja telah melihat gerakan pemikiran yang dilancarkan Haji Agus Salim atas Dienul Islam, yang telah melahirkan corak pemikiran diatas. Tawarannya yang cukup dikenal adalah sosialisme Islam yang sekaligus berfungsi sebagai jawaban atas sistem kolonial yang menyimpan gerkan imperialisme, kapitalisme dan isme-isme lainnya. (Syafii Ma'arif 1995).

Peran serta Haji Agus Salim Dalam pergerakan Nasionalis. Kata Nation berasal dari bahasa latin "nation", yang berarti kelahiran atau bangsa, sesungguhnya mendefinisikan suatu suku bangsa atau tatanan sosial yang dibangun pada komunitas keturunan atau kesamaan bahasa yang nyata ataupun masyarakat imajiner. Sejak abad ke 17 istilah "nation" berubah makna menjadi penduduk dari suatu daerah politik yang berkuasa, tanpa memandang kesatuan bahasa ataupun suku bangsa.

Jika kata nation ditransformasikan menjadi nasionalisme, maka kata tersebut mempunyai arti yang bermacam-macam, tergantung pada tempat dan waktu (Carlton JH, 128). Kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan intelektual telah membuat suatu definisi baru dari nasionalisme, yakni sebuah gagasan suatu pergerakan yang pada kenyataannya berakar dari masa lalu.

Nasionalisme juga diartikan sebagai suatu persetujuan yang ditetapkan para anggota suatu kebangsaan atau sekelompok yang memiliki bahasa yang sama dan menampilkan kebiasaan yang sama di dalam sebuah negara. Pertimbangan yang kuat mengenai nasionalisme muncul pada abad ke 20, selain dipandang sebagai suatu proses sejarah, nasionalisme dianggap sebagai suatu persetujuan yang memberi warna khusus pada pemikiran dan mengkondisikan pergerakan-pergerakan dibidang politik, sosial kebudayaan baik dalam bidang politik dalam negeri maupun luar negeri. Dari sudut pandang ini, nasionalisme merupakan suatu persetujuan yang utama, suatu kesadaran yang dimiliki oleh suatu kelompok yang berbeda.

Nasionalisme dalam pemahaman modern telah muncul pada abad ke 20 an, kesadaran rakyat mengarah pada pembentukan satu komunitas, dalam satu kesatuan nasional. Aspek-aspek budaya, agama, bahasa dianggap sebagai kekuatan yang menentukan dalam membangun kesatuan negara.

Menurut sejarah, pendudukan Belanda di Indonesia yang berlanjut dari awal abad ke 17 sampai tahun 1942 senantiasa menimbulkan semangat kepahlawanan dan patriotik pada orang-orang. Rasa nasionalisme pada jaman sejarah Indonesia muncul sebagai sebuah manifestasi patriotisme yang bersifat revolusioner terhadap kolonialisme dan imperialisme. Islam telah memimpin pergerakan melawan kekuasaan asing meskipun sebagian besar kegiatan-kegiatan tersebut berakhir dengan kegagalan. Sarekat Islam, yang merupakan pergerakan rakyat Indonesia pertama yang membangkitkan pusat kegiatan pergerakan nasionalis Indonesia. Sebagai gerakan politik yang

pertama, SI meninggalkan harta pusaka yang berlimpah di bumi Indonesia.

Salah satu sumbangsih lainnya adalah pembentukan negara Indonesia dan munculnya pemimpin pemimpin politik yang terlatih dari SI. Salah satu pemimpin tersebut adalah Haji Agus Salim.

Pada awal 1925 dalam harian Hindia Baroe , Haji Agus Salim menilai kedatangan Islam ke Nusantara ini adalah sebagai kekuatan pembebas yang positif dan konstruktif Islamlah menurut Haji Agus Salim yang mengajarkan prinsip persamaan, persatuan dikalangan rakyat, sekalipun benteng-benteng feodalisme yang sudah mengakar tidak dapat dirobohkannya secara tuntas. Kontribusi Islam itu dalam kalimat Haji Agus salim kita baca “persatuan dibawahnya”. Persamaan pendidikannya, derajat orang banyak diangkatnya tinggi. Dengan kata lain, Islam Indonesia ingin menciptakan suatu masyarakat yang demokratis, dimana harga diri dan martabat manusia tidak ditentukan oleh ikatan darah, suku dan koneksi, tapi semata-mata oleh capaian pribadi kita masing-masing sebagai makhluk yang merdeka.

Haji Agus Salim menyadari dirinya sebagai pemeluk agama Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, menyatakan bahwa *negara* (kekuasaan politik) dan umat diperlukan umat atau bangsa sebagai instrumen untuk menjamin dan melaksanakan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kolektif. Teori hubungan Islam dan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Haji Agus Salim *Jejak Langkah Haji Agus Salim*, Tinta, Mas – Jakarta 1954.
- Hamka, *Ayahku, Riwayat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum agama di Sumatra*, Jaya Murni Jakarta 1967.
- Haryono Anwar, *Indonesia Kita Pemikiran Bernegara, Iman dan Islam*, 1987.
- Hatta, Mohammad *Memoar Mohammad Hatta*, Tinta Mas, 1979.
- Kholid Ibrahim Juanda, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, Bineka Cipta 1987.
- Kuntowidjojo, *Gerakan Islam dalam Sejarah*, Tintamas, 1981.
- Maarif, Syafii Muhammad, *Islam dan Politik Teori Belah Bambu*, Gema Insani Press 1996
- Muhajat, *Haji Agus dan Kehidupannya*, PDK 1982.
- Mardanus, *Haji Agus Salim dan Perjuangannya*, PT. Mutiara 1990.
- Noer, Deliar *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 – 1942*. LP3ES, 1973.
- Roem, Mohammad *Bunga Rampai dari Sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972.
- Seratus Tahun Haji Agus Salim* 1984, Pustaka Daerah.
- Tholib, M. *Politik dan Negara dalam Islam*, Balai Pustaka, 1978.
- Untung S, *Mengikuti Jejak Agus Salim*, PT. Roda Yogyakarta, 1992.

PEMIKIRAN K.H. MAS MANSUR KEMAJUAN BANGSA DAN NASIONALISME

Muhamad Hisyam

1. Pendahuluan

Bersamaan dengan beralihnya abad 19 ke abad 20, sejarah Indonesia memasuki babak baru. Babak ini ditandai oleh kecenderungan baru dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme, yaitu bangkitnya nasionalisme. Dalam fase ini, Islam yang telah menjadi simbol perlawanan sejak kehadiran kolonialisme di Nusantara menampilkan diri sebagai katalisator persatuan nasional sekaligus membangun identitas ke-Indonesiaan, satu identitas untuk menegaskan perbedaan diri dari masyarakat penjajah Belanda yang menindas pribumi. Islam menjadi satu-satunya benang merah pemersatu wilayah Hindia Belanda, di luar kekuasaan kolonial, sebab secara kultur, tradisi maupun bahasa, wilayah ini terpecah-pecah oleh keanekaragaman yang tinggi.

Di awal zaman yang oleh Shiraisi (1990) disebut sebagai *An age in motion*, atau zaman bergerak ini, tidak mengherankan jika Islam tampil sebagai pioneer, karena agama inilah yang telah mengantongi modal sebagai agama universal yang dianut oleh sebagian besar penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara ini. Adalah gerakan rakyat Sarekat Islam (SI) yang mulai dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI) merupakan satu-satunya wadah politik kaum pribumi yang mencita-citakan dan menuntut pemerintahan sendiri dan kemerdekaan penuh.

Tetapi SI bukanlah satu-satunya wadah pergerakan Islam zaman itu. Selain SI yang bergerak di arena politik, ada pula Muhammadiyah, Perserikatan Umat Islam, Persatuan Islam dan kelak Nahdlatul Ulama yang bergerak di lapangan kultural. Zaman bergerak ini telah mewariskan sejumlah nama pemimpin Islam (dan pemimpin lainnya) yang dalam sejarah Indonesia ditulis dengan "tinta emas", bukan saja karena perjuangannya tetapi juga pikiran-pikirannya yang cemerlang dan mendobrak kebekuan zaman. Pemimpin Islam yang muncul di zaman ini,

hampir semuanya terlibat dalam pergerakan-pergerakan itu. Banyak di antaranya, selain melibatkan diri dalam SI yang politik, juga bertekun diri dalam pergerakan yang menempuh pendekatan kultural. Satu dari sekian pemimpin Islam yang terjun dalam dua bidang gerak ini adalah K.H. Mas Mansur, atau kadang-kadang disebut juga Kiyai Mas Haji Mansur.

K.H. Mas Mansur adalah salah seorang pemimpin puncak Muhammadiyah setelah K.H. Ahmad Dahlan yang mempunyai nama besar. Seperti halnya Kiyai Dahlan, Mansur adalah tokoh yang datang dari latar belakang pendidikan tradisional agama baik di tanah air maupun di Timur Tengah yang memelopori gerakan *tajdid* atau pembaharuan pemahaman agama. Kedua tokoh ini dikenal memiliki cakrawala pemikiran agama yang luas, dan berhasrat kuat untuk mengubah cara berpikir dan beragama umat yang dinilainya telah terlampaui banyak tercampur dengan tradisi yang tidak bersumber dari Islam. Yang berbeda dari dua tokoh puncak Muhammadiyah ini, bahwa Kiyai Dahlan tidak mewariskan karya tulis, sedang Mansur, meskipun sedikit mempunyai warisan dalam bentuk ini. Inilah sebabnya nama Mas Mansur dipilih sebagai salah satu tokoh Islam yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini.

Berbicara tentang konsep Mas Mansur dalam konteks teoretis tentang hubungan agama dan negara yang menjadi topik penelitian ini, kiranya memerlukan ketelitian yang dan kejelian yang lebih. Warisan tulisan yang ia tinggalkan tak banyak yang secara langsung membicarakan politik. Kenyataan ini menuntut penafsiran tersendiri, bukan saja terhadap teks tertulis, tetapi juga terhadap "teks" perjalanan hidupnya.

Kegiatan menulis Mas Mansur sebenarnya telah mulai sejak beberapa tahun setelah ia kembali dari luar negeri. Dalam satu artikel surat kabar *Berita* no. 49, th I 25 Juni 1949 yang menceritakan sejarah hidup singkat Kiyai Mas Mansur dikatakan bahwa selain ia mendirikan Islam Studi Klub yang diberi nama *Taswirul Afkar*, di mana para kiyai di Surabaya mengadakan diskusi agama secara periodik, ia juga menerbitkan majalah bahasa Jawa tulisan Arab (pegon) yang terbit tengah bulanan bernama *Djinem*. Melalui majalah ini Mansur menuangkan pikiran-

pikirannya, dan menganjurkan para kiyai dan pemuda santri untuk memanfaatkan pers dalam mendiskusikan agama. Selain *Djinem*, Mansur juga menerbitkan *Suara Santri*, sebuah majalah bulanan yang juga berbahasa Jawa dan berhuruf Arab. Sayang sekali penelitian ini tidak berhasil menemukan kopy majalah-majalah dimaksud.

Tulisan-tulisan Mas Mansur yang berhasil ditemukan dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari tahun tiga puluhan dan empat puluhan. Setelah sejumlah karya tulis berhasil difoto kopy, akhirnya ditemukan kumpulan karangan Kiyai Mas Mansur yang disunting oleh H. Amir Hamzah Wiryosukarto.¹ Edisi ke dua kumpulan karangan ini terbit lebih lengkap dari pada edisi pertama yang terbit di tahun 1968. Dalam edisi pertama dimuat hanya 40 karangan, dan dalam edisi kedua bertambah menjadi 51 karangan. Dalam penelitian ini, buku kumpulan karangan Mas Mansur ini menjadi teks utama. Kegagalan menemukan kopy majalah *Jinem* dan *Suara Santri* menjadi salah satu kekurangan penelitian ini.

Sebagian besar tulisan-tulisan Mas Mansur yang tersebar di berbagai media, adalah mengenai agama, baik filsafat, tauhid, akhlak maupun tarikh. Hanya lebih kurang 30 persen saja yang berhubungan dengan pergerakan, masyarakat dan politik. Ini pun dikemas dengan

¹ Lihat Drs. H. Amir Hamzah Wiryosukarto (penyunting), *Kiyai Haji Mas Mansur, Kumpulan Karangan Tersiar*, Penerbit PT Persatuan, Yogyakarta, cetakan ketiga, 1992. Karya Mansur lain dalam bentuk buku adalah *Risalah Tauhid dan Sjirik* diambil dari kursus Muhammadiyah cabang Surabaya, dan diterbitkan tanpa tahun. Buku lainnya *Risalah Jang Pertama Tentang Ilmoe Tjara Beroending*, dalam bahasa Arab, diterbitkan oleh Hoofdcomite Congres Moehammadijah Djokjakarta tanpa tahun. Satu lagi buku yang disusun Mas Mansur setelah ia menjadi ketua PP Muhammadiyah, adalah *Masalah Jang Lima*, diterbitkan oleh Hoofd Bestuur Moehammadijah, Djokjakarta, tanpa tahun. Buku ini merupakan kompilasi jawaban cabang-cabang Muhammadiyah atas sejumlah pertanyaan PP kepada cabang-cabangnya dalam rangka memenuhi kebijaksanaan Mansur yang terkenal, yaitu Dua Belas Langkah Muhammadiyah. Tentang yang disebut terakhir juga dibukukan dalam risalah tersendiri, dan cetak ulangnya diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah tahun 1990.

bahasa agama sangat kental. Dari karya-karya Mas Mansur dan riwayat perjalanan hidup kiyai inilah analisis dalam penelitian ini didasarkan. Sejumlah karangan mengenai Mas Mansur menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini.

2. Sejarah Hidup Mas Mansur

Gerak juang Kiyai Mas Mansur dapat dibagi ke dalam tiga bidang gerakan. Pertama, memperbaiki pendidikan dan pengajaran agama. Ini berlangsung selama tahun-tahun pertama hingga sepuluh tahun berikutnya setelah ia kembali dari belajar di Timur Tengah. Kedua, bidang perubahan sosial, yaitu ketika Mas Mansur giat menggerakkan perubahan itu, baik yang bersangkutan dengan adat istiadat maupun cara beragama umat Islam. Fase ini ditampilkan dalam aktivitas Mansur dalam perserikatan Muhammadiyah sejak di Surabaya hingga di Yogyakarta, ketika ia memimpin PP Muhammadiyah. Ketiga, bidang pergerakan politik. Ia mulai dengan bergabung dengan SI, lalu mendirikan Majelis Islam Far'u al Hindi al Syarqiy (MAIHS), Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), Partai Islam Indonesia (PII), Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan akhirnya Pusat Tenaga Rakyat (Putera).

Kehidupan Mas Mansur yang padat dengan amal perjuangan memajukan bangsanya dan mencapai Indonesia merdeka itulah yang mendorong pemerintah Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Presiden RI, No. 162, tanggal 26 Juni 1964 menganugerahkan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional Republik Indonesia. Sebelumnya, di tahun 1960, bersama dengan hari ulang tahun RI ke 30, Mansur memperoleh Bintang Mahaputra Tingkat II. Ia adalah satu dari sekian pemimpin Islam yang sepanjang hidupnya diabdikan untuk kepentingan agama dan bangsanya. Ia diakui sebagai seorang pembaharu Islam yang berpandangan luas dan konsisten. Ia gandrung persatuan, baik antara intern umat Islam, maupun untuk seluruh komponen bangsa. Sayangnya, hasil perjuangannya tak sempat ia nikmati. Ia menghembuskan nafas dalam usia yang masih relatif muda, di saat bangsa masih sangat membutuhkan petunjuk dan semangatnya guna melawan kembalinya penjajah setelah

kemerdekaan diproklamasikan.

Mansur dilahirkan di Sawahan, Surabaya pada hari Kamis 25 Juni 1896. Kampung tempat kelahirannya kini telah berganti nama menjadi Kampung Baru Nurul Anwar. Ayahnya, Kiyai Ahmad Marzuki adalah seorang ulama besar, pemimpin pondok pesantren yang mashur di Jawa Timur dan Madura pada zaman itu.

Surabaya, tempat Mansur dilahirkan dan dibesarkan adalah kota besar yang ketika itu telah memiliki sejumlah sekolah modern yang didirikan pemerintah Kolonial Belanda, dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas, bahkan pendidikan kedokteran NIAS dan juga pendidikan pamong praja MOSVIA. Bukan mustahil jika ayah Mansur telah mengenal pendidikan yang disebut sekolah itu, tetapi ia tidak mengirimkan Mansur kecil yang telah menampakkan kecerdasannya ke sekolah formal Belanda. Mungkin saja ia merasa bahwa sekolah adalah tempat pendidikan kaum priyayi, di mana ia sadar dirinya tidak termasuk dalam golongan ini. Mungkin pula perasaan anti kolonial, sebagaimana hampir semua kiyai bersikap demikian, menyebabkan Kiyai Ahmad lebih suka mendidik anaknya, Mansur, dengan cara tradisional, yakni pendidikan agama. Lalu didiknya Mansur dalam lingkungan keluarga dan pesantrennya. Tetapi ketika usia Mansur mencapai 12 tahun, ayahnya berpikir agar anaknya yang cerdas itu memperoleh pendidikan yang lebih baik dan tertib. Sebagai orang tua yang kaya, ayahnya mengirim Mansur ke Makkah. Banyak orang Islam kaya ketika itu mengirimkan anaknya ke Makkah sebagai alternatif terhadap sekolah Belanda.

Tahun 1908, Mansur berangkat ke Makkah. Ia belajar di sana bersama banyak pemuda asal Jawa dan Asia Tenggara lainnya. Di Makkah kala itu belum dikenal madrasah. Yang ada adalah *halaqah*, yakni pengajaran oleh orang alim dengan cara membaca dan mendiskusikan kitab-kitab agama pada waktu-waktu tertentu di pojok-pojok yang sepi (tidak dipakai untuk salat) di Masjid al-Haram. Mansur belajar di Masjid tempat kiblat umat Islam berada itu. Ia berguru pada ulama-ulama Arab, antara lain Syekh Muhammad Khayyath, maupun ulama Jawah, yaitu mereka yang datang dan berasal dari Asia Tenggara, seperti Syekh Ahmad

Khatib. Di Makkah inilah ia berkenalan dengan banyak pemuda Jawah yang kelak menjadi pemimpin ummat di negerinya, seperti K.H. Abdul Halim --kelak, pemimpin Perserikatan Ulama di Majalengka-- dan juga Abdul Wahab Hasbullah yang kelak menjadi sahabat seperjuangan di Surabaya dan pendiri Nahdlatul Ulama. (Noer, 1982:80).

Setelah 4 tahun belajar di masjid al-Haram Mansur merasa ada sesuatu yang kurang. Nama Kairo ketika itu tengah berada di puncak citra pendidikan agama yang reformis. Reformasi agama yang dipancarkan dari kota ini mulai menembus negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia. Lalu berangkatlah Mansur ke Kairo. Ia belajar di Universitas Al-Azhar di kota itu. Di Azhar, bukan saja ilmu Mansur yang bertambah, tetapi juga wawasan intelektual dan pergaulan internasionalnya. Ketika di Kairo, Mansur yang haus pengalaman mengunjungi sejumlah negeri Islam di Afrika Utara. Satu di antara yang paling mengesankan Mansur adalah kunjungannya ke pusat pendidikan Islam sangat terkenal, Shanggiti, di sebuah desa di tengah sahara di selatan Tripoli.² Ia terkesan, bukan saja karena perjalanan untuk mencapai desa ini harus ditempuh dengan susah payah, tetapi juga oleh sistem pendidikan Shanggiti yang unik.

Ketika perang dunia pertama pecah di tahun 1914, Mansur baru dua tahun belajar di Kairo. Meskipun Mesir tidak dilanda perang, tetapi karena Inggris yang berkuasa di negeri ini terlibat dalam perang dunia pertama, mengakibatkan Mesir ikut menanggung imbasnya. Distribusi barang-barang, termasuk makanan mengalami gangguan. Mendengar berita itu, ayah Mansur di Surabaya ikut khawatir dengan keselamatan anaknya. Disuruhnya Mansur pulang ke tanah air. Mansur pun segera berangkat dari Kairo, tetapi bukan ke tanah air, melainkan kembali ke Makkah. Di kota suci ini Mansur sempat belajar lagi hingga satu tahun lamanya. Di tahun 1915, Mansur baru tiba di Tanah air.

²Kisah dan kesan-kesannya tentang Shanggiti ia tuliskan dalam *Almanak Muhammadiyah*, thn. 1348 H. Lihat Drs. Amir Hamzah Wiryosukarto (ed.), *K.H. Mas Mansur, Kumpulan Karangan*, Yogyakarta, Persatuan, Cet ke III (1992) h. 198-201.

Tahun 1915, ketika Mansur tiba di Surabaya, Sarekat Islam (SI) yang telah berdiri beberapa tahun sebelumnya tengah gencar-gencarnya menggerakkan ummat Islam. Selain SI juga ada Budi Utomo yang lebih dahulu bangkit. Usia Mansur baru 19 tahun, tetapi kepekaan terhadap situasi sosialnya mendahului banyak teman sebayanya. Mansur tak perlu berpikir lama untuk menentukan pilihan. Ia merasa SI adalah wadah yang pas untuk dirinya. Ia menerjunkan diri dalam SI dan bahkan sempat menjadi salah seorang pengurus Central Sarekat Islam (CSI) sebuah organisasi yang menjadi alat penghubung antara SI-SI lokal, dan berkedudukan di Surabaya.³

Keprihatinannya terhadap kebodohan ummat menyebabkan ia terpanggil untuk mendirikan sejumlah madrasah bersama ulama lainnya di Surabaya, seperti Kiyai Dahlan dan Kiyai Abdul Wahab Hasbullah. Metode pendidikan yang dicontohnya adalah madrasah yang ia lihat dan ia alami ketika di Kairo. Madrasah yang didirikan bersama Kiyai Wahab Hasbullah adalah Nahdlatul Wathon yang kelak mempunyai cabang di beberapa tempat. Ia keluar dari Nahdlatul Wathon karena tidak setuju terhadap cara-cara yang berlaku di madrasah itu. Ia lalu mendirikan madrasah Hizbul Wathon. Bersama Kiyai Wahab pula ia mendirikan Islam studi klub *Taswirul Afkar* (mengukir pikiran). Dihubunginya kiyai-kiyai di Surabaya untuk bergabung dengan perkumpulan ini, berdiskusi dan mengadakan tabligh secara terorganisasi. *Taswirul Afkar* kelak berkembang pula menjadi madrasah yang disegani di Surabaya.

³Sarekat Islam (SI) berdiri tahun 1911 di Solo dan secara resmi diakui oleh pemerintah tahun 1912. Pemerintah kolonial takut kalau penyebaran SI ke berbagai wilayah menjadi sebuah gerakan nasional yang mempersatukan kekuatan Islam di seluruh Hindia Belanda. Pemerintah hanya mengizinkan SI lokal saja yang boleh berdiri. Dengan demikian, antara SI lokal satu dengan SI lokal lainnya secara organisatoris tidak saling berhubungan. Di tahun 1914 didirikan Central Sarekat Islam (CSI) dan diakui oleh Belanda tahun 1916, menjadi sebuah organisasi SI yang berfungsi penghubung antara satu SI lokal dengan SI lokal lainnya. Oleh CSI inilah diadakan Kongres Nasional CSI pertama di Bandung pada tahun 1916, yang melibatkan semua SI lokal di seluruh wilayah Hindia Belanda. Inilah kongres pertama diselenggarakan oleh pribumi dengan memakai istilah "Nasional".

Mansur merasa tertarik dengan perserikatan Muhammadiyah setelah berkenalan dan berkali-kali berdiskusi dengan K.H. Ahmad Dahlan, baik di Surabaya maupun di Yogyakarta. Yogyakarta memang salah satu tempat yang ingin ia kunjungi ketika pulang dari Timur Tengah di tahun 1915. Karena itu, dari Batavia Mansur tidak langsung menuju ke Surabaya. Ia mampir dulu ke Yogya, dan ketika itulah ia berkenalan dengan Kiyai Ahmad Dahlan. Pertemuan pertama itu telah menjalin persaudaraan yang karib, karena ternyata Dahlan telah cukup kenal dan sering bertemu dengan ayah Mansur, Kiyai Ahmad. Setelah dua tokoh ini saling berkenalan, saling kunjung mengunjungi menjadi agenda pokok manakala salah seorang di antaranya mempunyai kesempatan mendatangi kota Surabaya atau Yogyakarta. Perkenalan Mansur dengan Ahmad Dahlan diakui merupakan anugerah besar, baik bagi Mansur maupun Dahlan. Mansur merasa beruntung dapat bertemu dengan Dahlan, karena dari perkenalannya itu Mansur memperoleh ilmu yang amat berharga, yakni bagaimana menafsir dan memahami Al-Qur'an dengan melihat fakta empiris yang ada di "depan mata". Dahlan juga merasa beruntung berkenalan dengan Mansur, karena di tangan pemuda yang energik ini Dahlan menaruh harapan Muhammadiyah bakal memperoleh kemajuan, kelak di Surabaya.

Ketika Mansur berkenalan dengan Kiyai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah telah tiga tahun berdiri, tetapi Mansur, meskipun tertarik pada Dahlan dan perserikatan yang didirikannya itu, tidak seraya memasuki perserikatan ini dan mendirikan cabangnya di Surabaya. Pada masa itu, Muhammadiyah memang baru diizinkan pemerintah kolonial untuk bergerak di kota tempat lahirnya saja, Yogyakarta. Di tempat-tempat lain, kelompok Islam yang merasa tertarik pada Muhammadiyah dipersilahkan mendirikan perkumpulan dengan nama lain, agar tidak melanggar ketentuan pemerintah. Demikianlah, maka di Solo, misalnya ada perkumpulan Jamaah Sidik Amanat Tabligh Vathonah (SATV), di Pekalongan berdiri Nurul Islam, dan lain-lain. Tahun 1920-an adalah permulaan Muhammadiyah boleh berdiri di luar Yogyakarta. Pada tahun pertama setelah pemerintah kolonial memperbolehkan Muhammadiyah berdiri di luar Yogyakarta, Mas Mansur menyatakan diri menjadi anggota

Muhammadiyah, dan bersama Kiyai Pakih Hasyim, seorang ulama asal Minangkabau mendirikan perserikatan ini di Surabaya, tepatnya tanggal 1 November 1921. (Noer, 1982:247). Muhammadiyah berdiri di Surabaya dengan dukungan utama dari kaum muda yang sebagiannya adalah para pengikut Kiyai Pakih Hasyim. Kaum tua melakukan oposisi, tetapi tidak seberapa berpengaruh terhadap kemajuan Muhammadiyah. Didirikannya sekolah-sekolah menurut cara Belanda, panti asuhan yatim piatu dan tidak lupa, balai kesehatan.

Dalam perserikatan ini karir Mansur terus menanjak. Mula-mula ia mengetuai cabang Surabaya, lalu menjadi konsul untuk Jawa Timur. Sampai tahun 1927 Mansur aktif dalam dua organisasi pergerakan SI dan Muhammadiyah. Dalam tahun ini ia keluar dari Partai SI, setelah partai ini menerapkan disiplin partai. Puncak karier Mansur di Muhammadiyah dicapai pada tahun 1937, ketika ia terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Kongres ke 26 di Yogyakarta.⁴

Ketika terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah, nama Mansur memang telah "menasional". Betapa tidak, di tahun 1926, ketika usianya baru 30 tahun, Mansur telah dipilih menjadi ketua Mu'tamar 'Alam Islami Far'u al Hindi al-Syarqi (MAIHS) sebuah "federasi" organisasi-organisasi Islam yang ada pada masa itu. Sekjen Muktamar ini adalah H. Agus Salim. Pada tahun yang sama Mansur juga terpilih menjadi ketua Hadji Organisatie Hindia (HOH). Bersama HOS Cokroaminoto, pada tahun ini juga Mansur terpilih menjadi delegasi Indonesia untuk Mu'tamar 'Alam Islami di Makkah. Ia juga memrakarsai berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia dan menjadi salah seorang ketuanya. Tahun 1938 Mansur, ketika Mansur telah menjadi ketua PP Muhammadiyah, bersama Dr. Sukiman Wiryoanjoyo, Wiwoho dan Dr. Kartono mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) dan menjadi salah seorang ketuanya. Keterlibatan Mansur dalam politik ini menimbulkan kontroversi. Ada yang mendukungnya,

⁴ Mansur terpilih karena suara Muktamar menghendaki agar Muhammadiyah dipimpin oleh orang muda yang progresif. Ketika terpilih, usia Mansur 41 tahun. Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Matahari-Matahari Muhammadiyah, dari K.H.A Dahlan sampai K.H. Mas Mansur*, Yogyakarta, Persatuan, tanpa tahun, h. 39-42.

tetapi sebagian besar warga Muhammadiyah menyesalkan keterlibatan ketua PP dalam partai politik. Namun demikian, di kalangan kaum pergerakan yang mempertahankan prinsip non kooperasi, nama Mas Mansur tetap sangat harum. Ia dipuji banyak kalangan ketika dengan ikhlas menolak tawaran pemerintah Hindia Belanda untuk suatu jabatan sangat prestisius, yaitu Kepala *Hof voor Islamitische Zaken* di tahun 1941. Kantor ini merupakan instansi tertinggi dalam birokrasi kolonial yang menyangkut urusan agama Islam. Di alam merdeka, kantor itu sejenis dengan "Departemen Agama".

Setelah terpilih menjadi ketua Muhammadiyah, Mansur hijrah ke Yogyakarta. Dari kota ini ia mengendalikan persrikatan yang berorientasi *tajdid* (pembaharuan) ini melalui konsep "12 langkah Muhammadiyah" yang digagasnya hingga 1943. Pada tahun 1943 ini Jepang sudah setahun menduduki Indonesia. Pemerintah pendudukan tengah menggalang dukungan rakyat Indonesia dengan mendirikan "Pusat Tenaga Rakyat" (Putera). Dipilihnya pemimpin-pemimpin Indonesia dari berbagai kalangan untuk memimpin gerakan ini. Soekarno dan Mohammad Hatta mewakili pemimpin politik, Ki Hajar Dewantara mewakili dunia pendidikan dan Mas Mansur dipilih atas nama pemimpin puncak ummat Islam. Ke empat tokoh ini *committed* untuk bersatu dan selalu memelihara komunikasi agar tidak mudah dipecah belah oleh Jepang. Karena itu, keempat tokoh ini sering disebut sebagai empat sekawan atau empat serangkai. Untuk menunaikan tugas ini Mansur pun pindah ke Jakarta, dan Muhammadiyah diserahkan kepada Ki Bagus Hadikusumo. Setelah berjalan beberapa lama memimpin Putera, Mansur merasa tidak tahan. Ia sadar bahwa kerja sama dengan Jepang adalah bertentangan dengan hati nurani dan sebuah kesalahan. Jepang rupanya lebih kejam dari Belanda. Jepang bukan saja tidak menghargai agama, tetapi juga menindas dan jahat. Selama dua tahun, Mansur merasa terus menerus ditekan dan dipaksa. Ia lalu jatuh sakit serius. Semua buku yang memuat sejarah hidup tokoh ini menyebutkan bahwa sakitnya Mas Mansur disebabkan oleh penderitaan batin yang keras dan terus menerus oleh tekanan-tekanan Jepang selama bekerjasama dengannya. Dengan alasan sakit, di tahun 1945 Mansur keluar dari Putera. Kedudukannya dalam Putera kemudian

digantikan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ketika proklamasi dibacakan di Pegangsaan Timur, Mansur tengah terbaring di rumah sakit di Salemba. mengingat kondisi kesehatannya yang terus menurun, dan atas desakan isterinya, akhirnya Mansur memutuskan untuk kembali ke Surabaya.

Mas Mansur belum sehat, ketika Surabaya digempur oleh tentara Sekutu yang diboncengi NICA pada bulan November 1945. Dalam keadaan sakit ia berjalan, dan terus berjalan, keluar masuk kampung, menyemangati dan mendesak ummat untuk bergerak, berjihad melawan kedhaliman Belanda. Gerakan Mansur diketahui Belanda, dan ia pun ditangkap. Ia dipaksa untuk pidato di radio guna menyetop perlawanan orang Indonesia tetapi Mansur menolaknya keras. Bagi Belanda tak ada pilihan lain untuk Mansur kecuali menjebloskannya ke dalam penjara. Dalam status tahanan itulah tanggal 25 April 1946 K.H. Mas Mansur menghembuskan nafas terakhir tanpa seorang pun menunggunya.

3. Percikan Pemikiran Mas Mansur.

Dari sejarah hidup Mas Mansur di atas, tampaklah bahwa sebagai seorang ulama, hidup Mas Mansur lebih banyak dicurahkan untuk memajukan ummat dari pada berkontemplasi mengembangkan gagasan dengan metode yang khas dan sistematis guna mengaplikasikan Islam ke dalam kehidupan masyarakat yang merdeka, memiliki kemampuan mengatur diri sebagai bangsa. Zaman penjajahan telah menyita waktunya untuk lebih menangani tuntutan-tuntutan praktis masyarakat yang ada di depan matanya ketimbang berpikir dan merenung tentang ilmu yang jauh di seberang realita. Meskipun begitu, dari percikan pemikiran yang diwariskan dalam bentuk tulisan pendek tersebar di berbagai publikasi dapatlah dipetik beberapa gagasan kemasyarakatan, politik dan kebangsaan yang apabila diperhatikan mempunyai sifat sistematis. Keprihatinan Mas Mansur mulai dari kondisi ummat yang terbelakang bodoh. Terhadap situasi ini Mansur tidak pernah mencari sebab pada pihak lain. Keterbelakangan ummat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia disebabkan oleh kesalahan ummat Islam sendiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi kondisi ini perlu dan utama sekali melenyapkan kesalahan ummat dalam cara beragama. Memperbaiki cara beragama dan

menggalang persatuan adalah jalan satu-satunya menuju kemandirian sebuah bangsa yang dapat mengatur dirinya sendiri.

Sistematika berpikir seperti itu, agaknya tercermin dalam sepek terjeng dan perjuangannya sejak ia kembali dari belajar di luar negeri hingga akhir hayatnya. Sebagaimana telah disinggung di atas, mula-mula Mansur sibuk dengan mendirikan sejumlah madrasah. Sambil menjadi guru ia aktif dalam pergerakan SI dan kemudian Muhammadiyah. Sementara aktivitas itu berjalan, Mansur juga sibuk dalam gerakan mempersatukan umat dan bangsa (mendirikan MAIHS, MIAI, GAPI dan MRI). Terjun ke politik dan berkolaborasi dengan kekuasaan pada zaman Jepang. Di antara percikan pemikiran Mas Mansur yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan politik zamannya dapat digambarkan dalam tiga tataran. Pertama, membebaskan umat zaman itu dari belenggu kejumudan, kebodohan dan kemiskinan. Kedua, setelah umat terbebas dari belenggu kebodohan, mereka perlu dipersatukan guna mencapai kehidupan masyarakat yang bebas dan mandiri. Ketiga, membangkitkan kesadaran kebangsaan dengan cara menanamkan rasa cinta tanah air. Berikut ini ketiga bidang pemikiran Mas Mansur itu di uraikan satu persatu.

3.1. Ke Arah Kemajuan Ummat.

Keprihatinan utama Mas Mansur, sejak ia kembali dari belajar di luar negeri adalah kondisi umat Islam di negerinya yang bodoh, miskin dan terbelakang. "Kondisi ini harus diubah" pikirnya. Ia mendirikan madrasah dan mengajar, berpidato, berdiskusi di mana saja ia memperoleh kesempatan untuk melakukan itu. Ia melakukan ini karena yakin bahwa penyebab utama dari kondisi ini adalah cara berpikir dan beragama umat Islam telah terbelenggu oleh kejumudan. Kejumudan inilah yang harus ia perangi. Untuk ini, umat harus dibebaskan dari cara berpikir kuno yang menjadi sebab kejumudan itu. Ia menempatkan pentingnya berpikir mandiri bila umat mau maju.

Ketika Mansur memperoleh kesempatan berpidato di forum "nasional" yaitu di kongres akbar Muhammadiyah ke 20 di Yogyakarta, kelihatannya dengan sadar ia memilih topik pentingnya membebaskan

pikiran ummat dari ketergantungan dengan cara menguraikan sejarah tasyri' atau pelaksanaan syariat Islam dari awal hingga zaman mutakhir. Dalam pidato yang kemudian dimuat dalam *Almanak Muhammadiyah* tahun 1351 H (1932 M) ini Mansur menjelaskan kronologi perkembangan ummat Islam dari perintisan awal, mencapai kejayaan lalu jatuh dan terpuruk. (Wiryosukarto, h. 92-99). Secara singkat dapat disebutkan bahwa kejayaan Islam dicapai karena didukung oleh kebebasan berpikir, meskipun kebebasan ini menimbulkan pertikaian pada tingkat wacana. Kemunduran Islam dimulai ketika kebebasan berpikir telah hilang, seperti ungkapan paling khas dalam menyipati kondisi ini yaitu bahwa "pintu ijtihad telah tertutup". Dari fatwa yang menurut Mansur amat ganjil ini, ummat lalu terbelenggu oleh apa yang disebut taklid membuta. Keadaan seperti ini telah berjalan sejak abad 6 H sampai sekarang (abad 14 H.). Di zaman taklid membuta, orang beragama tidak pernah mempertanyakan soal dasar dan asal-usul hukum. Ulama menjadi panutan tanpa kritis. Kalau dulu, orang mencari makna Qur'an dan Hadits dengan mengingat pendapat ulama-ulama, lalu menimbang mana yang paling dapat diterima, maka pada zaman taklid ini, Qur'an dan Hadits ditinggalkan, melainkan pendapat ulama itulah yang dijadikan pedoman dalam beragama. Ummat mengikuti ulamanya tanpa merasa harus tahu dalil hujah Qur'an Haditsnya yang dipakai mendasarinya. Konsekuensi dari keadaan seperti ini, apa yang dikatakan oleh ulama selalu benar adanya, tidak peduli terhadap kemungkinan salah. Kondisi seperti ini tidak saja menyebabkan ummat mudah dibohongi, tetapi juga pikiran tidak berkembang dan bodoh. Kalau pikiran tidak dapat berkembang, maka ilmu menjadi statis, dan bahkan mundur.

Kehidupan akidah ummat di zaman itu juga memprihatinkan. Orang percaya pada tahayul, bid'ah, khurafat serta ilmu klenik. Mereka percaya bahwa hal-hal seperti itu datang dari agama, padahal justru bertentangan dengan agama. Banyak adat tradisi bertentangan dengan agama, tetapi orang mengira bahwa adat tradisi itu bagian dari agama. Ini disebabkan ketika Islam memperluaskan pengaruhnya ke negeri-negeri baru bertemulah dengan kepercayaan adat tradisi setempat. Kepercayaan lokal itu belum sempat terkikis dan dibersihkan, sehingga ummat awam

masih menjadikannya bagian dari beragamanya. Selama tahayul, bid'ah dan khurafat masih lekat dengan kehidupan ummat Islam, selama itu pula kemajuan bakal terhambat. Kesemuanya itu, menurut Mansur, harus dibersihkan dari peri kehidupan ummat Islam.

Dalam kesempatan lain, Mansur menganalisa sebab-sebab kemunduran ummat Islam, terutama di Indonesia, dikatakan didorong oleh empat sebab, yaitu iman yang tipis, tidak memiliki kecerdasan, para pemimpin hanya pandai bicara, dan syiar agama terlampau kurang. Empat penyakit ini, menurut Mansur, harus dilenyapkan. Kita dapat melenyapkan penyakit-penyakit itu kalau kita sendiri insaf dan sadar akan adanya penyakit-penyakit itu, dan berusaha menghilangkannya. (Wiryosukarto, h. 145/146). Bagi mereka yang akrab dengan literatur Islam reformis, pemikiran seperti ini tidaklah asing. Jelas bahwa dalam hal ini, Mansur terpengaruh kuat oleh pemikiran-pemikiran kaum reformis Mesir seperti Mohammad Abduh, Jamaluddin al-Afgani, Seyd Mohammad Rashid Ridla dan sebagainya.

Dalam tulisan lain, ketika Mansur mencoba menelusuri penyebab kemunduran ummat dengan pendekatan "psikologis" (*Almanak Muhammadiyah*, thn. 1954) tampak orisinalitas pemikirannya. Dalam tulisan ini Mansur mempertanyakan, mengapa ada ummat yang mulia (dahulu) dan mengapa ada ummat yang hina (sekarang), sedangkan Qur'an-nya satu yang dari dulu hingga kini tidak berubah? Jawaban atas pertanyaan ini, adalah:

"Setelah diselidiki benar-benar, kelihatan bahwa kita ummat yang kemudian ini telah tertinggal di dalam suatu pokok masalah yang penting sekali. Kita tertinggal lantaran tidak mempunyai iradah yang boleh disebut kemauan. Iradah menurut ilmu nafs adalah salah satu sifat yang bisa meningkatkan derajat dan tingkatan manusia. Bila kurang iradah, kurangleh harganya, bila kuat iradah kuatlah tegaknya. Bahkan harga ummat dan harga manusia itu tergantung pada mahal atau murahnya harga iradah yang ada dalam dadanya. kalau bukan karena kekurangan iradah, kekurangan apa lagi? Bukankah ummat yang dahulu itu manusia sebagai kita juga? Bukankah anggota tubuhnya tidak melebihi anggota tubuh yang

ada pada kita?" (Wiryosukarto, h. 104/105).

Memang, lemahnya iradah menjadi sebab utama loyonya ummat. Masalahnya sekarang, mengapa iradah ummat lemah? Menurut Mansur: "tumbangnya iradah dan hancurnya kemauan ummat itu lantaran beberapa keadaan masa sekarang ini yang telah menyerang kepada budi pekerti dan kesopanan ummat dari segala jurusan. Yang telah membungkus akan paham mereka yang suci; Seumpama beberapa tukang cat yang telah melukiskan beberapa macam warna pada sehelai papan, sehingga warnanya yang asli menjadi hilang." (Wiryosukarto, h. 105).

Apa sesungguhnya warna asli iradah ummat itu. Menurut Mansur, warna asli iradah ummat adalah jiwa yang suci, jiwa yang tunduk kepada keesaan Tuhan alias tauhid. Karena kesucian iradah terhalang oleh berbagai tirai maka muncullah rasa takut menantang bahaya dan gentar menghadapi kematian. Di bagian lain dikatakan bahwa warna-warna yang telah menutup keaslian iradah adalah rasa *ja'ah* (membanggakan diri), *thama'* (serakah akan harta) dan *ashabiyah* (fanatik golongan). (Wiryosukarto, h. 108)

Dari sebab itu, menurut Mansur, pekerjaan para pemimpin ummat sekarang amatlah berat. Tugas ini, menurut istilahnya, adalah mengupas atau mengikis segala pengaruh, bungkusan, racun atau bahaya yang telah membunuh iradah dan kemauan ummat. Mansur menganjurkan kepada semua yang mengikuti pikirannya ini, ulama dan zu'ama agar memperhatikan secara serius, "dari pendengaran dapat menjadi ilmu, mengalirlah ia kepada amalan. Jaman emas, jaman bahagia yang menjadi angan-angan tidak mungkin datang kecuali jika pandangan ini kemudian dijadikan agenda pekerjaan. (Wiryosukarto, h. 108).

Dalam kesempatan lain, (*Adil*, no. 33 th.VIII, 18 Mei 1940) sebab-sebab kemunduran ummat Islam, khususnya di Indonesia, dikatakan Mas Mansur sebagai akibat pendidikan yang terlampau menekankan pada aspek akhirat dan mengabaikan urusan dunia. Dikatakan bahwa pendidikan yang terlampau menekankan urusan akhirat menyebabkan timbulnya sifat *panarimo*, sehingga kehidupan dunia ummat Islam menjadi lemah. (Wiryosukarto, h. 150).

Jika dicermati, pandangan Mas Mansur itu, tampaklah bahwa ia mempunyai kecenderungan berpikir mendasar. Ia tidak melihat kemunduran ummat dan sebab-sebabnya dari segi-segi yang sifatnya realis dan praktis, melainkan mencoba menembus ke "dalam" ke ide-ide yang menjadi akar permasalahan yang dihadapi ummat. Ia telah memberikan sinyal-sinyal bagaimana perkembangan zaman itu telah merubah sejarah ummat Islam.

Karena itu wajarlah jika resep-resep Mansur untuk mengobati kemunduran ummat juga bersifat mendasar dan tidak ahistoris. Dengan mengutip pendapat ulama-ulama reformis yang ia ikuti pikirannya melalui bacaannya yang luas, Mansur memberikan empat prasarat bagi kebangkitan kembali ummat Islam. Kaum muslimin yang beraneka pikiran, pendirian, derajat dan tingkatan, kata Mansur, akan kembali hidup mulia dan jaya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa besar di dunia ini kalau sekiranya mereka menjalani empat hal pokok berikut:

1. Kembali kepada al-Qur'an. Selama ini, Qur'an dilemparkan ke belakang, sehingga ummat terpuruk ke lembah kehinaan. Jadikan al-Qur'an sebagai *grondwvet* kehidupan ummat Islam, dan tidak terpengaruh oleh banyak isme lain.
2. Mengerjakan ayat-ayat al-Qur'an. Al-Qur'an harus dipelajari lebih dalam, bukan saja untuk dibaca, tetapi lebih dari itu adalah diamalkan. Ketinggian ummat Islam terdahulu karena mereka suka mengerjakan apa yang tersebut dalam al-Qur'an.
3. Menguatkan kebendaan kita. Harta adalah alat yang penting yang tidak boleh dikebelakangkan untuk menuntut hak dan menggerakkan semangat ummat. Kehormatan agama, kehormatan bangsa dan kehormatan tanah air itu menghajatkan kepada harta benda. Kita membuat macam-macam program yang bagus, tetapi selalu kandas, karena tidak ada harta benda.
4. Rapatnya ulama dan kaum terpelajar. Ummat Islam agar insaf untuk bekerja sama, bergandengan tangan antara kaum santri dengan kaum

terpelajar untuk membela agama Tuhan. Dengan mereka itu, ummat Islam akan mengetahui bahwa agama Islam itu agama kerajaan dan kekuasaan, agama kemajuan dan agama kemakmuran, agama kekayaan dan kemuliaan, agama ilmu dan kekuatan. Dengan kaum terpelajar ini, ummat akan mengetahui bahwa apa yang ada di dalam bumi ini dititahkan oleh Allah untuk kita, kita ummat Islam. (Wiryosukarto, h. 160-161).

Mansur sebagai pemikir dapat berubah ketika ia menjadi seorang praktisi. Lihatlah, apa yang ia lakukan ketika ia menjadi Ketua PP Muhammadiyah. Jabatan itu menuntutnya agar ia tidak saja menjadi seorang ideolog yang menggagas ide-ide belaka, melainkan seorang praktisi. Dalam masa kepemimpinan Mansur, Muhammadiyah dikenal menempuh kebijaksanaan sistematis berdasar konsep Mansur yang disebut "Duabelas Langkah Muhammadiyah".⁵ Dikatakan sistematis, karena 12 langkah itu perlu dilaksanakan secara tertib dan berurutan. Mansur membagi 12 langkah itu ke dalam dua kategori. Langkah 1 sampai 7 adalah langkah ilmu yang menghajatkan keterangan-keterangan. Adapun langkah ke delapan dan selanjutnya adalah langkah mati, yakni tinggal terus dipraktekkan saja, karena sudah terang dan nyata. Dua belas langkah itu ialah:

1. Memperdalam masuknya iman.
2. Memperluas faham agama.
3. Memperbuahkan budi pekerti.
4. Menuntut amalan intiqad (zelf corectie).
5. Menguatkan persatuan.
6. Menegakkan keadilan.
7. Melakukan kebijaksanaan.

⁵Lihat K.H.M. Mansoer, *12 Tafsir Langkah Muhammadiyah*, PP Muhammadiyah Majlis Tabligh bersama PT. Persatuan, Cetakan ketiga (tanpa tahun). Risalah ini berasal dari tahun 1939.

8. Menguatkan majlis tanwir.
9. Mengadakan konperensi bagian.
10. Mempermusyawaratkan putusan.
11. Mengawaskan gerakan jalan.
12. Mempersambungkan gerakan ke luar.

Dari dua belas langkah Muhammadiyah tahun 1938-1940 yang dicanangkan Mansur kelihatan bahwa jalan menuju kepada kemajuan umat harus dimulai dari hal-hal yang paling mendasar dahulu, yaitu soal iman yang benar, lalu memperluas pemahaman agama, baru kemudian membentuk budi pekerti, dan seterusnya. Dengan demikian, meskipun langkah-langkah itu adalah program perserikatan Muhammadiyah, tetapi tampaknya hanya langkah 8 sampai 12 saja yang khas organisasi ini, sedangkan langkah pertama hingga ke tujuh adalah prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan untuk memajukan umat Islam pada umumnya.

3.2. Persatuan adalah modal kedua

Pandangan-pandangan kritis Mansur terhadap kondisi umat Islam dan cara-cara menanganinya menampakkan kemodernan cara berpikirnya. Selain keprihatinan terhadap kondisi umat yang bodoh dan lemah itu, Mansur juga sangat prihatin terhadap perpecahan umat. Perpecahan merupakan salah satu sebab kelemahan umat. Mengapa perpecahan terjadi, sedangkan umat Islam itu berpegang pada satu Qur'an jua?

Untuk menjelaskan pendirian Mas Mansur dalam soal ini, kita simak kembali pidatonya di muka Kongres akbar Muhammadiyah ke 20 di Yogyakarta. Ia mengatakan:

"Qur'an tiada lagi dijunjung-junjung tinggi. Hadits tiada lagi diingat dan dibesarkan. Siapa yang berpengaruh besar itulah yang terletak di atas. Siapa yang tidak berkuasa itulah yang akan rendah karena tidak dihargai lagi. Ulama-ulama mencari pengaruh tinggi di hadapan raja, supaya dapat mengalahkan lawannya. Pertandingan antara empat

madzhab: Syafi'ie, Hanafie, Malikie dan Hambalie sangatlah hebatnya." (Wiriyosukarto, h. 87)

Pernyataan Mansur itu mengisyaratkan dengan tegas, bahwa perpecahan ummat disebabkan oleh ummat Islam sendiri tidak lagi menjadikan Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidupnya. Kepentingan politik dan kepentingan dunia menyebabkan orang melupakan pedomannya. Qur'an dan Hadits menjadi asing dalam kehidupan ummat Islam.

Baku bantah antara satu golongan madzhab dengan madzhab lainnya terjadi karena mereka berpegang pada hukum yang dibuat manusia. Ummat yang awam diombang-ambingkan oleh para pimpinan yang saling bertengkar atas perkara-perkara *furu'iyah* dan tidak signifikan dalam agama.

Mansur menyadari bahwa perpecahan adalah sebab utama lemahnya ummat. Ia tidak saja berbicara mengajak ummat Islam untuk menggalang persatuan, tetapi berusaha mewujudkan pikirannya itu ke dalam bentuk yang nyata. Mansur lalu mendirikan Majelis Islam Tinggi sebagai tempat bersatunya ummat dari berbagai golongan. Ia sangat prihatin terhadap perpecahan, dan menimpakan sebab perpecahan itu pada para ulama sendiri. Ia mengatakan:

"Kita sekarang bukan hidup pada 25 tahun yang lalu, kita sudah bosan, kita sudah payah bermusuh-musuhan. Sedih kita rasakan kalau perbuatan itu timbul dari para ulama, padahal ulama itu mestinya lebih halus budinya, berhati-hati lakunya. Karena ulama itu sudah ditentukan menurut firman Allah: 'Ulama itu lebih takut kepada Allah'. Karena ulama tentunya lebih paham dan lebih mengerti kepada dosa dan bahayanya bermusuh-musuhan."

Melihat itu, Mansur berusaha menemui kiyai-kiyai besar di Jawa, menyampaikan gagasan perlunya membentuk wadah guna memperbaiki kemaslahatan ummat. Lalu dibentuklah Majelis Islam A'la Indonesia (1937), sebuah federasi organisasi-organisasi Islam yang ada di Jawa. Di zaman Jepang, ketika MIAI dibubarkan, Mansur bersama ulama-ulama

Indonesia lainnya membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Di atas sudah disinggung program 12 langkah Muhammadiyah semasa kepemimpinan Mansur. Sebagai orang yang merindukan persatuan, Mansur mencanangkan program ini pada langkah kelima, menguatkan persatuan. "Menguatkan persatuan hendaknya menjadi tujuan kita, baik untuk organisasi maupun mengokohkan persaudaraan kita, serta mempersamakan hak-hak dan memerdekaan lahirnya pikiran-pikiran kita" kata Mansur. Mengapa Mansur mengaitkan antara kokohnya persatuan dengan kemerdekaan berpikir? Persatuan itu dapat tumbuh kokoh kalau antara satu dengan lainnya terdapat persamaan. Persamaan derajat inilah yang mendorong timbulnya kemerdekaan berpikir. Karena semua orang mempunyai derajat yang sama, maka mereka pun mempunyai hak yang sama untuk menyatakan pikiran-pikirannya secara merdeka.

Menurut Mansur, persatuan itu merupakan perkara yang dianjurkan oleh agama. Semua unsur yang mendukung dan mendatangkan persatuan pun menjadi anjuran agama. Tentang ini Mansur mengatakan:

"Perintah-perintah agama Islam: menyambung persaudaraan, memberi maaf kepada teman yang berkesalahan, menghargai diri, tamu mertamu, memberi salam, tolong menolong satu kepada yang lain, dan lain sebagainya, itu semuanya kalau kita selidiki illah atau hikmahnya diperintahkan, tentulah terdapat bahwa perkara-perkara tersebut adalah perkara yang mendatangkan kepada persatuan." (Wiryosukarto, h. 233). Agama juga melarang semua hal yang menyebabkan pecahnya persatuan. Mengapa dengki, hasud, merendahkan orang lain, mencela, mengumpat, *namimah* (bergunjing adu domba) dan sebangsanya dilarang agama? Tidak lain, kata Mansur, karena perbuatan demikian itu menjadi sebab pecahnya persatuan. Persatuan adalah syarat mutlak pencapaian kekokohan dan kekuatan. Organisasi maupun kerajaan jatuh karena tiada persatuan. Sebaliknya, kerajaan maupun organisasi menjadi kuat dan jaya, karena kokohnya persatuan. Akan tetapi, menurut Mansur, mencapai persatuan itu bukanlah perkara mudah, karena menuntut syarat yang berat dan tidak mudah dipenuhi melainkan dengan dasar kesabaran dan keteguhan hati.

Menjaga persatuan dan menghindari perselisihan dengan kesabaran adalah perintah Allah. Mansur mengutip ayat Qur'an, Surat Al-Anfal ayat 46, yang artinya:

"Turutlah kamu sekalian akan Allah dan pesuruh-Nya dan janganlah kamu berselisih. Kalau kamu berselisih maka niscaya lemahlah kamu sekalian dan akan hilanglah kekuatanmu. Dan Hendaklah kamu kalian bersabar; sungguh Allah itu berteman kepada orang yang bersabar."

Gandrung persatuan tidak saja ditujukan untuk sesama golongan Islam, tetapi juga antara Islam dan golongan nasionalis serta golongan sebangsa lainnya. Pergaulan Mansur yang luas, termasuk dengan pemimpin-pemimpin nasionalis memberi kesempatan padanya untuk mengemukakan ide-ide persatuan antara mereka dengan golongan Islam. Tahun 1939, bersama-sama pemimpin Islam lain dan nasionalis, antara lain Abikusno, M. Husni Thamrin, Dr. Ratulangi, Sanusi Pane, dan lain-lainnya, Mansur mendirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Bahkan dalam permusyawaratan yang menghasilkan lahirnya GAPI itu, Mansur terpilih menjadi ketua, tetapi dengan alasan bahwa ia tidak dapat membagi waktunya untuk GAPI dan Muhammadiyah, ia tidak mau menerima hasil pilihan itu.

3.3. Cinta Tanah Air dasar Nasionalisme

Negara bangsa atau *nations state* sebagai fakta politik Indonesia sekarang merupakan hasil perjuangan para pemimpin terdahulu, termasuk Mas Mansur. Negara bangsa yang merupakan perkembangan termodern mulai muncul pertama kali di dunia Barat pada abad 18. Kehadiran negara bangsa merupakan pengganti negara dinasti yang mulai pudar semenjak Revolusi Perancis dan Revolusi Industri di Inggris, Italia, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Perkembangan ini dimungkinkan oleh munculnya paham kebangsaan atau nasionalisme yang mengikat kesatuan dan solidaritas masyarakat-masyarakat yang tergabung dalam kesadaran itu. Dengan demikian, antara negara bangsa dan nasionalisme merupakan elemen yang saling menunjang, di mana satuan geografis tertentu sekaligus menjadi batasan bangsa. Nasionalisme menjadi faktor penentu yang mengikat semangat serta loyalitas untuk mewujudkan cita bersama

mendirikan sebuah negara bangsa. Landasan nasionalisme dibangun oleh kesadaran sejarah, cinta tanah air, dan cita politiknya.

Mansur sadar betul, bahwa kesadaran kebangsaan harus diperkuat sebelum pembentukan sebuah negara bangsa. Menurut Mansur, salah satu asas paling penting dalam pengembangan kesadaran kebangsaan adalah cinta tanah air. Setiap bangsa mencintai tanah airnya, sekalipun tandus dan gersang. Ini adalah suatu keajaiban dan kodrat Ilahi. Karena itu, Mansur tidak heran ketika orang Mesir memuji tanah airnya, yang menurut pandangan Mansur tidak indah, tetapi dikatakan "Mesir tanah airnya emas". "Bagaimana emas, sedangkan pemandangan yang saya lihat dari Zues sampai Kairo hanya padang pasir yang tandus belaka" tanya Mas Mansur.

Mengapa cinta tanah air? Cinta tanah air adalah fitrah manusia. Menurut Mansur, cinta tanah air itu ibarat cinta kepada diri sendiri dan jiwanya, meskipun jelek dan cacat, bahkan sering kali bangsa akan keindahan dan kebaguan dirinya. Apa sebab? Mansur menjelaskan:

"Tiap jiwa mempunyai roh, dan tiap roh itu bertanah air pada jiwanya, tidak ubahnya sebagai roh saya juga bertanah air pada jiwa dan badan saya. Dan kewajiban bagi saya untuk menjaganya, memeliharanya, mencintainya kepada tanah air yang bertempat pada jiwa saya itu." (Wiriyosukarto, h. 182).

Cinta tanah air, seperti digambarkan Mansur itu termasuk cinta kepada seluruh rakyat yang tinggal di atas tanah air itu. Implikasi dari cinta itu, maka setiap orang berkewajiban menjaga dan memelihara semua yang ada di atas tanah airnya, terutama rakyat dan kekayaannya.

Tetapi apakah cinta tanah air itu tidak pertentangan dengan Islam. Apakah membela kebangsaan tidak termasuk yang dilarang oleh agama? Terhadap pertanyaan demikian Mansur menjelaskan:

"Orang yang mendalilkan cinta tanah air itu termasuk dari pada iman, dengan sebuah hadits, katanya, adalah hal itu tidak benar. Sebab hadits yang biasanya diucapkan *hubbul wathon minal iman* itu bukannya hadits.....Memang agama Islam tidak bertanah air, tetapi kaum

musliminnya yang bertanah air. Agama Islam tidak ada kebangsaan, tetapi kaum musliminnya berbangsa-bangsa menurut tempat dan daerahnya." (Wiriyosukarto, h. 183).

Mengaitkan Islam dengan kebangsaan mungkin dapat dijelaskan dalam dua perspektif. Pertama dari perspektif pluralisme dalam persatuan, Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan positif. Islam mempunyai pengalaman panjang dan bahkan pioneer terbentuknya nasionalisme yang melahirkan negara bangsa. Negara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad adalah negara bangsa yang pertama di atas dunia. Kedua, dari perspektif universalisme, menurut Mansur, kebangsaan bertentangan dengan Islam. Sebagai agama universal, Islam tidak membatasi peruntukan bagi wilayah geografis dan etnis tertentu, sedangkan kebangsaan membatasi diri untuk wilayah geografis dan etnis tertentu. Namun demikian Islam tidak menafikan kenyataan bahwa setiap orang mempunyai afiliasi terhadap tanah air tertentu. Maka, kaidah yang mengatakan bahwa "cinta tanah air itu sebagian dari iman", seperti dikutip di atas, meskipun bukan kutipan Qur'an dan bukan pula Hadits, kaidah ini mempengaruhi pandangan kaum muslimin pada umumnya. Maka benarlah Mas Mansur bahwa memang, Islam tidak bertanah air, tetapi kaum musliminnya bertanah air. Dan ummat Islam berkewajiban menjaga, mencintai, dan membela tanah airnya.

Sebagai seorang yang mencintai tanah air, Mansur sendiri menyadari bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang amat-amat indah, subur dan kaya. Tetapi sayang, lukisan serba indah tentang negeri Indonesia ini berubah menjadi keluh kesah seketika melihat kenyataan bahwa jasad tanah air digenggam oleh bangsa lain. "Pilu dan sedih hati bila mengenangkan semua hal itu" kata Mas Mansur. Hasil bumi, hasil tambang dan semua kekayaan di seluruh negeri dikuasai oleh bangsa lain. Semua hasil kekayaan Indonesia dinikmati oleh orang lain.

"Bangsa kita dengan hasil tanah airnya sudah tak ada perhubungan sama sekali.... Tak ubahnya keadaan kita ini sebagai ayam yang tidur di atas lumbung padi mati kelaparan, itik yang berenang di atas air mati kehausan".(Wiriyosukarto, h. 140).

Keadaan ini adalah real di depan mata. Menurut Mansur, di antara sebab-sebab paling penting yang menyebabkan keadaan ini karena kita telah dirasuki sifat *mrimo* dan karena jiwa anak Indonesia telah dipengaruhi oleh sifat tidak mengindahkan kepada keduniaan. Untuk memecahkan keadaan yang buruk ini, kata Mansur, terutama para pemimpin memikul kewajiban berat, yaitu.

"menyadarkan sekalian penduduk agar mereka insaf terhadap nasib yang tengah dirundungnya dan bangkit semangatnya untuk melindungi kekayaan dan perbendaharaan tanah airnya untuk memperbaiki nasibnya dan menyelamatkan dirinya ke dalam masyarakat hidup yang aman dan damai." (Wiryosukarto, h. 144).

Tetapi menjaga tanah air tidaklah mungkin dilakukan kalau "keadaan politik masih mengurung dan menutup pintunya, masih belum memberikan atau menyanggupi akan Hindia berdiri sendiri, selama itu pula kita belum pandai menjaga diri." (Wiryosukarto, h. 163).

Kemana arah pernyataan Mansur ini tak perlu dikira-kira. Jelas bahwa kewajiban menjaga tanah air itu tidak mungkin dilaksanakan selama negeri ini di bawah kekuasaan asing. "Hindia harus berdiri sendiri" bukanlah sebuah tujuan, melainkan tujuan antara agar pembelaan tanah air itu dapat ditunaikan. Mansur percaya, bahwa hanya pemerintah negeri yang dijalankan oleh rakyatnya sendiri yang dapat dilihat sebagai sejajar dengan "kemanusiaan yang sejati". Menurut Mansur, pemerintah dan rakyat adalah dua hal yang harus berjalan bukan saja seiring-sejalan, melainkan dua wujud itu sebenarnya satu hakekat. Tentang ini Mansur berteori sebagai berikut:

"Aliran perjalanan pemerintahan suatu negeri yang dikendalikan oleh bangsanya sendiri bolehlah dikatakan sejalan dengan aliran kemanusiaan rakyatnya. Sebab pemerintah ialah rakyat, dan rakyat ialah pemerintah. Tetapi di dalam negeri jajahan kerap kali kemauan yang memerintah tiada sama dengan yang diperintah, karena pemerintah bukan rakyat, dan rakyat bukan pemerintah. Hajat keduanya itu kadang-kadang berlainan. Hal ini dapat dinyatakan kebenarannya pada keadaan-keadaan di Indonesia." (Wiryosukarto, h. 135).

Dengan kata lain, pemerintah adalah perwujudan kehendak rakyat. Hanya pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat saja dapat sejalan dengan kodrat kemanusiaan. Dalam kondisi terjajah, kodrat itu hanya bisa dicapai dengan perjuangan. Dan yang paling bertanggung jawab terhadap pembebasan rakyat atas ketidakadilan adalah kaum elite. "Oleh karena itu, adalah satu kewajiban bagi ulama dan kaum intelektual untuk berdiri melayani kehendak rakyat yang tumbuh dari perjalanan kodrat, supaya memelihara dan menuntun mereka ke padang damai dan tenang." (Wiryosukarto, h. 137).

5. Kesimpulan

Kiyai Haji Mas Mansur adalah tipe pemimpin Islam Indonesia di masa penjajahan yang datang dari latar belakang pesantren. Tipe ini berbeda dari pemimpin Islam lain yang datang dari lingkungan "priyayi" dan memperoleh pendidikan Barat, seperti Cokroaminoto, Samsurijal, Sukiman Wiryosanjoyo, Agus Salim, M. Natsir, dan sebagainya. Perbedaan itu terletak pada tipe komitmennya dalam memperjuangkan kemajuan umat. Pemimpin yang datang dari latar belakang sekolah Barat, berjuang dan bergerak di lapangan politik, sedangkan perjuangan pemimpin Islam yang datang dari pesantren seperti Mas Mansur, lebih diarahkan pada pembinaan umat, memajukan kecerdasan, mengentaskan umat dari kegelapan kepada terang benderang. Itulah sebabnya maka konsep-konsep politik seperti tentang negara, pemerintahan dan seterusnya lebih banyak dihasilkan dari kalangan pemimpin Islam berpendidikan Barat dari pada Pesantren.

Di kalangan yang disebut terakhir, seperti yang dilakukan Mas Mansur, konsep-konsep dalam bidang politik, seperti tentang negara dan pemerintahan terselubung di dalam konsep-konsep tentang kemajuan umat, persatuan dan pemikiran agama. Menemukan konsep hubungan agama dan negara dari lingkungan pesantren seperti Mas Mansur harus dicermati melalui sisi-sisi yang implisit. Tulisan-tulisan peninggalan Mas Mansur dapat dikatakan, tujuh puluh persen adalah berkaitan dengan agama, baik itu filsafat, syariah, tauhid, aqidah, akhlak dan sejarah. Tiga puluh persen berhubungan dengan pergerakan, dan ini pun disajikan dalam

perspektif agama.

Sejalan dengan itu, pandangan-pandangan Mas Mansur dapat dikatakan, meskipun liberal tetapi luwes dan lentur. Sejauh yang dapat dikaji dalam penelitian ini, karya-karya Mansur tidak mewariskan rumusan-rumusan eksplisit mengenai hubungan Islam dengan bangun politik dan bentuk negara tertentu. Sinyal yang diberikan hanyalah dalam konteks universalitas ajaran agama Islam. Mansur meyakini bahwa Islam adalah agama kerajaan, Islam adalah agama kekuasaan, dan Islam adalah agama kekuatan. Akan tetapi, sejauh bahan yang dapat dipelajari dari karya-karya Mas Mansur, ia tidak menjabarkan apa makna konsep-konsep yang ia sebutkan di atas, dan bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan bernegara.

Dari konsepsi Mas Mansur tentang hubungan antara rakyat dan pemerintah seperti diuraikan di atas, dapatlah disusun suatu teori hubungan antara rakyat dan pemerintah sebagai sebuah hubungan yang saya sebut bersifat naturalistik. Dalam konsep Mansur, apa yang dikatakan bahwa rakyat adalah pemerintah dan pemerintah adalah rakyat, dapat ditafsir bahwa jika rakyat adalah Muslim maka secara alamiah pula pemerintah haruslah sejajar dengan kemauan Islam. Jika keduanya tidak sejajar, maka belum dapat dikatakan memenuhi kehendak alamiah kemanusiaan. Tetapi seperti apakah bentuk pemerintahan yang dikehendaki Islam itu, Mansur tidak memberi patokan khusus. Tulisan-tulisan Mas Mansur hanya menyajikan prinsip-prinsip universal dalam memelihara kehidupan bermasyarakat, seperti musyawarah, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, berpegang teguh pada al-Qur'an dan sebagainya. Dalam kerangka teoretisasi politik Islam, pandangan Mas Mansur yang demikian itu barang kali dapat dikategorikan ke dalam kerangka teori Muhammad 'Imara yang menyatakan:

"Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslimin, karena logika tentang kesesuaian agama ini untuk sepanjang masa dan tempat menuntut agar soal-soal yang selalu akan berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia (untuk memikirkannya) dibentuk menurut

kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum yang telah digariskan oleh agama ini." (sebagaimana dikutip Bahtiar Effendy, 1998, 13).

Allahu a'lamu bi shawabihi.

DAFTAR PUSTAKA RUJUKAN

- Abdullah, Taufik (ed.) (1987), *Sejarah dan Masyarakat, Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- (ed.), *Sejarah Umat Islam*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1991.
- Anis, M. Junus, *Kenalilah pemimpin Anda: Riwayat hidup dan perjuangan ketua-ketua PP. Muhammadiyah, K.H.A. Dahlan sampai dengan Pak A.R.*, P.P. Muhammadiyah, Majelis Pustaka, Yogyakarta, 1975.
- Benda, Hary J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1980.
- Djaja, Tamar, *Pusaka Indonesia (Orang-orang Besar Tanah Air)*, badan Penerbit G. Kolf, Bandung, 1951.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara, Transformasi pemikiran dan praktek politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998.
- Hadikusumo, H. Djarnawi, *Matahari-matahari Muhammadiyah, Dari K.H.A. Dahlan sampai dengan K.H. Mas Mansur*, Persatuan, Yogyakarta, tanpa tahun.
- Kutoyo, Sutrisno, *Kyai Haji MAs Mansur*, Proyek IDSN, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1981/1982.
- Mas Mansur, *Risalah Jang Pertama tentang Ilmu Tjara Beroending*, Hoofdcomite Congres Mochammadijah Djokjakarta, tanpa tahun.
- *Risalah Tauhid dan Sjirik*, Diambil dari Koersoes Mochammadijah Tjabang Soerabaja (tanpa tahun).
- *Tafsir 12 Langkah Muhammadiyah*, H.B. Mochammadijah, Djokjakarta, (1939).
- "Bagaimana kaoem moeslimin dapat bangoen kembali?" dalam *Almanak Mochammadijah Tahoen Hidjrah 1361 (1942-1943)*, HB Mochammadijah, Djokjakarta.

- "K.H. Mas Mansoer Masoek Politik" dalam *Pantjaran Amal*, No. 24/IV/1939.
- "Mendjelaskan langkah Moehammadijah 1938-1940" dalam *Pantjaran Warta*, No.31/th.IV/1939.
- "Empat dasar jang perloe dikuatkan" dalam *Adil*, No. 52, 25 September 1941.
- "Rahasia 3 sifat" dalam *Adil*, No. 5, 30 October 1941.
- "Lazatnya mengetahoei dan mengenal Toehan" dalam *Adil* No. 18, 29 Januari 1942.
- "Sekitar K.H.M. Mansoer, Sari pidato perpisahan. Bekal bagai moerid-moerid jang kembali ke doesoen" dalam *Adil*, No. 45, 7 Agustus 1941.
- "Siapa voorzitter MIAI ? K.H.M. Mansoer, the right man on the right place ?" dalam *Adil*, No. 5, 30 October 1941.
- "MIAI haroes diperkoeat, sekoeat-koeatnja. K.H.M. Mansoer boekan adviseur tetap dari MRI, Rakjat Indonesia menghadapi totale inzinking" dalam *Adil*, No. 15, 15 Djanuari 1942.
- "Bimbingan" dalam *Soeara Moeslimin Indonesia*, No. 3, 1 Maret, 2604.
- "Tjara Mendjalankan Roekoen Islam", dalam *Soeara Moeslimin Indonesia*, No. 2, Th. II, Februari 2604.
- "Angkatlah Tjangkoelmoe" dalam *Soeara Moeslimin Indonesia*, No. 1, Th. II, Djanuari 2604.
- Malkhan, Drs. Abdul Munir dan Sukrianta AR (ed.), *Perkembangan pemikiran Muhammadiyah dari masa ke masa, Menyambut Mukhtar ke 41*, Dua Delima, Yogyakarta, 1985.
- Noer, Deliar, (1982), *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta.

- Said, saleh, *Kyai Mas Mansur, Membuka dan Menutup Sedjarahnja*, Usaha Penerbitan Budi, Surabaya, tanpa tahun.
- Shiraisi, Takeshi, *An Age in Motion*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1990.
- Subagio I.N., *K.H. Mas Mansur, Pembaharu Islam di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Syaifullah, *Sikap dan Pandangan Hidup Kyai Haji Mas Mansur*, Skripsi Fakultas Usuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1985.
- Wirjosukarto, Drs. H. Amir Hamzah (ed.), *Kiyai Haji Mas Mansur: Kumpulan Karangtan Tersebar*, PT Persatuan, Yogyakarta, Cct. III, (1992).

PANDANGAN K.H. HASYIM ASY'ARI TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

Asfar Marzuki

1. Setting Sejarah Pergerakan Nasional.

Masa hidup KH. Hasyim Asy'ari yang terbentang antara tahun 1871 sampai dengan 1947 diwarnai dengan sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang mengalami beberapa fase perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang cukup mendasar. Fase pertama adalah masa akhir abad ke 19 yang dinamakan fase bangkitnya kembali dunia Islam setelah beberapa tahun lamanya terpuruk oleh dominasi kolonialisme Barat. Fase kedua yaitu masa awal tumbuhnya organisasi-organisasi nasionalisme modern yang ditandai antara lain dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908. Fase ketiga adalah masa dimana telah tercapai konsensus nasional untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Fase keempat adalah masa perang kemerdekaan.

KH. Hasyim Asy'ari lahir pada masa sedang meningkatnya gerakan perlawanan Islam terhadap dominasi kolonialisme Barat baik di Indonesia maupun di seluruh dunia Islam dengan pusat pergerakannya di Makkah. Ketika berumur 21 tahun, KH. Hasyim Asy'ari selama kurang lebih delapan tahun berada di kota Makkah yang menjadi pusat gerakan *Islamic revivalism*. Sudah barang tentu dalam usia yang masih muda ini, yang penuh idealisme dan semangat belajar yang tinggi, sementara beliau berada ditengah-tengah pusat pergerakan Islam yang sadar akan ketertinggalannya dari dunia Barat, berpengaruh terhadap pribadi KH. Hasyim Asy'ari.

Ini adalah sebuah kenyataan sejarah yang terasa sulit untuk dipungkiri, bahwa kita sudah terlanjur setuju pada kemauan sejarah. Yang menyatakan bahwa Kebangkitan Nasional dimulai sejak tahun 1908 dengan mengambil momentum berdirinya Boedi Oetomo. Padahal sebenarnya Kebangkitan Nasional sudah dimulai sejak berdirinya Syarekat Dagang Indonesia (SDI) tahun 1905 yang dipelopori oleh H. Samanhoedi dan kawan-kawan. Jauh hari sebelum itu mereka telah lebih dulu memikirkan mengenai nasib bangsa Indonesia. Melalui

sentimen pergerakan ekonomi kaum muslimin yang disambut baik di beberapa daerah di wilayah Nusantara, mereka berusaha melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme kafir Belanda.

Apa yang menjadi keinginan sebagaimana besar masyarakat bangsa Indonesia sebenarnya secara mendasar telah dirumuskan oleh para pendahulu kita tersebut. Mereka telah dengan cerdas merumuskan sebuah masyarakat Indonesia yang terintegrasi sehingga dengan demikian dapat diatur dan ditata secara baik.

Dengan memperhatikan umat Islam adalah penduduk terbesar yang sekaligus pemilik syah negeri ini, dan juga berdasarkan pertimbangan bahwa daerah Nusantara ini adalah dulu dibawah kekuasaan Kerajaan Islam, maka para pejuang pendahulu kita telah menetapkan dasar-dasar yang mengatur perikatan hidup kaum Muslimin. Ini terjadi jauh hari sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan. Anjuran mengenai perlunya persatuan senantiasa didengungkan oleh para tokoh Islam diantaranya KH. Hasyim Asy'ari.

Memang pada dataran elit politik waktu itu ada pertentangan yang sangat tajam terutama antara Islam di satu sisi dan nasionalis (sekuler) di sisi yang lain. Ditambah lagi dengan adanya perseteruan yang cukup sengit antara kelompok Islam dan golongan sosialis yang bergaris keras, yang pada akhirnya melahirkan faham komunisme. Hal ini pula yang akhirnya menimbulkan perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam. Disamping itu terjadi pula perselisihan yang tidak kalah serunya antara golongan Islam tradisional dan golongan Islam modernis.

2. KH. Hasyim Asy'ari: Sebuah Biografi

KH. Hasyim Asy'ari memiliki kehidupan yang cukup unik. KH. Hasyim Asy'ari hidup dari dunia pesantren dan kembali ke dunia pesantren. Beliau lahir dari kalangan elit kyai Jawa. Beliau dibesarkan di dunia pesantren. Dari kecil hingga usia 15 tahun beliau diasuh dan dididik oleh kakek dan kedua orangtuanya di dalam lingkungan pesantren. Kemudian beliau mengembara menuntut ilmu ke beberapa pesantren di Jawa dan Madura, sebelum akhirnya beliau pergi memperdalam ilmunya ke Makkah, Saudi Arabia. Setelah kurang lebih tujuh tahun menimba ilmu di Makkah, beliau kembali ke Nusantara dan mendirikan pondok pesantren sendiri di Tebuireng, dan sebagian besar

waktunya beliau curahkan untuk mengajar para santri di pesantrennya. Bahkan dalam berpartisipasi berjuang melawan kaum penjajah kolonial Belanda maupun Jepang beliau mengaturnya dari pesantren. Untuk mengetahui lebih jauh tentang siapa KH. Hasyim Asy'ari, dalam bab ini akan diuraikan silsilah keluarga, pendidikan dan kegiatan sosial politik KH. Hasyim Asy'ari.

A. Silsilah Keluarga.

Bayi laki-laki yang lahir dari rahim Halimah, isteri Asy'ari, pada tanggal 24 Dzul Qadah 1287 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi, di desa Gedang, kurang lebih dua kilometer sebelah timur kota Jombang, oleh orang tuanya diberi nama Muhammad Hasyim. Ayahnya, Asy'ari, berasal dari Tingkir dan keturunan Abdul Wahid dari Tingkir. Mereka dipercayai sebagai keturunan raja Muslim Jawa, Jaka Tingkir atau Mas Karebet, yang mendirikan kerajaan Pajang dan bergelar Sultan Hadiwijaya. Jaka Tingkir sendiri merupakan keturunan raja Hindu Majapahit yaitu Prabu Brawijaya VI. Sedangkan ibunya, Halimah, adalah putri Kyai Usman, pendiri dan sekaligus pemilik pesantren Gedang. Menurut Akarhanaf (1950) dari garis keturunan ibunya, KH. Hasyim Asy'ari memiliki silsilah yakni Muhammad Hasyim Asy'ari bin Halimah binti Layyinah binti Sihah bin Abdul Jabar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir (Mas Karebet) bin Lembupeteng alias Prabu Brawijaya VI, raja Majapahit terakhir. Secara demikian baik dilihat dari silsilah ayah maupun ibunya, KH. Hasyim Asy'ari merupakan keturunan bangsawan. Pendapat lain menyatakan bahwa nenek moyang KH. Hasyim Asy'ari adalah Sunan Giri, salah satu dari Sembilan Wali (Walisongo) yang menyiarkan agama Islam di tanah Jawa pada sekitar abad 16 (Hadziq, 1995). Dalam pada itu ada pula yang berpendapat bahwa KH. Hasyim Asy'ari masih keturunan pemimpin Syi'ah yang bernama Ja'far Shodiq bin Imam Muhammad Baqir melalui keluarga Syaiban (Syihab, 1994).

Sejak kelahirannya hingga usia lima tahun, KH. Hasyim Asy'ari diasuh oleh kakek dan kedua orangtuanya di lingkungan pesantren Gedang milik kakeknya. Setelah KH. Hasyim Asy'ari berumur enam tahun, orangtuanya pindah ke desa Keras dan mendirikan pesantren sendiri di desa tersebut. Barangkali ini adalah sebuah pengalaman yang cukup berarti bagi KH. Hasyim Asy'ari dan berpengaruh pada diri beliau

dimana kelak pada akhirnya beliaupun mendirikan pesantren sendiri. Di pesantren Keras milik orangtuanya inilah si kecil Hasyim memperoleh pendidikan dan bimbingan ayah dan ibunya sampai beliau berumur lima belas tahun. Kehidupan masa kecilnya yang berada di lingkungan pesantren tersebut sudah barang tentu mempunyai pengaruh yang cukup besar pada pembentukan karakter KH. Hasyim Asy'ari yang haus akan ilmu pengetahuan dan kepeduliannya dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama secara konsisten (Hadzik), 1999; Khuluq, 2000).

Sejak kecil KH. Hasyim Asy'ari sudah tampak kecerdasannya dan diprediksi kelak akan menjadi orang yang terkenal karena ketinggian ilmunya. KH. Hasyim Asy'ari tidak sebagaimana orang lain pada umumnya, yang dikandung ibunya selama sembilan bulan, beliau dikandung ibunya selama empat belas bulan. Sebagian masyarakat mempercayai bahwa lamanya beliau dalam kandungan ibunya itu merupakan pertanda bahwa beliau kelak akan menjadi orang yang cerdas dan terkenal. Lebih-lebih ketika ibunya mengandung beliau. Ibunya pernah bermimpi perutnya kejatuhan bulan purnama. Mimpi tersebut diartikan sebagai tanda bahwa anak yang sedang dikandung tersebut kelak dikemudian hari kalau sudah besar akan memiliki kecerdasan dan ketenaran, sebab kejatuhan bulan purnama itu artinya mendapat barokah dari Allah SWT. Namun demikian tidak semua orang dengan serta mendapatkan barokah tersebut. Menurut Hadzik (1999), hal ini mungkin ada hubungannya dengan olah batin yang dilakukan ibunya dan Allah SWT memberikan anugerahnya. Konon jauh hari sebelum mengandung KH.Hasyim Asy'ari, ibunya yaitu Nyai Halimah telah melaksanakan oleh bathin yaitu berpuasa selama tiga tahun berturut-turut. Puasa tersebut dimasukkan satu tahun berpuasa untuk dirinya sendiri, satu tahun untuk anak dan cucunya dan satu tahun lagi untuk seluruh santrinya.

Tafsiran terhadap mimpi Nyai Halimah yaitu kejatuhan bulan purnama diperutnya sewaktu mengandung KH. Hasyim Asy'ari tersebut kiranya tidaklah meleset. Sebab KH. Hasyim Asy'ari yang sejak kelahirannya hingga usia 15 tahun diasuh dan dididik oleh kakek dan kedua orangtuanya di lingkungan pesantren sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasannya. Hal ini dapat diperlihatkan bahwa pada usia 12 tahun, KH. Hasyim Asy'ari telah mampu mengajarkan beberapa isi kitab

kecil tentang keagamaan kepada para santri di pesantren ayahnya dan kawan-kawan sebayanya bahkan yang umurnya lebih tua dari dirinya. Demikian pula dengan bakat kepemimpinannya yang sudah tampak menonjol semenjak beliau masih kecil. Sifat kepemimpinan yang terpancar dari kecerdasannya menyebabkan teman-teman sepermainan dan sepergaulannya sangat patuh dan sayang kepadanya. Dalam setiap permainan, Hasyim selalu dipilih oleh teman-temannya untuk menjadi ketua atau pimpinannya. Disamping itu, beliau juga mempunyai akhlaqul Karimah atau budi pekerti yang luhur. Beliau memiliki sifat yang suka bekerja untuk kepentingan bersama. Bilamana temannya memerlukan sesuatu daripada miliknya beliaupun dengan rela hati dan tulus ikhlas memberikannya.

Ketika usianya menginjak 15 tahun, KH. Hasyim Asy'ari yang sudah cukup mempunyai bekal ilmu dari orangtuanya, mengemukakan keinginannya untuk menimba ilmu dari ulama-ulama atau kyai-kyai terkenal di beberapa pesantren di Jawa. Tentu saja sebagai orangtua yang baik, dan yang sangat mengerti bahwa mencari ilmu itu fardlu bagi muslimin dan muslimat, maka permohonan anaknya untuk memperluas ilmu pengetahuan dan memperdalam ilmu yang telah diperoleh dari kakek dan kedua -orangtuanya tersebut di beberapa pesantren dikabulkan.

Dengan diiringi do'a restu orangtuanya, Hasyim berangkat untuk memulai pengembaraannya menuntut ilmu ke berbagai pesantren. Pesantren pertama yang disinggahi adalah pondok pesantren Wonokoyo di Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke pondok pesantren Langitan di Tuban. Dari pesantren Langitan ini beliau pindah lagi ke pondok pesantren Trenggilis di Surabaya. Pada waktu itu beliau mendengar bahwa di Kademangan di Bangkalan, Madura ada seorang kyai besar yang sangat terkenal bahkan sebagian masyarakat Muslim disana menggelarinya sebagai Waliyullah, yaitu KH. Muhammad Khalil. Kemudian pemuda Hasyim berangkat untuk menuntut ilmu di pondok pesantren Kademangan. Bangkalan, Madura berguru kepada KH. Muhammad Khalil. Namun demikian Hasyim tidak lama belajar kepada Kyai Khalil, sebab menurut Kyai Khalil, Hasyim sudah memiliki ilmu yang cukup, bahkan Kyai Khalil menyuruh Hasyim supaya segera pulang, dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain yang

mebutuhkannya. Tetapi dalam perjalanan pulang, Hasyim tidak langsung pulang kerumahnya, melainkan singgah dan berguru kepada Kyai Ya'kub, pemilik dan pengasuh pondok pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo.

Rupanya Kyai Ya'kub sangat terkesan dengan kedalaman ilmu dan akhlaq santri baru yang bernama Muhammad Hasyim ini. Beberapa lama kemudian Kyai Ya'kub meminta supaya Hasyim menikah dengan putrinya yang bernama Nafisah. Permintaan semacam itu sudah merupakan hal yang lazim di dunia pesantren. Setelah mendapatkan restu dari kedua orangtuanya, maka pernikahan antara Muhammad Hasyim bin Asy'ari dan Nafisah binti Ya'kub diselenggarakan pada tahun 1892, dimana ketika itu pemuda Hasyim berusia 21 tahun. Tidak lama setelah itu, Hasyim dan isteri serta mertuanya menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji ke Makkah. Tujuh bulan berada di Makkah, isterinya melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Abdullah. Akan tetapi kebahagiaan dikaruniai anak tersebut tidaklah berlangsung lama, sebab Nafisah, istrinya, jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal. Bahkan tidak lama kemudian putranya yang baru berumur empat puluh hari itupun meninggal dunia. Dengan perasaan yang sedih namun tetap tabah dalam menerima cobaan dari Allah SWT ini, Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air.

Pada tahun 1893, Hasyim kembali lagi ke Makkah, dan kali ini ditemani oleh adik kandungnya yaitu Anis. Namun rupanya musibah masih belum mau beranjak dari diri Hasyim Asy'ari. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Makkah adik kandungnya, Anis, meninggal dunia. Musibah yang terus-menerus dialaminya itu tidak menjadikan Hasyim menjadi patah semangat dalam mengejar cita-citanya menuntut ilmu di tanah suci tersebut. Waktunya ia curahkan untuk beribadah dan menimba ilmu. Selama kurang lebih delapan tahun bermukim di Makkah, Hasyim muda belajar berbagai ilmu agama Islam, bahkan beliaupun sempat berkhalwat di gua Hira, tempat dimana pertama kali Nabi Muhammad S.A. W. menerima wahyu Ilahi. KH. Hasyim Asy'ari berguru kepada beberapa ulama terkenal seperti Syaikh Syaib bin Abdurrahman, Syaikh Muhammad Mahfudz At Turmusi, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, Syaikh Sambas dan lain-lain.

Sekembalinya dari tanah suci pada tahun 1900, KH. Hasyim Asy'ari mengajar di pesantren ayah dan kakeknya. Kemudian antara tahun 1903 sampai dengan tahun 1906 beliau mengajar di pesantren mertuanya di pondok pesantren Kemuring, Kediri. KH. Hasyim Asy'ari selain dikenal sebagai seorang ulama besar dan tinggi ilmunya, beliau juga dipercayai mempunyai kekuatan bathin yang luar biasa (supra natural) semenjak mendirikan pondok pesantren Tebuireng. Sebagaimana masyarakat percaya bahwa tongkat KH. Hasyim Asy'ari dapat menyerang lawan dengan sendirinya. Kepercayaan-kepercayaan semacam itu menunjukkan bahwa KH. Hasyim Asy'ari merupakan tokoh yang disegani dan dihormati. Bahkan bekas gurunya yaitu Kyai Khalil Bangkalan juga memperlihatkan sikap rasa hormat kepada KH. Hasyim Asy'ari dengan caranya sendiri yaitu dengan sesekali mengikuti pengajian KH. Hasyim Asy'ari yang diselenggarakan pada bulan suci Ramadhan. Sikap Kyai Khalil Bangkalan - yang oleh sebagian kalangan dan para ulama dianggap sebagai Wali - terhadap KH. Hasyim Asy'ari tersebut menjadikan para kyai di Jawa mengikuti jejak Kyai Khalil dan menganggap KH. Hasyim Asy'ari sebagai guru mereka. Lebih daripada itu, sepeninggal Kyai Khalil Bangkalan, KH. Hasyim Asy'ari dinobatkan sebagai pimpinan spiritual para kyai. Dalam hubungan ini ada dua peristiwa yang cukup penting dan layak dikedepankan yaitu menjelang didirikannya organisasi sosial keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama. Pertama, pada waktu Kyai Khalil Bangkalan mengutus muridnya yaitu As'ad Syamsul Arifin untuk menemui KH. Hasyim Asy'ari dan memberikan sebuah tasbih dan kalimat surat Thaha yang isinya menceritakan mu'jizat Nabi Musa dan tongkanya. Kedua, setahun kemudian peristiwa tersebut terulang lagi, dan kali ini Kyai Khalil mengutus As'ad Syamsul Arifin kepada KH. Hasyim Asy'ari dengan mengucapkan lafadl Ya Jabbar Ya Qohhar yang artinya wahai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Memaksa. Dari kedua peristiwa beruntun tersebut banyak yang menafsirkan bahwa hal itu merupakan isyarat Kyai Khalil Bangkalan yang sangat setuju dengan didirikannya Nahdlatul Ulama dan KH. Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin spiritual masyarakat pesantren.

B. Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari

Pada waktu KH. Hasyim Asy'ari masih muda, di Indonesia yang ketika itu dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, ada dua macam sistem pendidikan. Pertama adalah sistem pendidikan modern (Barat) yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kedua adalah sistem pendidikan pesantren yang diprakarsai oleh para kyai.

Sistem pendidikan modern (barat) yang diintrodusir oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut bertujuan mencetak siswa-siswa lulusannya kelak menjadi pegawai administrasi pemerintah baik di tingkat rendah maupun menengah. Lembaga pendidikannya yang terkenal adalah yang dinamai *Holland Inlandsche Scholen (HIS)*. Namun bagi penduduk pribumi tidaklah gampang memasuki sekolah ini. Hanya mereka anak-anak yang berasal dari kalangan bangsawan atau priyayi tinggi yang dapat diterima menjadi murid di sekolah tersebut. Masa belajarpun dibatasi hanya sampai tujuh tahun. Selanjutnya bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikannya haruslah meneruskannya di negeri Belanda. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika hanya sedikit sekali anak pribumi yang dapat melanjutkan sekolahnya ke negeri Belanda. Meskipun KH. Hasyim Asy'ari adalah juga keturunan bangsawan Jawa namun beliau tidak masuk sekolah Belanda. Tidak ada keterangan yang pasti, mengapa Hasyim Asy'ari tidak masuk sekolah HIS itu. Meskipun beliau adalah keturunan bangsawan, tetapi mungkin karena orang tuanya bukan priyayi atau pegawai tinggi pemerintah kolonial Belanda maka dia tidak diperkenankan masuk sekolah Belanda. Tetapi sangat boleh jadi karena memang orang tuanyalah yang tidak menghendaki anaknya masuk ke sekolah Belanda (HIS) dengan alasan sekolah tersebut adalah sekolah sekuler atau bahkan dianggap kafir. Lebih-lebih orang tua Hasyim, baik ayah maupun kakeknya sudah mempunyai lembaga pendidikan sendiri yang islami yaitu pesantren.

Sistem pendidikan pesantren disediakan terutama bagi mereka para santri Muslim dan titik berat pengajarannya pada bidang atau ilmu agama. Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan anak-anak lain yang sebaya dengannya. Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa sampai umur 6 tahun, KH. Hasyim Asy'ari diasuh dan dididik oleh kakek dan kedua orangtuanya di pesantren Gedang milik kakeknya. Setelah itu ayahnya mendirikan pesantren

sendiri di desa Keras dan sejak saat itu sampai berusia 15 tahun, KH. Hasyim Asy'ri diasuh dan dididik oleh ayah dan ibunya. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke beberapa pesantren antara lain pesantren Wonokoyo di Purbolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Surabaya, pesantren Kademangan Bangkalan di Madura dan terakhir di pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Pada zaman itu adalah suatu hal yang biasa bahwa para santri mengikuti pelajaran atau mencari ilmu di beberapa pesantren. Hal ini antara lain dikarenakan masing-masing pesantren mempunyai kekhususan dalam mengajarkan ilmu agama, misalnya pesantren ini terkenal dengan pelajaran ilmu hadistnya sementara pesantren yang lain lebih terkenal dengan mata pelajaran ilmu fiqihnya. Tradisi pesantren yang demikian inilah yang memberi kesempatan kepada KH. Hasyim Asy'ari untuk belajar Tata Bahasa Arab dan Sastra Arab serta sufisme di pesantren Kademangan Bangkalan Madura kepada Kyai Khalil Bangkalan dan belajar ilmu fiqih secara mendalam kepada Kyai Ya'kub di pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo.

Dalam pengembaraannya menuntut ilmu di beberapa pesantren, KH. Hasyim Asy'ari yang oleh Allah SWT dikaruniai kecerdasan telah memperoleh berbagai macam ilmu, bahkan KH. Hasyim Asy'ari telah mahir dalam ilmu tauhid, fiqih, bahasa Arab, tafsir dan hadits. Tidaklah mengherankan ketika beliau berguru kepada Kyai Khalil Bangkalan, tidak berapa lama berguru disini, KH. Hasyim Asy'ari diperintah oleh Kyai Khalil, sang guru, untuk segera pulang dan mengamalkan atau mengajarkan ilmunya kepada orang lain, sebab ilmunya menurut sang guru dianggap sudah lebih dari cukup. Untuk memperluas dan memperdalam ilmunya KH. Hasyim Asy'ari melanjutkan studinya ke Makkah. Selama di Makkah, Hasyim muda berguru kepada beberapa ulama besar. Pada mulanya belajar dibawah bimbingan Syaikh Muhammad Maffudz At Turmusi, seorang ulama Indonesia pertama yang mengajar ilmu Hadits sahih Bukhari di Makkah. Syaikh Muhammad Mahfudz berasal dari Termas, ia ahli dalam bidang ilmu hadits bahkan merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima (isnad) hadits dari duapuluh tiga generasi penerima karya tersebut (Arifin, 1993). KH. Hasyim Asy'ari sangat tertarik dengan ilmu hadits tersebut yang pada zaman itu di Indonesia dianggap sebagai ilmu yang masih baru. Ketika KH. Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren yakni pesantren

Tebuireng beliau menitik beratkan pada pengembangan pengajaran ilmu hadits tersebut dan karenanya pesantren ini memiliki kekhususan dan terkenal dalam pengajaran ilmu haditsnya.

Selain ilmu hadits, KH. Hasyim Asy'ari juga memperoleh pelajaran tentang tareqat Qadiriyyah dan tareqat Naqsabandiyah dari Syaikh Muhammad Mahfudz At Turmusi. Sedangkan ilmu tareqat tersebut diperoleh Syaikh Mahfudz dari gurunya yakni Syaikh Nawawi yang berasal dari Banten. Dalam pada itu, Syaikh Nawawi menerima ilmu tareqat dari gurunya yakni Syaikh Ahmad Khatib dari Sambas, Kalimantan Barat, yang juga dikenal dengan sebutan Syaikh Sambas. Syaikh Sambas adalah seorang ulama sufi yang pertama kali menggabungkan ajaran tareqat Qadiriyyah dan Naqsabandiyah (Arifin, 1993). Syaikh Mahfudz At Turmusi adalah penghubung yang membentuk tradisi sufi yang menghubungkan Syaikh Nawawi Banten dan Syaikh Ahmad Khatib Sambas dengan KH. Hasyim Asy'ari. Dalam perjalanan hidup KH. Hasyim Asy'ari, pengaruh tradisi pemikiran bermadzhab dan pendekatan sufisme yang dipertahankan oleh Syaikh Ahmad Khatib Sambas mewarnai pemikiran keagamaan KH. Hasyim Asy'ari.

Kendatipun KH. Hasyim Asy'ari mengikuti satu tareqat, akan tetapi beliau menolak keras tareqat yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam. Sebagai contoh adalah sikap KH. Hasyim Asy'ari yang mengkritik keras sikap Kyai Romli dari Peterongan, Jombang, yang terlalu mengagung-agungkan atau mengkultuskan Kyai Khalil Bangkalan Madura sebagai wali. (Wahid, 1995). Sikap keras KH. Hasyim Asy'ari menolak praktek-praktek tareqat yang dianggapnya tidak murni Islami tersebut sangat boleh jadi dipengaruhi oleh ajaran gurunya yakni Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau. Guru KH. Hasyim Asy'ari yang satu ini adalah seorang ulama yang sangat keras melarang semua praktek-praktek tareqat. Namun demikian, berbeda dengan gurunya KH. Hasyim Asy'ari tidaklah menolak semua praktek-praktek tareqat atau sufisme melainkan hanya praktek-praktek tareqat yang menyimpang dari ajaran Islam sajalah yang beliau tolak.

Dari gurunya yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat inilah KH. Hasyim Asy'ari lebih mendalami ilmu fiqih madzhab Syafi'i. Selain ahli fiqih, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau juga terkenal

sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang ilmu falak (astronomi), ilmu hisab (berhitung) dan Al Jabar (Sacran, 1981).

Pada waktu KH. Hasyim Asy'ari belajar di Makkah, pada saat itu sedang terjadi proses pembaharuan dalam pemikiran Islam yang diperkenalkan pertama kali oleh Jamaluddin Al Afghani dan diteruskan oleh muridnya yang sangat terkenal sebagai pembaharu Islam yakni Syaikh Muhammad Abduh dari Mesir. Ide-ide pembaharuan Islam yang dilancarkan dari Mesir tersebut sangat menarik perhatian mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Makkah. Pada saat itu salah satu orang yang menjadi Imam Masjidil Haram untuk para penganut madzhab Syafi'i adalah Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau. Kepada beliau inilah banyak mahasiswa dari Indonesia belajar dan diantara mereka banyak yang menjadi ulama terkenal seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, H. Agus Salim, KH. Wahab Hasbullah dan sebagainya.

Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau juga dikenal sebagai seorang ulama yang liberal dan senantiasa memberi semangat bagi kemajuan dan pembaharuan dunia Islam. Meskipun demikian Syaikh Khatib Minangkabau kurang setuju dengan ide-ide pembaharuan dunia Islam yang dicanangkan Muhammad Abduh, terutama yang menyangkut pembentukan madzhab fiqih baru untuk menghapuskan madzhab fiqih yang lama. Ide pembaharuan Muhammad Abduh yang ingin membebaskan ummat Islam dari tradisi bermadzhab juga beliau tolak.

Sebagai seorang ulama yang liberal, Syaikh Minangkabau memperbolehkan murid-muridnya belajar dan mempelajari bahkan mengikuti pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh yang terkenal sebagai pembaharu Islam pada waktu itu. Banyak murid-murid Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau yang belajar mengenai pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh, diantaranya adalah KH. Ahmad Dahlan, pendiri organisasi sosial keagamaan yang dinamai Muhamadiyah. KH. Hasyim Asy'ari juga mempelajari pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh terutama melalui karya Abduh yang sangat terkenal yakni Tafsir Al Manar.

Meskipun KH. Hasyim Asy'ari memuji rasionalitas penafsiran Muhammad Abduh, akan tetapi karena Abduh mengejek para ulama

tradisionalis lantaran ulama-ulama tradisionalis tersebut mendukung praktek-praktik tarekat atau sufisme yang menurut Abdul tidak bisa diterima dalam Islam, maka KH. Hasyim Asy'ari tidak merekomendasikan kepada para santrinya untuk membaca kitab Tafsir Al Manar karya Muhammad Abdul tersebut (Bruinessen, 1995).

C. Kegiatan Sosial Politik KH. Hasyim Asy'ari

Perlawanan bersenjata kaum Muslimin terhadap kaum penjajah kolonial Belanda pada pertengahan abad ke 19, antara lain Perang Paderi di Minangkabau (1821-1837), Perang Diponegoro di Jawa (1825-1830) dan Perang Aceh (1873-1904), sudah barang tentu mempengaruhi pemuda Hasyim yang pada seperempat akhir abad 19 sudah tumbuh menjadi dewasa. Perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda tersebut di dorong oleh semangat yang kuat untuk mempertahankan Islam dan keinginan untuk memerdekakan Indonesia.

Upaya ummat Islam Indonesia melawan Belanda dengan perjuangan bersenjata tersebut kandas tanpa mendapatkan hasil sebagaimana dicita-citakan. Maka sejak saat itulah ummat Islam mulai merubah perjuangannya bukan lagi dengan mengangkat senjata melainkan melalui cara di bidang pendidikan dan budaya. Banyak diantara bekas pejuang yang berlaga di medan pertempuran bersenjata mendirikan lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama pondok pesantren. Lembaga pendidikan pesantren ini selain sebagai alat untuk perjuangan juga digunakan untuk menjaga budaya dan moral bangsa dari penetrasi budaya Barat (Wahid, 1974:50).

Meskipun kurikulum pesantren kurang menyinggung mengenai ide-ide politik dan kurang mendiskusikannya, akan tetapi bukan berarti masyarakat pesantren tidak punya kepedulian terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat Muslim pribumi sebagai akibat penjajahan. Masyarakat pesantren (para kyai dan para santri) tidak hanya berdakwah tetapi juga membimbing masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mereka dihadapi sehari-hari. Secara demikian para pemimpin pesantren sekaligus menjadi pemimpin informal pada masyarakat sekitarnya.

KH. Hasyim Asy'ari yang mengembara menuntut ilmu dari pesantren satu ke pesantren lainnya, telah mendapatkan pengalaman

yang berharga tentang bukan hanya kehidupan di dunia pesantren saja melainkan kehidupan didunia luar pesantren dimana kondisi umat Islam pribumi sangat memprihatinkan.

Kesadaran politik KH. Hasyim Asy'ari tumbuh dari dalam dunia pesantren sendiri dan dari luar pesantren. Dari dalam pesantren kesadaran akan betapa pentingnya nasionalisme tumbuh karena teman-temannya berasal dari berbagai daerah bahkan dari luar Jawa. Di luar pesantren beliau melihat kondisi umat Islam yang sangat memprihatinkan, dan bukan secara kebetulan pula bahwa pesantren-pesantren yang beliau singgahi adalah pesantren yang berada di sekitar pusat pergerakan nasional pada awal abad ke 20 yaitu Surabaya. Sudah barang tentu KH. Hasyim Asy'ari mengetahui ide-ide nasionalisme yang berkembang pada saat itu.

Kesadaran politik KH. Hasyim Asy'ari juga diperoleh melalui pergaulan beliau dengan umat Islam dari berbagai penjuru dunia, terutama ketika beliau berada di Makkah, dimana pada saat beliau berada disana, sedang gencar-gencarnya ide Pan Islamisme disebar-luaskan oleh Jamaluddin Al Afghani untuk membebaskan umat Islam dari cengkeraman kolonialisme Barat.

Sekembalinya dari Makkah, KH. Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren di sebuah dusun yaitu Tebuireng. Dari daerah pelosok inilah KH. Hasyim Asy'ari melakukan perlawanan budaya terhadap kolonial Belanda. Misalnya beliau melarang umat Islam meniru kebiasaan orang-orang Belanda memakai dasi. Walaupun orang Islam memakai dasi tetapi harus memakai kopiah, untuk membedakannya dengan orang kafir Belanda. KH. Hasyim Asy'ari juga menyerukan gerakan anti Belanda yang berakibat dbakarnya pesantren beliau oleh Belanda pada tahun 1913. Namun KH. Hasyim Asy'ari tetap berjuang mengobarkan api semangat anti Belanda. Namun beliau menganjurkan kepada para santri dan pengikutnya untuk tidak melakukan perlawanan secara konfrontasi terbuka terhadap pemerintah kolonial Belanda sebelum tiba saatnya yang tepat (Khuluq, 2000). KH. Hasyim Asy'ari dalam aktifitas sosial politiknya selalu mengingatkan masyarakat untuk menyadari hak-hak politik mereka yakni untuk hidup bebas dari penjajahan atau merdeka. Menurut KH. Hasyim Asy'ari kolonialisme asing hanya bisa dikalahkan dengan gerakan kebangkitan nasional

(Hadzik, 1999). Untuk itulah maka bersama dengan sejumlah kyai antara lain KH. Wahab Hasbullah dan KH. Ridwan, beliau mendirikan organisasi sosial keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama yang artinya Kebangkitan Ulama pada tanggal 31 Januari 1926.

Kegiatan politik KH. Hasyim Asy'ari yang cukup mengesankan terutama pada masalah pembinaan ukhuwah islamiyah. Beliau sangat prihatin melihat kondisi umat Islam di Indonesia pada waktu itu dimana telah terjadi pertentangan yang amat sengit antara golongan Islam tradisional dan modernis, bahkan begitu serunya pertentangan tersebut sehingga satu sama lain saling mengkafirkan. Sementara itu kebutuhan akan perlunya persatuan Indonesia sangatlah mendesak.

Maka dalam pidato beliau yang berjudul *Al Mawaizh* (Nasehat) yang disampaikan didepan Muktamar Nahdlatul Ulama ke XI di Banjarmasin pada tahun 1936, beliau menyerukan bahwa umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus meninggalkan fanatisme buta (*taqlid*) dan umat Islam harus mengesampingkan perbedaan pendapat dalam hal-hal yang tidak substansif untuk menghindari perpecahan yang merugikan umat Islam sendiri. Menurut KH. Hasyim Asy'ari apabila umat Islam terpecah belah maka yang diuntungkan adalah orang lain terutama kaum penjajah yang ingin tetap bercokol di bumi Nusantara.

Pidato KH. Hasyim Asy'ari tersebut, menurut seorang ulama modernis, Hamka (1959) adalah wasiat keagamaan yang sangat penting, bukan saja bagi warga nahdliyin tetapi juga bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Wasiat ini bukan hanya penting selama masa hidup Hadratusj-Sjaich, melainkan juga menjadi pedoman bagi setiap Muslim sepeninggal beliau. Terdorong oleh keinginan yang besar untuk mempersatukan umat Islam, maka KH. Hasyim Asy'ari merintis berdirinya wadah persatuan umat Islam Indonesia. Maka atas prakarsa dan dukungan sejumlah tokoh baik dari kalangan Islam modernis maupun tradisional didirikanlah Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI) pada tahun 1937. MIAI inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Masjoemi pada tahun 1945 dimana KH. Hasyim Asy'ari diangkat menjadi pemimpinnya (Ketua).

Peranan KH. Hasyim Asy'ari dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangat besar. Perjuangan

beliau melawan pemerintah kolonial Belanda sebenarnya sudah dimulai sejak beliau pulang dari tanah suci Makkah dan mendirikan pondok pesantren di Tebuireng. Pada mulanya KH. Hasyim Asy'ari cukup akomodatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sikap lunak ini sangat boleh jadi dipengaruhi oleh doktrin politik Sunni yang dianutnya yaitu yang akomodatif terhadap penguasa, terutama ketika tidak mampu berkonfrontasi secara terbuka. Tetapi sikap politik Sunni dapat pula berubah menjadi radikal terhadap penguasa ketika diperhitungkan sudah cukup mampu untuk melakukannya. KH. Hasyim Asy'ari bersikap radikal ketika kesempatan itu muncul menjelang masa berakhirnya penjajahan kolonial Belanda, tepatnya disaat Jepang akan datang. Di saat usianya semakin senja, KH. Hasyim Asy'ari justru semakin gigih berjuang. Pada waktu pemerintah kolonial Belanda menyatakan bahwa wilayah Indonesia dalam keadaan darurat perang dan merencanakan membentuk milisi Bumiputera tahun 1940, KH. Hasyim Asy'ari dan didukung oleh para kyai menolak rencana tersebut. Bahkan beliau mengharamkan dukungan terhadap Belanda dalam bentuk apapun (Hadzik, 1999). Perjuangan KH. Hasyim Asy'ari terus berlanjut ketika Jepang menguasai Indonesia. Beliau menolak segala bentuk Nipponisasi seperti menyanyikan lagu Kimigayo, kewajiban 'menyembah' Kaisar Jepang, Tenno Haika, yang dianggap sebagai titisan Dewa Matahari, dengan cara membungkukkan badan dalam-dalam dan menghadap ke negara Matahari Terbit tersebut, yang menurut KH. Hasyim Asy'ari hukumnya haram dilakukan.

Sesudah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, perjuangan KH. Hasyim Asy'ari tidak berhenti. Pada waktu tentara Belanda dengan membonceng tentara Sekutu kembali mau menjajah Indonesia, KH. Hasyim Asy'ari menyerukan jihad untuk mempertahankan negara Indonesia yang sudah merdeka dan telah mempunyai pemerintahan yang sah. Kepada umat Islam Indonesia, khususnya kepada warga nahdliyin, beliau memfardlu 'ainkan mereka yang berada pada radius 94 KM dari pusat pertempuran untuk mengangkat senjata melawan Belanda dan sekutunya yang akan kembali menjajah Indonesia. Sedangkan bagi umat Islam yang berada diluar radius 94 KM dari pusat pertempuran hukumnya fardlu kifayah.

3. Sikap Politik KH. Hasyim Asy'ari

Ide-ide politik (nasionalisme, kekuasaan dan negara) KH. Hasyim Asy'ari pada umumnya segaris dengan doktrin politik Sunni seperti yang dikembangkan oleh Al Mawardi dan Al Ghazali. Pada dasarnya doktrin politik Sunni tersebut sangat akomodatif terhadap penguasa. Hal ini terjadi karena pada waktu doktrin itu dirumuskan dunia politik Islam sedang mengalami kemunduran, yang pada akhirnya bermuara pada munculnya anggapan bahwa posisi rakyat lemah, dan mereka harus tunduk pada penguasa.

Sejalan dengan ini, KH. Hasyim Asy'ari dan juga tokoh Nahdlatul Ulama yang lain bersikap akomodatif pula terhadap penguasa, baik penguasa Muslim ataupun penguasa non Muslim. Hal ini dapat dilihat bagaimana sikap KH. Hasyim Asy'ari terhadap pemerintah kolonial Belanda yang non Muslim itu ketika menguasai Nusantara. KH. Hasyim Asy'ari tidak bersikap konfrontatif terhadap pemerintah kolonial Belanda sepanjang pemerintah kolonial Belanda tidak menghalang-halangi berlangsungnya perkembangan ajaran Islam. Demikian pula dengan sikap KH. Hasyim Asy'ari terhadap Pemerintahan Balatentara Nippon. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Besar Masyumi beliau menyerukan untuk mendukung Pemerintahan Balatentara Dai Nippon. Dukungan beliau didasarkan pada sikap pemerintahan Balatentara Nippon yang menghormati dan menghargai agama Islam. Dalam pidato beliau di pertemuan ulama se Jawa Barat beliau menyatakan;

Kita sekarang telah berada dibawah Pemerintahan Balatentara Nippon. Berhubung dengan itu, kita harus ingat akan sikap Pemerintah ini terhadap agama Islam. Karena Pemerintah telah mengumumkan berkali-kali, bahwa pendiriannya, ialah menghormati agama Islam dan menghargainya menurut nestinya..... Lagi pula ada satu hal yang patut disebutkan, yaitu Pemerintah sekarang ini suka berdekatan dengan ulamadan berkumpul-kumpul dengan merekadan mendengarkan pembicaraan mereka..... Lain dari itu, Pemerintah tidak berhentihentinya memperkuat negeri kita dan berusaha menjadikannya pusat kemakmuran dan benteng perjuangan yang teguh. Maka diadakannya Susunan Perekonomian baru, Keibondan, Seinendan, Tentara Pembela

Tanah Air dan lain-lain usaha. Maka kita harus membantu sungguh-sungguh pada usaha Pemerintah yang bagus-bagus.

Dalam pentas nasional pada masa pergerakan, sikap politik KH. Hasyim Asy'ari dalam rangka menumbuhkan semangat nasionalisme yang patut dicatat adalah ajakan beliau kepada seluruh umat Islam untuk bersatu dalam aksi bersama. Ajakan persatuan ini beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan karena pada waktu itu keadaan umat Islam di Nusantara sedang terpecah-pecah, sementara kebutuhan akan adanya persatuan bagi bangsa Indonesia sangatlah mendesak.

Pada Mukhtamar NU ke 11 yang berlangsung di Banjarmasin tahun 1936, KH. Hasyim Asy'ari menyampaikan pidato, al Mawaiz (Naschat) yang intinya berisi nasihat beliau untuk mendamaikan pertentangan antara golongan yang disebut kaum modernis dan tradisional. Konflik yang terjadi antara golongan ini sudah demikian serius. Masing-masing pihak menuduh pihak lain sebagai pihak yang telah keluar dari Islam. Dalam pidatonya itu KH. Hasyim Asy'ari mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk memelihara tali persaudaraan diantara mereka. Dalam pidatonya beliau menyatakan :

Manusia harus bersatu... agar tercipta kebaikan dan kesejahteraan dan agar terhindar dari kehancuran dan bahaya. Jadi kesamaan dan keserasian pendapat mengenai penyelesaian beberapa masalah adalah prasyarat terciptanya kemakmuran. Ini juga akan dapat mengokokhkan rasa kasih sayang. Adanya persatuan dan kesatuan telah menghasilkan kebajikan dan keberhasilan. Persatuan juga telah mendorong kesejahteraan negara, peningkatan status rakyat, kemajuan dan kekuatan pemerintah, dan telah terbukti sebagai alat untuk mencapai kesempurnaan. Satu dari banyak tujuan persatuan adalah bersemainya kebajikan yang akan menjadi sebab terlaksananya berbagai ide.

Pidato KH. Hasyim Asy'ari ini menggugah hati para ulama dan tokoh-tokoh Islam dari berbagai kalangan, baik yang modernis, tradisional maupun yang netral. Pidatonya itu juga dianggap nasihat keagamaan yang sangat berharga bukan saja bagi golongan nahdliyin tetapi juga bagi seluruh umat Islam Indonesia. Tak kurang seorang ulama modernis, Hamka, sangat kagum dan menghargai pidato tersebut yang dinilainya merupakan wasiat keagamaan yang sangat penting tidak

saja bagi para anggota NU tetapi juga bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Wasiat ini tidak saja penting selama masa hidup Hadratusy-Syaikh Hasyim Asy'ari, tetapi juga menjadi pedoman bagi setiap Muslim Indonesia setelah kepergian beliau.

Dalam Muktamar NU berikutnya yang dihadiri oleh para pemimpin dari berbagai organisasi lain termasuk dari golongan modernis, KH. Hasyim Asy'ari mengemukakan lagi pidatonya itu. Untuk lebih memantapkan hati saudara-saudaranya sesama Muslim agar bersatu-padu maka dalam pidatonya beliau kemukakan ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits. Dalam pidatonya beliau menjelaskan bahkan mengakui bahwa masyarakat Muslim telah gagal bersatu sejak zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, ketika kaum Muhajirin (imigran Mekah) dan Anshor (Muslim Madinah) berebut supremasi politik (Madjid, 1986). Akan tetapi bukan berarti kita lantas tidak mau berusaha untuk tercapainya persatuan diantara kita. Oleh karena itu, KH. Hasyim Asy'ari menganjurkan umat Islam untuk senantiasa berusaha menyatukan diri sendiri. KH. Hasyim Asy'ari tidak henti-hentinya mengemukakan ajakan persatuan ini. Buktinya setelah kemerdekaan Indonesia diproklamkan beliau masih terus mengemukakan ajakan persatuan tersebut. Dalam Pidato Pembukaan Muktamar NU Ke 17, KH. Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa "Persaudaraan Muslim sepertinya telah menghilang dari masyarakat. Buktinya, walaupun banyak sesama saudara seagama dalam kelaparan tidak ada orang yang tergerak untuk membantu".

KH. Hasyim Asy'ari sangat peduli pada kondisi politik umat Islam. Selama masa pergerakan dan terutama masa awal kemerdekaan Indonesia, beliau merasa sedih karena beberapa orang berusaha menggunakan Islam sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. KH. Hasyim Asy'ari mengatakan :

"Kita menemukan bahwa peran masyarakat Muslim dalam arena politik ini sangat tidak penting. Pengaruh agama dalam arena politik Indonesia sangat lemah, bahkan mati. Bahkan ada bahaya yang lebih besar lagi yaitu Islam telah digunakan oleh sebagian orang sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuan dan harapan-harapan mereka baik dalam bidang politik maupun pribadi. Sangatlah berbahaya bila

masyarakat memandang mereka yang tindakannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebagai Muslim.

KH. Hasyim Asy'ari membandingkan kondisi politik pada masa itu dengan kondisi politik pada zaman awal kemunculan Islam. Beliau percaya bahwa fondasi politik pemerintahan Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah S.A. W. , dan kemudian diikuti oleh sahabat beliau yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib pada dasarnya mempunyai tiga tujuan utama yakni;

1. Memberi persamaan bagi setiap individu Muslim.
2. Melayani kepentingan rakyat dengan jalan perundingan
3. Menjaga keadilan

Fondasi politik itu sendiri dibangun ketika Rasulullah s.a.w. mendirikan negara Madinah pada tahun pertama hijrah atau tahun 622 Maschi. Dasar dan sarana utama pendiriannya adalah konstitusi Madinah yang disusun oleh Nabi sendiri (Hamidullah, 1970 ; Kurdi, 1985). Konstitusi ini menyatukan tiga kelompok orang yaitu para pengikut Nabi s.a.w. yang datang bersama beliau dari Makkah (kaum Muhajirin), para pengikut beliau yang merupakan penduduk asli Madinah (kaum Anshar) dan kawan-kawan, sekutu-sekutu serta pengikut –pengikut dari kedua kelompok tersebut termasuk beberapa suku Yahudi. Dokumen itu menyatakan bahwa ketiga kelompok itu merupakan satu komunitas (ummah) yang berbeda dari rakyat lainnya. Dengan demikian dokumen itu menyatukan orang-orang Muslim dan non Muslim, penduduk setempat dan para pendatang, untuk saling melindungi dari serangan luar, mematuhi keputusan hakim yang sama dalam pertikaian antar suku dan permusuhan, dan mendukung aktifitas-aktifitas legislatif dan yudikatif.

Menurut Hussain dan Kamali tujuan utama konstitusi Madinah adalah hubungan dan kerjasama sukarela. Ketika konstitusi itu pertama kali disusun, Nabi Muhammad tidak mempunyai kekuasaan politik; beliau semata-mata hanyalah pemimpin kaum Muhajirin yang tergantung pada dukungan penduduk asli Madinah. Oleh karena itu, tidak mungkin beliau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun juga untuk

membuat kelompok-kelompok yang berlainan dari penduduk Madinah menerima suatu sistem hubungan timbal balik yang sementara beliau menjanjikan pada mereka keuntungan-keuntungan kolektif tertentu, tetapi sekaligus juga menghapuskan adat-istiadat dan tradisi-tradisi suku yang telah lama mapan dan mereka pegang teguh. Apalagi hal ini tidak akan dapat membantu beliau untuk membangun jenis masyarakat yang beliau inginkan yaitu suatu masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia bebas yang berpegang pada nilai-nilai keadilan, kesamaan, persaudaraan, perdamaian (Hussain dan A.H. Kamali, 1977:4).

4. Pandangan KH.Hasyim Asy'ari Tentang Hubungan Agama Dan Nasionalisme Dan Negara

Dalam pandangan KH. Hasyim Asy'ari, agama Islam bukan saja berusaha membebaskan manusia dari menyembah selain Allah SWT dan membimbingnya kearah menyembah satu Tuhan (Tauhid), akan tetapi juga memajukan aspek-aspek sosial politik dan ekonomi, terutama pada masyarakat yang terbelakang. Dalam pada itu untuk mengembangkan dan memajukan aspek-aspek sosial, politik dan ekonomi tersebut sudah barang tentu diperlukan adanya suatu institusi yang dapat mengatur berlangsungnya proses tersebut seperti institusi yang namanya negara. Secara demikian, KH. Hasyim Asy'ari memandang bahwa agama bukan hanya mengurus masalah akherat saja (hablun minallah= hubungan antara manusia dengan Allah) akan tetapi juga menyangkut masalah dunia (hablun minannas= hubungan antara manusia dengan sesamanya). Lebih jauh beliau memandang bahwa institusi negara adalah sesuatu keharusan untuk menjamin ketertiban agama. Ketertiban agama tergantung pada ketertiban dunia. Sedangkan ketertiban dunia tergantung pada lembaga kekuasaan politik (negara) yang dipatuhi. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa hubungan antara agama dan negara tidak bisa dipisahkan.

Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tersebut tampaknya dilandasi atau merujuk pada pemikiran ulama Sunni yang cukup terkenal yaitu Ali bin Hasan Al Mawardi (991-1031) dan Abu Hamid Al Ghazali (w. 1111). Menurut Al Mawardi, imamah atau kekhalfahan atau pemerintahan negara dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Membangun institusi imamah (negara) adalah suatu kewajiban. Dalam pada itu menurut Al Ghazali,

khilafat, imamah atau pemerintahan negara dibentuk bukan karena pertimbangan akal, melainkan dari pertimbangan syariah dengan menggunakan pendekatan akal. Perlu diketahui bahwa imamah membawa manfaat dan tanpa itu akan timbul bencana dan malapetaka dikarenakan kehidupan masyarakat tidak teratur dan tidak terpinpin. Tujuan Syari'ah menurut Al Ghazali adalah ketertiban agama (nizaamuddin). Lebih jauh Al Ghazali berpandangan bahwa ketertiban agama tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya imamah yang ditaati. Oleh karena itu jika ketertiban agama adalah suatu keharusan, maka demikian pula dengan ketertiban imamah adalah keharusan. Al Ghazali menambahkan bahwa ketertiban agama berupa ibadah dan ma'rifah tidak mungkin dilakukan tanpa badan yang sehat, adanya kehidupan yang teratur, terpenuhinya kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan (pakaian, makan dan tempat tinggal) dan lain-lain. Ketertiban agama tergantung pada semua itu. Dengan kata lain inilah yang dimaksudkan dengan ketertiban agama tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya ketertiban dunia. Sedangkan ketertiban dunia ini tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya imamah yang ditaati. Bukankah keamanan jiwa, harta, kehormatan dan ketertiban kehidupan sosial secara luas sangat membutuhkan lembaga kekuasaan yang dipatuhi semua pihak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa agama adalah dasar(fondasi) dan khalifah adalah pelindung (haaris), sedangkan sesuatu tanpa dasar akan runtuh dan tanpa pelindung ia akan sia-sia. Dengan demikian sangat jelas bahwa kekuasaan politik (negara) adalah suatu keharusan bagi ketertiban dunia, dan ketertiban dunia merupakan keharusan bagi kebahagiaan di akherat.

Meskipun Al Mawardi dan Al Ghazali menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu Al Mawardi dengan pendekatan Fiqih dan Al Ghazali dengan pendekatan mantiq (logika), akan tetapi keduanya sependapat bahwa imamah, kekhalifahan atau pemerintahan negara adalah suatu kemestian yang tidak ada jalan lain untuk menghindarinya kecuali melaksanakannya untuk menjamin ketertiban agama (Haidar, 1998).

Pandangan KH. Hasyim Asy'ari mengenai Negara berpedoman pada ajaran Nabi dimana Nabi tidak menentukan bentuk suatu negara. Lebih jauh beliau menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Islam tidak ditentukan. Ketika yang kita hormati Nabi Muhammad s.a.w. meninggal

dunia, beliau tidak meninggalkan pesan apapun mengenai bagaimana memilih kepala negara. Jadi mengenai pemilihan kepala negara dan banyak hal lagi tentang kenegaraan tidak ditentukan, dan umat Islam tidak terikat untuk mengikuti suatu sistem. Semua sistem dapat dilaksanakan pada masyarakat Islam pada setiap tempat (Hasyim, 1944: 3-5).

Kendati demikian, beliau menekankan bahwa ajaran Islam tidak akan dapat berjalan dengan baik selama kepentingan masyarakat Islam terpecah-pecah. Oleh sebab itu, KH. Hasyim Asy'ari menganggap bahwa tujuan akhir politik Islam di Indonesia adalah pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya di bibir saja. Beliau secara tegas menyatakan "Kita, masyarakat Islam Indonesia tidak ingin memperebutkan posisi kepemimpinan, kita hanya ingin mereka yang menduduki dan memegang kepemimpinan negeri ini melaksanakan ajaran Islam yang telah diperintahkan oleh Allah Maha Suci dan Agung.

Pandangan KH. Hasyim Asy'ari ini tampaknya mengacu pada sistem pemerintahan negara yang dibangun oleh Nabi Muhammad S.A.W. yaitu negara Madinah yang merupakan suatu negara yang berdasarkan ketentuan-ketentuan al Qur'an dan praktek Sunnah. Setelah Nabi Muhammad S.A.W. wafat, negara itu dikonsolidasikan dan diperintah oleh empat Khalifah yang dikenal dengan sebutan Khalifah ur Rasyidin dalam mana praktek-praktek dan metoda-metoda mereka juga dianggap sebagai bagian dari model negara Islam Madinah.

Ketika timbul masalah siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin negara Madinah, beliau menyerahkannya pada keputusan para pengikutnya. Rasulullah S.A.W. tidak meninggalkan pesan apapun mengenai bagaimana cara memilih pemimpin negara dan siapa yang harus memimpin negara serta hal-hal yang berhubungan dengan kenegaraan. Apakah ini ada hubungannya dengan Firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau lebih mengetahui urusan duniamu?

Negara yang telah didirikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. dan yang sesudah itu dipimpin oleh Khalifah ur-Rasyidin, dengan sistem pemerintahan yang dihasilkan merupakan paradigma dasar suatu negara Islam. Kesederhanaan penanganan politik Rasulullah S.A.W. untuk

menyelesaikan masalah-masalah negara dan penolakan beliau untuk meninggalkan petunjuk-petunjuk administrasi yang mendetail merupakan isyarat bahwa beliau tidak ingin terlalu mencampuradukkan Kenabian dan wahyu yang beliau terima dengan urusan pemerintahan negara. Dengan demikian, beliau memberi tanggung jawab kepada generasi-generasi Muslim yang akan datang untuk menyusun struktur - struktur politik yang paling sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan meninggalkan pijakan terbaik bagi perwujudan pesan beliau yang optimum (Sardar, 1987).

Pandangan KH. Hasyim Asy'ari tentang Negara agaknya mengacu pada pemikiran tersebut diatas. Dengan kata lain beliau menganggap tidak ada ketentuan yang baku untuk membentuk suatu negara, demikian halnya dengan kepemimpinan negara, bagaimana cara memilih pemimpin negara dan siapakah yang berhak memimpin negara. Sebab Rosulullah S.A.W. sendiri telah memberikan kebebasan kepada generasi-generasi Muslim yang akan datang untuk menyusun struktur politik yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat generasi tersebut. Hal ini juga dikarenakan bahwa paradigma negara Islam didasarkan pada suatu struktur 'negara' yang sangat sederhana dan ia juga tidak mewakili bentuk pemerintahan manapun. Paradigma terbuka itulah yang menyediakan kerangka garis-garis pedoman minimum, beberapa prinsip dasar, seperti tekanan kuat pada musyawarah dan persetujuan komunitas untuk sampai pada kepemimpinan politik, yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengembangkan suatu model negara Islam yang sesuai dengan realitas masa kini.

Pada mulanya KH. Hasyim Asy'ari bukanlah seorang aktivis politik, bahkan beliau dianggap bukan musuh utama oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan sikapnya terhadap pemerintah kolonial Belanda tidak menunjukkan bermusuhan, bagi beliau sepanjang pemerintah kolonial Belanda tidak membahayakan bagi kepentinganberlangsungnya ajaran-ajaran Islam tidak ada alasan untuk merasa keberatan menerima kebijakan pemerintah kolonial tersebut. Sikap KH. Hasyim Asy'ari ini mungkin didasari pada ajaran Rosulullah S.A.W. yang tidak mempersoalkan bagaimana bentuk pemerintahan suatu negara, siapa yang menjadi pemimpinnya dan lain sebagainya sebagaimana dijelaskan diatas.

Berbeda dengan H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, pemimpin utama Syarekat Islam, dan Ir. Soekarno, pendiri Partai Nasional Indonesia, yang mengkonsentrasikan diri pada isu-isu politik dan bergerak secara terang-terangan selama beberapa tahun untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, KH. Hasyim Asy'ari dapat dianggap sebagai pemimpin spiritual bagi sejumlah tokoh politik. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa banyak tokoh militer, termasuk Jenderal Sudirman, panglima tertinggi pada masa revolusi sering mengutus kurir mereka untuk selalu berhubungan dengan KH. Hasyim Asy'ari untuk memberitahu situasi di medan pertempuran. Lebih-lebih para anggota laskar santri seperti Hizbullah dan Sabilillah, mereka lebih sering berhubungan dengan beliau.

Aktifitas politik KH. Hasyim Asy'ari hingga akhir hayatnya boleh dikatakan lebih bersifat *low profile*. Beliau hampir tidak pernah secara terbuka atau konfrontatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Aktifitas politik beliau yang menonjol pada waktu itu adalah mendirikan organisasi sosial keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama yang artinya Kebangkitan Ulama. Dibawah kepemimpinan beliau, Nahdlatul Ulama memusatkan kegiatannya pada usaha meningkatkan kemajuan pendidikan Islam, meningkatkan kegiatan-kegiatan sosio keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Ketika umat Islam kalah dalam perjuangan bersenjata melawan kolonial Belanda, maka perjuangan berubah menjadi perjuangan melalui pendidikan dan kebudayaan. Bekas pengikut pertempuran banyak yang mendirikan lembaga pendidikan yang disebut pondok pesantren. Lembaga pendidikan pesantren ini digunakan untuk menjaga dan mempertahankan budaya dan moral bangsa dari tekanan budaya Barat (Wahid, 1974: 50). Dalam pesantren itu, bukan hanya tradisi Islam murni yang dijaga dan dikembangkan melainkan juga untuk mengimbangi pendidikan Barat yang dikembangkan oleh Belanda guna menjaga dan melestarikan penjajahannya dengan cara mengarahkan pola berpikir penduduknya. Bukan hanya dengan cara itu saja pemerintah kolonial Belanda menjaga dan melestarikan penjajahannya, melainkan dengan cara mengajak sebagian orang Indonesia, khususnya para priyayi dan juga sebagian santri Muslim seperti para penghulu untuk beradaptasi dan mendukung pemerintahan kolonial Belanda. Sudah

barang tentu adanya dua macam respon yang berlainan terhadap pemerintah kolonial Belanda tersebut berpengaruh terhadap pandangan KH. Hasyim Asy'ari terhadap kekuasaan penjajah Belanda. Berdasarkan ajaran Sunni yang dianutnya yakni selalu mengambil posisi tengah atau jalan tengah (*tawassut*), KH. Hasyim Asy'ari tentu menyimpan perasaan anti Belanda yang didapat dari lingkungan dan para guru beliau yang sebagian adalah pelaku perjuangan bersenjata. Dengan demikian KH. Hasyim Asy'ari tidak secara konfrontatif melawan Belanda tetapi beliau juga tidak bekerjasama dengan Belanda.

Tiga ratus tahun lebih setelah Rasulullah S.A.W. mendirikan tatanan sosio-politik Islam di Madinah, kemudian muncul para pemikir hukum yang berspekulasi menyusun teori politik mereka secara lebih sistematis. Sebelumnya tidak diketemukan suatu pemikiran politik yang jelas. Beberapa pemikir terkenal dari golongan sunni adalah Ali Ibn Hasan al Mawardi (991-1031) dan Abu Hamid al Ghazali yang wafat tahun 1111 Masehi).

Dari dua nama ulama terkemuka inilah beberapa pandangan politik Islam di Indonesia, terutama kalangan Islam tradisional, Nahdlatul Ulama, mendasarkan rujukan mereka. Al Mawardi adalah pengikut mazhab Syafi'i yang memulai kariernya sebagai guru dan hakim di berbagai tempat dan terakhir menjadi qadi al-qudat. Karyanya yang sangat terkenal adalah *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah* yang kini sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Fadhli Bahri. Dalam buku karyanya tersebut, Al Mawardi menerangkan bahwa sesungguhnya imamah (khalifah) diproyeksikan untuk mengganti peran kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas tersebut kepada ummat adalah wajib berdasarkan konsensus ulama (*ijma*) (Al Mawardi, 2000:1).

Dalam hal kewajiban mengangkat seseorang untuk dijadikan sebagai imam (khalifah) ada dua macam pendapat yang berbeda. Sebagian orang berpendapat bahwa pengangkatan imam (khalifah) adalah wajib menurut akal, karena watak orang-orang berakal cenderung tunduk kepada imam (khalifah) yang melindungi mereka dari segala macam ketidakadilan, memutuskan pertentangan diantara mereka. Tanpa

khalifah manusia berada dalam keadaan chaos, dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa pengangkatan imam (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan Syariah dan bukan berdasarkan akal. Sebab khalifah itu bertugas mengurus urusan-urusan agama, dan boleh jadi akal tidak menganggap imamah (kepemimpinan) sebagai ibadah sehingga tidak mewajibkan kepemimpinan tersebut. Dalam perbedaan tersebut sebenarnya harus kita kembalikan kepada hukum fikih yang selalu mendasarkan diri pada dalil Aqli dan dalil Naqli. Dengan demikian keduanya sebenarnya saling melengkapi.

Dalil Naqli yang digunakan dalam hubungan imamah ini adalah Al Qur'an surat An Nisa ayat 59 Allah berfirman ;

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian “.

Pada ayat diatas jelas sekali, Allah Ta'ala mewajibkan kita mentaati ulil amri diantara kita dan ulil amri yang dimaksud adalah imam (khalifah) yang memerintah kita semua. Dalam pada itu, Abu Hamid Al-Ghazali, seorang ulama sufi yang termasyhur, dalam kajiannya tentang teologi, dia juga mengungkapkan satu bab mengenai imamah, yang diakuinya sebagai bagian dari kajian fikih. Akan tetapi karena dasar argumentasinya berhubungan dengan logika yang menyangkut dasar pokok agama yakni ushuluddin, maka pembahasan tentang imamah dimuat dalam salah satu bab dalam karyanya yang berjudul “Al -Iqtisaad fi al-I'tiqaad. Menurut Al-Ghazali imamah dibentuk bukan karena pertimbangan akal, melainkan karena pertimbangan syari'ah dengan menggunakan pendekatan akal. Selanjutnya dia menegaskan bahwa ketertiban agama sulit bisa terwujud bilamana tidak ada imamah yang ditaati, oleh sebab itu bilamana ketertiban agama merupakan suatu keharusan, maka demikian juga dengan ketertiban imamah. Lebih jauh dia menjelaskan bahwa ketertiban agama berupa ma'rifah dan ibadah tidak mungkin dilakukan tanpa badan yang sehat, adanya kehidupan yang teratur, terpenuhinya kebutuhan hidup seperti pakaian, makan, dan tempat, dan lain-lain. Ketertiban agama tergantung pada semua ini. Dengan kata lain, itulah yang dimaksud bahwa ketertiban agama tidak mungkin bisa berlangsung tanpa ketertiban dunia. Dan demikian pula sebaliknya, ketertiban dunia tidak

mungkin bisa terlaksana tanpa khalifah (imamah) yang ditaati. Bagaimanapun juga keamanan jiwa, harta, kehormatan, dan ketertiban kehidupan kemasyarakatan secara luas memerlukan lembaga kekuasaan (politik) yang ditaati semua pihak. Oleh sebab itu dapat dikatakan, bahwa agama adalah dasar (azas) dan khalifah adalah pelindung (haaris). Sesuatu tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa pelindung akan sia-sia. Dengan demikian cukup jelas bahwa khalifah (kekuasaan politik) adalah suatu keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi kebahagiaan akhirat. Al-Ghazali menegaskan bahwa inilah tujuan misi para nabi yang pasti. Dengan pendekatan silogistis ini Al-Ghazali berkesimpulan bahwa imamah adalah suatu kewajiban syari'ah dan tidak ada jalan lain untuk meninggalkannya kecuali melaksanakannya.

Meskipun pendapat ini tidak langsung dari KH. Hasyim Asy'ari tetapi karena pendapat ini berasal dari hasil musyawarah Nahdlatul Ulama dimana beliau adalah Rois Akbar organisasi tersebut, sehingga pendapat tersebut juga diketahui dan disetujui oleh beliau, tentang konsep bentuk negara. Berdasarkan ketetapan pada muktamar NU ke 36 di Banjarmasin, ditetapkan bahwa daerah Jawa dalam arti Nusantara adalah daerah Islam (Negara Islam) meskipun daerah tersebut pada masa itu dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ada dua hal penting yang menjadi pertimbangan untuk menetapkan bahwa Nusantara adalah negara Islam. Pertama, sebelum dijajah oleh Belanda daerah tersebut telah dikuasai oleh kerajaan Islam dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Kalau daerah tersebut akhirnya dikuasai oleh Belanda dan secara politik ummat Islam tidak mampu mengusirnya, bukan berarti status daerah tersebut berubah tetapi ia tetap sebagai daerah Islam. Kedua, ummat Islam di kawasan Nusantara dapat menjalankan agamanya dan melaksanakan hukum Islam tanpa terusik meskipun secara formal kekuasaan politik berada di tangan pemerintah kolonial Belanda. (keputusan Muktamar NU, 1936).

5. Kesimpulan

KH. Hasyim Asya'ari memandang bahwa hubungan antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Sebab Islam bukan saja berusaha membebaskan manusia dari menyembah selain Allah SWT dan membimbingnya kearah menyembah satu Tuhan (Tauhid) akan tetapi juga memajukan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Sedangkan untuk memajukan aspek-aspek tersebut sangat diperlukan adanya suatu institusi yang mengatur jalannya proses tersebut yang dinamai negara. Sebab ketertiban agama berupa ibadah dan ma'rifah tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik tanpa badan yang sehat, adanya kehidupan yang teratur, terpenuhinya kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan, dan lain-lain. Ketertiban agama tergantung pada semua ini. Dengan kata lain dapat dinyatakan inilah yang dimaksud dengan ketertiban agama tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa ketertiban dunia. Dan mengenai ketertiban dunia ini mustahil bisa terwujud tanpa kekuasaan politik yang ditaati semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (ed), *Sejarah Ummat Islam di Indonesia*, Jakarta, MUI, 1991
- Ahmad, Mumtaz (ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung, Mizan , 1996
- Akarhanaf, *Kiai Hasjim Asj'ari Bapak Ummat Islam Indonesia*, Djombang: Pondok Pesantren Tebuireng, 1950.
- Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesanterne Tebuireng*, Malang, Kalimashada Press, 1993.
- Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat. Bandung*, Mizan, 1995
- Budiardjo, Meriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta, Gramedia, 1988.
- Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesanterne, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta LP3ES, 1983.
- Eickelman, Dale F. dan Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim, Bandung*: Mizan, 1996.
- El-Affendi, Abdelwahab, *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hadzik, M Isham (ed), *Hasyim Asy'ari Ziyadat ta'fiqat 'ala manzumat al-shaikh 'Abdullah bin Yasin Al-Fasuruwani, Jombang : Maktabat al Turath al Islami bi Ma'had Tebuireng*, 1995.
- Hadzik, M. Ishom, *Mengenal K.H. Hasyim Asy'ari dan Pondok Pesantren Tebuireng*, Jombang, Pustaka Warisan Islam dan Pondok Pesantren Tebuireng, 1999.
- Hamidullah, Muhammad, *The First Constitution in the World, Lahore*: Ashraf, 1970.

- Hasyim, A. Wahid, "Tjatjat kita" *Djawa Baroe*, 2, no. 16 (15 Agustus 1944).
- Hussain, H. Hadi dan A.H. Kamali, *The Nature of the Islamic State*, Karachi: National Book Foundation, 1977.
- Khuluq, Lathiful, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Kurdi, A. A, *The Islamic State: A Study Based on the Holy Cinstitutions*, London, Mansell, 1985.
- Sacran, Nursal, *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*, Padang: Islamic Centre Sumatera Barat, 1981.
- Sardar, Ziauddin, *Masa Depan Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- Syihab, Muhammad Asad, *Hadllaratussyaikh Muhammad Hasyim Asy'arie, Perintis Kemerdekaan Indonesia (alih bahasa K.H. A. Mustofa Bisri)*, Kurnia Kalam Semesta-Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1994.
- Wahid, Abdurrahman, "Pesantren Sebagai Subkultur," dalam *Pesantren dan Pembaharuan*, M. Dawam Rahardjo(ed), Jakarta : LP3ES, 1974.
- Wahid, Abdurrahman, "KH. Bisri Syansuri: Pecinta Fiqh Sepanjang Hayat" dalam *Biografi 5 Rais 'Am NU, Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS(ed)*, Yogyakarta: LTn NU dan Pustaka Pelajar, 1995.
- Suhelmi, Ahmad, *Soekarno Versus Natsir*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Varma, S.P., *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali, 1992.

WACANA NATSIR MENGENAI HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

Dwi Purwoko

1. Pendahuluan

Kajian mengenai Natsir selalu menarik, baik mengenai kepribadiannya, sikapnya maupun pemikirannya. Untuk yang terakhir ini, Natsir telah menampakkan kepiawaiannya sejak ia berusia muda. Ia termasuk orang yang gemar membaca buku-buku yang serius hingga mempunyai dasar ilmiah ketika ia berhadapan dengan lawan bicara maupun lawan pemikirannya terutama pada periode pergerakan nasional.¹

Pemikirannya tidak hanya mendapat respons dari rekan-rekannya yang sealiran dengannya tapi juga dari lawan pemikirannya. Discourse yang terjadi pada masa pergerakan nasional ketika ia dan tokoh pergerakan nasional lainnya sedang mencari bentuk ideal dari sebuah ideologi negara merupakan sebuah wacana diskusi yang kreatif dan demokratis.

Natsir yang masuk dalam katagori gerakan islam modern tampak intens dalam perdebatannya dengan kelompok nasionalis di seputar perdebatannya mengenai bentuk negara yang ideal. Demikian juga dengan kekuatan politik lainnya yang memperjuangkan bentuk ideologi semisal komunis, Natsir juga memberi respons yang terbalik terhadap ideologi ini. Namun tak dapat disangkal perjuangan PKI memberikan alternatif ideologi tersendiri dalam sejarah perjalanan bangsa, meskipun harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan Islam terutama dengan kekuatan Masyumi di mana Natsir pernah menjadi pemimpinnya.

¹ Yusril Ihza Mahendra menyebut Natsir sebagai pribadi yang penuh pesona. Kepribadiannya serta prilaku politiknya dalam sejarah seringkali menjadi bahan kajian para sejarawan maupun ilmuwan politik (Lihat Anwar Harjono dkk, *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hal.1).

Pemikiran Natsir tentang hubungan agama dan negara mempunyai "pengaruh" terhadap diskusi mengenai hubungan agama dan negara hingga periode selanjutnya, mungkin hingga kini. Ini merupakan indikator bahwa pemikiran Natsir mempunyai bobot yang tinggi.

Permikirannya dapat ditelusuri pada buku, artikel yang tertulis di surat kabar, majalah dan sebagainya.² Merekonstruksi pemikiran yang mempunyai nilai historis inilah yang menyebabkan perlunya penelitian ini dilakukan.

Pembatasan periode sejarah yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah periode pergerakan nasional. Periode ini terutama masa akhir kekuasaan penjajah Belanda ditandai dengan pertumbuhan cepat baik secara politik sebagai hasil perubahan sosial dan ekonomi, dampak dari gaya pendidikan modern Barat serta gagasan pembaruan Islam yang berkembang dalam masyarakat. Zaman ini juga ditandai dengan munculnya pemikir-pemikir dan pemimpin organisasi Islam, seperti H. Agus Salim, Soekarno, Natsir dll³.

Dalam memahami perkembangan masyarakat pada periode tersebut perlu juga mengetahui pemikiran yang dihasilkan oleh golongan pemikir yang biasanya adalah kalangan elit dan tokoh. Teori SP Varma menyatakan bahwa peranan golongan pemikir, dan biasanya dari kalangan elit dan tokoh sangat besar pengaruhnya dalam proses perkembangan masyarakat⁴. Natsir adalah merupakan bagian dari tokoh/pemikir/elit Islam Indonesia .

² Meskipun sepanjang hidupnya Natsir tidak mempunyai karya yang utuh tentang pandangannya mengenai Islam dan negara secara sistematis dan integratif, namun warisan tulisannya yang terdiceritakan dipublikasikan baik majalah, artikel, tesis dan karya ilmiah lainnya akan amat membantu dalam upaya merekonstruksi pemikirannya mengenai Islam dan negara (Yusril Iha Mahendra, "Mohammad Natsir: Sumbangan pemikirannya tentang pendidikan dan Dakwah Islam," dalam *Seminar Sehari Menyongsong 50 Tahun Indonesia Merdeka dan mengenang Mohammad Natsir*, Padang: Yayasan kebangkitan Islam, 15 Juli 1995 hal. 6.

³ Zadni Muchtarom, *Santri dan Abangan di Jawa*, Jakarta: INIS, 1988, hal.37.

⁴ SP Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali, 1992 hal.503.

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa konsep Natsir mengenai hubungan agama dan negara ketika kondisi Indonesia sedang terjadi eksploitasi negara kolonial (pemerintah "kafir") melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang kebanyakan adalah muslim terjajah pada periode pergerakan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran Natsir mengenai hubungan agama dan negara pada periode pergerakan nasional. Hasil rekonstruksi tersebut akan menambah khazanah kajian mengenai wawasan pemikiran Islam di Indonesia terutama pada masa pergerakan nasional. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat memahami perkembangan pemikiran Islam terutama pada masa pergerakan nasional dan juga dapat memahami dinamika pergulatan pemikiran yang berkembang ketika itu antara pemikir yang berideologi Islam, Nasionalis maupun Komunis.⁵

Munculnya konsepsi Islam dalam membicarakan mengenai masalah negara hanya mungkin muncul ketika terjadi rasa ketertindasan baik secara sosial, ekonomi maupun politik dirasakan oleh ummat Islam. Seperti dalam pengalaman-pengalaman yang telah lalu, para pemikir dan aktivisnya akan mencari penyelamatan ke dalam, dalam corak Islam yang holistik dan totalistik untuk menentang negara yang makin pongah.⁶

Ketertindasan tersebut tampak pada periode pergerakan nasional ketika kekuasaan asing melakukan penetrasi terhadap negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim terutama kepulauan Nusantara. Tidaklah mengherankan bila agama (Islam)

⁵ Mungkin tujuan ini termasuk dalam katagori untuk rekonstruksi sejarah pemikiran yang mencoba mengembangkan "fakta" tentang siapa menulis apa dan bilamana, dalam bentuk apa dipublikasikan, dan pula tentang fakta-fakta yang sama tentang apa yang dihasilkan dalam media budaya (Crane Brinton, "Sejarah Intelektual", dalam Taufik Abdullah dan Abdurachman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah Dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1985, hal.206.

⁶ Kajian mengenai pemikiran Islam masa pergerakan menjadi penting mengingat pada fase ini muncul pemikiran-pemikiran yang produktif mengenai wacana Islam dan negara. Fase ini menjadi bahan rujukan bagi pemikir yang berfaham seperti itu pada fase periode sejarah selanjutnya. Penelitian ini juga memberi sumbangan pemikiran untuk merekonstruksi pemikiran Islam untuk masa selanjutnya. Bachtiar Effendi, buku 1998.

dijadikan inspirasi untuk mengilhami gerakan-gerakan nasionalis anti kolonial dalam merebut kembali kemerdekaan yang pernah lepas⁷

Atau dengan kata lain suasana penindasan dan penjajahan, seperti yang dialami masyarakat Islam Nusantara, menuntut harus adanya jawaban terhadap pertanyaan: mengapa umat yang dekat dengan Tuhan harus berlutut pada kekuasaan asing dan kafir.⁸

Kondisi semacam itu juga mempengaruhi tokoh/pemikir gerakan Islam di dalam merumuskan strategi membangun wacana mengenai konsep bernegara yang ideal. Jadi *zeitgeist* merupakan faktor yang determinan ketika seorang tokoh merumuskan pemikirannya.

Demikian juga dengan proses sosialisasi.⁹ individu tokoh terutama yang bersifat "intern". Proses ini dapat membentuk sikap atau tingkah laku yang juga dapat menentukan perilaku terutama dalam pemikiran.¹⁰ Tentunya ada agen-agen sosialisasi yang mendukung proses sosialisasi tersebut antara lain: keluarga, pendidikan, bahan bacaan dll.

Bahkan menurut Nurcholish Madjid, ada suatu teori yang tak terbantahkan bahwa keyakinan seseorang mempengaruhi perilakunya, tidak saja dalam perilaku sehari-hari melainkan juga sikap dan tentunya pemikirannya. Tidaklah mengherankan tokoh

⁷ John L. Esposito (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, Jakarta: Rajawali, 1987, hal.5.

⁸ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, tahun hal.96.

⁹ Istilah sosialisasi terutama sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses belajar di mana individu memperoleh nilai-nilai berupa keyakinan, perasaan dan komponen-komponen nilai lainnya terhadap pemerintah dan kehidupan politik (Jack Plano, 1985 : 176). Pendapat lain memberi definisi sebagai proses belajar melalui mana norma-norma dan tingkah laku politik dapat diterima oleh sistem politik yang sedang berlaku dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sosialisasi ini dapat membentuk orientasi dan sikap dasar (Allian, 1985: 158). Sosialisasi yang dialami individu dapat mempengaruhi perilakunya, tidak saja perilaku sehari-hari melainkan juga dalam sikap yang lebih besar seperti sikap politik, sosial dan sebagainya (Anwar Harjono dkk, 1996:70).

¹⁰ Lihat juga Jack Plano, Robert E. Riggs dan Helenan S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali, 1982, hal.177.

semisal Natsir semangatnya dipengaruhi oleh keislaman baik prilakunya maupun warisan intelektualnya berupa tulisan-tulisannya.¹¹

Konsep wacana Islam dan negara merupakan konsep yang dimiliki Natsir yang dijabarkan dalam pemikirannya. Penelitian ini hendak mencari pandangan Natsir mengenai penjabaran lebih lanjut konsep wacana Islam kaitannya dengan negara yang berkaitan dengan pandangannya mengenai konsep kriteria kepemimpinan, bentuk negara yang ideal, ajaran-ajaran Islam yang perlu diaplikasikan dalam negara, pandangannya mengenai institusi apa dari negara yang harus ada dalam negara, pendapatnya mengenai siapa yang melegitimasi sebuah pemerintahan, pandangannya mengenai apakah Belanda sah memerintah rakyat Indonesia atau tidak, pandangannya mengenai perlu tidaknya negara Islam, pandangan Natsir mengenai nasionalisme, hubungannya dengan kalangan komunis yang juga memperjuangkan bentuk negara yang ideal menurut versi mereka.

Penelitian ini lebih kepada studi literatur (*literature research*). Research dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan berupa buku, manuskrip, pamflet, artikel dsbnya yang berkaitan dengan pandangan Natsir mengenai agama dan negara.

Data primer berupa karya Natsir dapat ditelusuri lewat memoar, tulisan yang berserak di majalah dan surat kabar masa pergerakan nasional. Penelusuran ini dilakukan di Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, museum pers hingga perpustakaan dan arsip di daerah, terutama Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta.

Khusus surat kabar dan majalah merupakan bahan dokumen yang sangat berharga. Segi substansifnya mencakup kehidupan sosial, pemikiran dan politik. Sebagai sumber informasi sumber tersebut tidak hanya memuat data yang menunjukkan fakta, tetapi juga memberi opini, interpretasi dan pikiran-pikiran.¹²

¹¹ Anwar Harjono dkk, *Pemikiran Dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Jakarta: Firdaus, 1996, hal.70.

¹² Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*, Jakarta: Gramedia, 1982. hal.108

Sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui bahan bacaan ilmiah atau hasil kajian para ahli yang membahas mengenai tema yang diteliti. Setelah data-data baik primer maupun sekunder dikumpulkan dan dilakukan kritik terhadap teks baik intern maupun ekstern, kemudian dilakukan interpretasi terhadap teks kemudian dilakukan rekonstruksi pemikiran Natsir yang merupakan bagian dari historiografi.

2. Setting Sejarah Pergerakan Nasional

Ada kecenderungan perbedaan sikap bangsa penjajah terutama dalam melakukan tindakan eksploitasi terhadap negeri jajahannya terutama di negara-negara di Asia Tenggara. Belanda dan Inggris misalnya lebih menekankan soal perdagangan meskipun kedatangannya tidak lepas dari upaya untuk melakukan proses "kristenisasi" melalui misi dan zendingnya, sedangkan Portugis dan Spanyol menekankan niat dan tindakan ingin membalas "dendam" terhadap Islam yang pada masa lalunya Islam pernah menguasai Spanyol dan sebagian Portugal pada sekitar abad 8-15.

Namun yang jelas nuansa penjajah yang terjadi dalam persepsi masyarakat pada lapis bawah adalah sebagai bangsa "kafir" yang ingin menguasai terutama tanah air dan mengeksploitasi segala potensi alamnya untuk ditarik ke negerinya. Penderitaan semacam itu telah membekas luka sejarah bangsa sehingga tidaklah mengherankan jika pada beberapa daerah di tanah air menggema "perang jihad" melawan kekuasaan asing yang dianggap kekuasaan "kafir".¹³

Sementara itu proses islamisasi telah terjadi jauh sebelum masuknya penetrasi kekuasaan kolonial di tanah air. Tidaklah mengherankan bila perjuangan Diponegoro, Imam Bonjol dan perlawanan di serambi makkah Aceh merupakan bagian dari proses penyebaran dan pendalaman Islam dalam konteks sosial-kultural di

¹³ Pemberontakan dan kemudian berujung pada perang pada abad 19 seringkali diwarnai oleh simbol-simbol keagamaan seperti dalam Perang Diponegoro, Perang Padri, Jihad Cilegon (9-30 Juli 1888), *Jihad di Aceh (1873) dll* lihat Kraef A. Steen Brink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, hal. 17-73.

masing-masing daerah.¹⁴ Proses ini tampaknya terganggu dengan adanya kekuasaan kolonial yang menjajah tanah air.

Para pemikir kolonial semisal Snouck Hurgronje dan Hazeu melihat Islam dijadikan simbol kebangsaan. Ketika hak penduduk di tanah air diinjak, maka pada Islam-lah mereka menemukan pemecahan. Mereka akan bergerak, berbuat atau berontak di bawah panji-panji Islam. Tidaklah mengherankan jika sejak akhir abad ke-19 dilakukan usaha menyebarkan pendidikan Barat lebih giat lagi. Penyebaran pendidikan ini tidak sekedar melatih anak negeri agar mereka menjadi pendukung sistem pemerintahan kolonial, tetapi juga untuk membendung "gunung berapi Islam."¹⁵

Penasehat pemerintah kolonial, Snouck Hurgronje yang memberi kebijakan politik Islam yang didasarkan pada analisa pemisahan agama dan politik tampaknya hanya sesuai dengan peralihan abad 20. Pada dua dasawarsa pertama abad 20 saran Snouck tidaklah relevan lagi. Dorongan kebangkitan Islam di luar negeri berpadu dengan perubahan sosial akibat lajunya modernisasi di bawah pemerintahan kolonial telah mempersegar penghayatan agamanya, sehingga mampu menghayati Islam sebagai agamanya yang sempurna dan lengkap. Dalam membela agamanya umat Islam ternyata tidak dapat mengabaikan kegiatan politiknya.¹⁶

Bahkan dengan semangat keagamaan Islam di Indonesia mulai dewasa dan berkembang masuk ke dalam ideologi Islam. Islam seakan membedakan antara masyarakat pribumi dari pemerintahan asing. Sebagai konsekwensinya Islam menjadi indetik dengan nasionality.¹⁷ Dapat dikatakan bahwa nasionalisme di Indonesia dimulai dengan nasionalisme Islam. Ketika melihat orang-orang Melayu di Sumatera, orang Jawa dan Sunda di Jawa, orang Banjar di Kalimantan, orang Bugis Makasar di Sulawesi dan orang Ternate di Maluku, suku-suku ini berjuang melawan Belanda. Meskipun mereka

¹⁴ Taufik Abdullah (ed.), *Islam dan Masyarakat: Sebuah Pantulan Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1987, hal. 12.

¹⁵ Taufik Abdullah, *Ibid*

¹⁶ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1996, hal. 199-200.

¹⁷ Andi.M Faisal Baki, "Islam and National Formation in Indonesia," *thesis MA Institute of Islamic Studies* Mc Gill University Montrial, 1993, hal.116.

berbeda dalam kebudayaan, mereka adalah satu dalam kesadaran keagamaan Islam mereka.¹⁸

Di pihak lain adanya proses kolonisasi dengan ditandai pelebaran jaringan ekonomi kolonial dan penetrasi administrasi modern yang sifatnya kolonial pula telah mengobrakabrik apapun kemantapan tata dari sistem policy lama yang ada. Selain itu berkembangnya faham nasionalisme yang ingin menjembatani batas antar etnis dan agama bergema, maka dari sinilah dapat dipahami mengapa kedudukan Islam sebagai dasar ideologi dalam perjuangan politik diperdebatkan.¹⁹

Perdebatan ideologis yang terpenting dalam masa pergerakan nasional adalah mempertanyakan masalah dasar perjuangan. Kelompok nasionalis menyatakan bahwa dasar perjuangan mereka adalah nasionalisme Indonesia ketika berhadapan dengan negara kolonial. Namun kelompok Islam lainnya seperti A. Hasan, Agus Salim dan tentunya Natsir mempertanyakan hal itu. Mereka berpendapat bahwa Islamlah yang pantas menjadi dasar perjuangan.²⁰ Mereka mencela nasionalisme sekuler karena faham ini merupakan ide manusia padahal Islam adalah wahyu Allah. Faham nasionalisme juga dapat memecah belah ummat Islam internasional. Faham ini juga berasal dari Eropa serta telah menimbulkan perang dan imperialisme bagi Barat. Tentunya faham ini tidak akan cocok diterapkan pada penduduk yang mayoritas beragama Islam apalagi dijadikan dasar persatuan.²¹

Belum lagi infiltrasi komunis ke dalam organisasi Islam yang terkenal yang bernama Sarekat Islam telah menjadi permasalahan tersendiri dalam organisasi tersebut. Ideologi puncak SI yang terdiri dari Tjokro dan Agus Salim serta Abdul Moeis lebih mengambil

¹⁸ Andi M. Faisal Baki, *Ibid.*, hal.117.

¹⁹ Taufik Abdullah, *Op. cit.*, 14.

²⁰ Lihat juga Taufik Abdullah, *Ibid.*, 15.

²¹ MC Riffels, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: UGM Press, 1995, hal.285.

sikap defensif dalam menghadapi isu politik yang dilancarkan Semaun, Darsono, Alimin dan tokoh-tokoh kiri lainnya.²²

Namun dalam perkembangannya tokoh SI yang berhaluan kiri dikeluarkan dari SI pada tahun 1921. Keputusan ini diambil dalam suatu kongres partai yang ketika itu tidak dihadiri oleh Tjokroaminoto. SI yang sebelumnya merupakan gerakan Islam yang besar kemudian merosot popularitasnya menjadi partai Islam yang kecil.²³ Kaum komunis kemudian menyalurkan aspirasinya dengan membentuk wadah tersendiri dalam Partai Komunis Indonesia (PKI).

Rivalitas ideologi antara Islam versus komunisme terus berlanjut hingga periode kemerdekaan. Perdebatan dan tudingan Islam terhadap komunisme dapat dilihat dari komentar surat kabar yang dipimpin tokoh Islam seperti Anwar Tjokroaminoto yang memuat berita-berita anti komunisme. Salah satu artikel yang dikemukakannya adalah "Komunisme Musuh Terbesar". Artikel ini sempat dimuat di halaman muka surat kabar dengan mengambil studi kasus di Amerika.²⁴

Tidak hanya SI, berdirinya Persis di mana Natsir berkecimpung didalamnya tidak lepas dari kekhawatiran pendirinya terhadap propaganda komunisme.²⁵ Perpecahan dalam tubuh SI antara Islam dan komunis serta perjuangan komunis yang anti Tuhan dan mengeksploitasi situasi dengan mempertentangkan antara kelas kaya dan miskin dikhawatirkan mendapat respons dari kalangan kaum muslim yang kurang pemahamannya akan agama. Latarbelakang politik ini juga yang termasuk mempercepat berdirinya Persis, terutama untuk menghindari perpecahan lebih jauh di kalangan umat Islam. Dalam kondisi semacam itu penekanan terhadap makna persatuan pemikiran, perasaan suara dalam Islam terangkum dalam bentuk organisasi yakni Persatuan yang berdiri tanggal 12

²² *Percakapan Cendekiawan tentang Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1990, hal.46.

²³ Lihat juga C.van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafitipers, 1983, hal.15.

²⁴ *Pemandangan*, 22 Oktober 1949.

²⁵ Dadan Wildan, *Yang Dai Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, Jakarta: Rosda, 1999: 55.

September 1923.²⁶ Perbedaan pandangan mereka dapat terlihat dari tulisan-tulisan yang mereka tulis baik di majalah, buku maupun surat kabar. Perdebatan yang paling sistematis tampak dari tulisan yang ditulis Natsir versus Soekarno terutama dalam melihat landasan perjuangan dan konsepsinya mengenai agama dan negara.²⁷ Namun sebelum sampai kepada pembahasan mengenai pandangan Natsir tersebut ada baiknya diuraikan dahulu di sini proses sosialisasi Natsir.

3. Natsir : Sebuah Biografi Singkat

Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang Sumatra Barat. Daerah tempat kelahirannya merupakan juga lahirnya gerakan pembaharuan Islam yang dipelopori oleh kaum muda. Pembaharuan di daerah ini juga dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan yang terjadi di Arab Saudi dengan gerakan Wahabinya dan gerakan pembaharuan islam yang terjadi di Mesir.²⁸

Ayahnya bernama Idris Sutan Saripado dan ibunya bernama Khadijah. Kedua orang tuanya sangat memperhatikan pendidikan Natsir. Mereka memasukkan Natsir ke HIS (*Holladsch Inlandsche School*) Adabiyah pada usia 8 tahun. Namun Natsir tidak tinggal bersama orang tuanya tapi dengan makciknya. Kemudian Natsir dipindahkan ke HIS di Solok dan tinggal dengan saudagar bernama Haji Musa. Di sini Natsir banyak menimba ilmu karena pada pagi hari ia sekolah di HIS, sore hari belajar di madrasah Diniyah dan malam hari ia mengaji.²⁹

Perlu diketahui bahwa HIS merupakan sekolah Belanda menerapkan disiplin pribadi yang ketat. Kedisiplinan tersebut berupa tuntutan belajar yang keras, guru-guru yang tegas dalam mengajar. Sistem pendidikan Belanda semacam ini setidaknya berhasil

²⁶ Dadan Wildan *Op. cit.*, 1999, hal.57.

²⁷ Tampaknya pendapat Natsir relevan dengan HAR Gibb yang menyatakan : "Islam is much more than a religious system. It is a complete civilization" (Anwar Harjono, dkk, *Op. cit.*, 171).

²⁸ Ahmad Suhelmi, *Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Jakarta: Darul Falah, 1999, hal.20.

²⁹ *Ensiklopedi Islam*, 1993, Jilid,4, hal.21.

membentuk karakter pribadi Natsir yang menjunjung etika kerja yang ulet, berdedikasi dan memiliki integritas dan prinsip hidup.³⁰

Pendidikan HISnya diselesaikan Natsir pada tahun 1923. Kemudian ia melanjutkan ke sekolah Belanda yang lebih tinggi lagi yakni MULO (*Middelbare Uitgebreid Lager Onderwijs*) di kota Padang. Tentunya orang yang bisa masuk ke sekolah ini mempunyai intelektual dan kemampuan bahasa Belanda yang baik. Selama sekolah di Mulo Natsir juga aktif dalam keorganisasian di luar sekolah. Ia masuk sebagai anggota pandu Natipij dari Perkumpulan *Jong Islamieten Bond* (JIB)³¹. Di JIB inilah Natsir memperoleh latihan kepemimpinan dan kesadaran politiknya³². Pendidikannya di Mulo ia tamatkan pada tahun 1927.³³

Sesuai dengan jiwa petualangan Natsir, setelah tamat dari Mulo, berkelana ke kota Bandung. Di kota ini ia melanjutkan ke *Algemene Middelbare School* (AMS) dan lulus tahun 1930. Ketertarikan Natsir masuk AMS karena sekolah ini membuka jurusan *Western Classic*. Kepala sekolahnya bernama van Bessem, sangat dekat dengan Natsir. Ia seringkali memberikan buku-buku bernuansa politik kepada Natsir. Ia kemudian mendiskusikan isi buku tersebut baik kepada Natsir maupun murid lainnya di kelas. Ketika pemerintah kolonial melakukan larangan keras terhadap segala bentuk pertemuan setelah terjadinya pemberontakan PKI tahun 1927, Natsir justru mendapat izin dari van Bessem untuk melakukan diskusi politik bersama rekan-rekannya di kelas.

Memang diakui bahwa di kota kembang inilah Natsir memperoleh sosialisasi yang intens. Ketika ia belajar di AMS, ia pun aktif dalam organisasi di luar sekolah. Ia masuk organisasi muslim

³⁰ Ahmad Suhelmi, *Op.cit.*, hal.22-23.

³¹ JIB merupakan organisasi muslim Indonesia yang modernis (C. van Dijk, *Darul Islam : Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafitipers, 1983, hal.17).

³² Ahmad Suhelmi, *Ibid.hal.23*.

³³ George Kahin, "Momammad Natsir (1908-1993) : Sebuah Kenangan", dalam Anwar Harjono dkk, *M . Natsir: Sumbangan dan Pemikirannya Untuk Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah, 115, hal.51.

modern yakni Persis dimana A. Hasan menjadi gurunya.³⁴ Tulisan-tulisan Natsir banyak dimuat di majalah Persis yang tidak jauh dari pengaruh A. Hasan. Dia pun melanjutkan organisasi kaum muda muslim yakni JIB yang disemangati oleh H. Agus Salim. Natsir sempat menjadi ketua cabang JIB Bandung.³⁵

Dapat dikatakan A. Hasan dan Agus Salim merupakan guru Natsir. Selain itu Abikusno Tjokrosujoso (tokoh SI) dan Dr. Sukiman serta Samsuddin. Sukiman memperoleh ijazah kedokteran dari Universitas Amsterdam. Abikusno menamatkan pendidikan tinggi di Belanda. Dan Samsuddin meraih ijazah kesajaranaannya di Universitas Leiden. Dengan demikian mereka bertiga ini mempunyai latar belakang pendidikan Barat³⁶ Demikian juga Natsir pemikirannya juga dipengaruhi Syech Akhmad Syoekati-pendiri Al Irsyad. Khusus untuk A. Hasan, Natsir sering berdiskusi tentang agama dan politik. A. Hasan juga memberi buku tafsir Al-Furqon atau tafsir the Holy Qur'an karya Muhammad Ali.³⁷ Dalam pandangan Natsir A. Hasan tidak sekedar ulama yang alim, tapi dia bisa mengembangkan kepribadian seseorang termasuk Natsir. Tidakkah mengherankan bila Natsir tertarik pada persoolijkheid-nya, dari seorang yang dianggapnya *self made-man*. Hasan dianggap pandai dan tahu banyak tentang agama dan politik. Hasan selalu mengajak Natsir untuk berdialog dan berpikir.³⁸

³⁴ A.Hasan memang lekat dengan organisasi Persis, namun demikian sebenarnya yang mendirikan persis adalah H.Zam-Zam pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Ide awal berdirinya organisasi ini adalah dari diskusi-diskusi tak resmi yang dilakukan oleh H. Zam-Zam yang membahas masalah-masalah khurafat, tachayul, bai'ah dan taklik. Namun organisainya baru mendapat bentuk setelah A. Hasan dan M. Natsir bergabung dalam organisasinya. Pada Anggaran Dasarnya pasal IV organisasi ini berjuang untuk berlakunya hukum-hukum Islam dan ajaran islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam masyarakat (Thohir Luth, *Op. cit.*,hal.31-32).

³⁵ Kahin, *Op. cit.*,hal.52.

³⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Fundamentalisme Dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaa-I-Islami (Pakistan)*, Jakarta: Paramadina, 1999, hal.145-146.

³⁷ Mohammad Natsir, "Politik Melalui Jalur Dakwah," dalam *Memoar Senarai Kiprah Sejarah*, Jakarta: Grafitipers, 1993. hal. 82

³⁸ *Berita Buana*, 17 Juli 1978.

Dalam usianya yang relatif masih muda, Natsir sempat bergaul dengan tokoh-tokoh nasional semisal Hatta, Prawoto Mangunsasmito, Yusuf Wibisono, Tjokroaminoto dan Mohammad Roem. Natsir juga rajin berdiskusi dengan rekan-rekan seusianya di JIB. Kemampuannya yang menonjol mengantarkan ia dipercaya menjadi ketua JIB Bandung pada tahun 1928 hingga 1932.³⁹

Dalam lingkungan Persis, Natsir dikenal sebagai pemuda yang pandai berdiskusi baik lisan maupun tulisan. Tulisannya banyak dimuat dalam majalah Persis yakni di *Pembela Islam* maupun *Al-Lisaan*. Oleh karena Natsir pandai berdebat dan menulis, sampai-sampai Mohamad Roem menjulukinya sebagai generasi kedua sesudah pendiri-pendiri Persis yang merupakan pemilik pena yang tajam dan berbicara lugas dan tegas terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut agama Islam.⁴⁰

Di kota Bandung⁴¹ ini pula yang merupakan salah satu kota yang menjadi basis kekuatan politik PNI dengan tokohnya Ir. Soekarno merupakan daya tarik Natsir untuk mengamati radikalisme propaganda yang terkadang sering diiringi dengan ejekan-ejekan terhadap aturan agama Islam. Kondisi ini lebih menyadarkan kita betapa perbedaan ideologi yang tajam dalam berpolitik dapat menimbulkan gesekan polemik di dalam tulisan mereka.⁴²

Perhatian Natsir yang begitu tinggi terhadap keluhuran islam dari kecaman pihak lain dan usaha-usaha pendidikan di masa depan untuk kepentingan Islam menyebabkan ia menolak untuk melanjutkan tawaran beasiswa belajar di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia dan Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Ia justru masuk sekolah pelatihan bagi guru non Eropa yang ia rampungkan pada tahun 1932. Ia sempat mendirikan Pendidikan Islam (Pendis) hingga

³⁹ Thohir Luth., *Op. cit.*, hal.23.

⁴⁰ Thohir Luth., *Op. cit.*, hal.38.

⁴¹ Bandung pernah menjadi rencana tempat pembentukan partai politik yang bernama Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juli 1927. Anggaran Dasar partai ini disusun oleh Sudjadi, Budhyarto dan Ishaq (John Ingleson), *Jalan Ke Pengasingan : Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, Jakarta: LP3ES, 1983, hal.35

⁴² Ahmad Suhelmi, *Op. cit.*, hal.28.

masa Jepang.⁴³ Lulusan dari sekolah ini rata-rata tidak mau bekerja pada pemerintah. Mereka lebih baik terjun ke masyarakat.⁴⁴ Dengan demikian aktivitasnya dalam dunia politik dan pendidikan serta panggilannya untuk "membela Islam" merupakan alasan yang utama bagi Natsir untuk tidak menerima tawaran beasiswa dari Belanda. Padahal beasiswa yang diterimanya jauh lebih bernilai ekonomis ketimbang menjadi aktivis dalam membela kepentingan Islam.⁴⁵

Tulisan-tulisan Natsir sekitar tahun 1930-an seringkali membangkitkan kesadaran kepada masyarakat agar bersikap optimis dan jangan terbawa kepada perasaan rendah diri ketika berhadapan dengan negara yang dikuasai oleh pemerintahan kolonial. Natsir termasuk tokoh yang tidak percaya pada anggapan bahwa hanya bangsa-bangsa tertentu saja atau ras tertentu saja yang dapat maju. Natsir mempunyai keyakinan bahwa kemajuan lebih tergantung pada ada tidaknya sifat-sifat dalam kesanggupan dalam salah satu ummat, yang menjadikan mereka layak atau tidaknya mereka dapat memerintah negerinya sendiri.⁴⁶

Natsir juga tercatat sebagai aktivis di bidang politik. Pada tahun 1938 ia mendaftar sebagai anggota Partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. Pada tahun 1940 hingga 1942 ia menjadi Ketua PII cabang Bandung.⁴⁷

Selain menjadi pendidik dan politikus, Natsir dikenal sebagai seorang pemikir. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Mohammad Abduh. Ia sangat terkesan dengan tafsirnya dan penjelasannya bahwa Islam merupakan satu sistem sosial. Tafsir tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa etika Islam ditafsirkan dalam istilah nilai-nilai sosial dan keadilan sosial dan sikapnya yang menentang penjajahan. Namun ia juga terkesan dengan penjelasan Muhammad Abduh bahwa dalam menegakkan kejayaan islam tidak hanya melalui

⁴³ Kahin, *Ibid.* hal.53.

⁴⁴ Natsir, 1993, *Op. cit.*, hal.84

⁴⁵ Yusril, Ihza, *Op. cit.*, 1995, hal.1.

⁴⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Op. cit.*, 1995., hal. 11.

⁴⁷ Thohir Luth, *Op. cit.*, hal.24.

pemurnian ajaran Islam tapi juga perlu memahami ilmu pengetahuan Barat.⁴⁸

Sebagai pemikir, Natsir telah menghasilkan beberapa karya baik dalam bahasa Indonesia, Inggris maupun Belanda. Karyanya dalam bahasa Belanda antara lain : *Komt tot het Gebed* (1931); *Mohammad als Profeet* (1931); *Gouden Regels uit de Qur'an* (1932); *de Islamietische vrouw en haar recht* (1933), *Het Vasten* (1934) dll. Disamping itu bersama Prof. CV Wolf Kemal Schoemaker ia menulis buku *Cultuur Islam* (1936).⁴⁹

Natsir memang mempunyai perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban barat. Dalam usianya yang masih relatif muda yakni sekitar 21 tahun ia telah menekuni sejarah peradaban Islam, Romawi, Yunani dan Eropa melalui buku-buku berbahasa Arab, Perancis dan Latin serta Eropa. Buku-buku tersebut berbahasa Arab, Perancis dan Latin. Tentunya untuk menguasai buku-buku tersebut Natsir mempunyai kemampuan lima bahasa yakni Arab, Inggris, Belanda, Perancis dan Latin. Penguasaan bahasa asing ini yang memungkinkan Natsir dapat melakukan "penjelajahan intelektual" dengan baik.⁵⁰

Ketekunannya dalam membaca buku baik dalam negeri maupun luar negeri menyebabkan Natsir mempunyai kapasitas intelektual ketika ia berpolemik dengan pihak lain terutama Soekarno sekitar tahun 1930-an hingga 1940-an mengenai pandangan mereka tentang agama dan negara.

4. Pandangan Natsir Mengenai Agama dan Nasionalisme

Bagi Natsir antara ibadah dan politik tidak bisa dipisahkan. Oleh karena berpolitik itu adalah bagian dari ibadah. Pemikiran semacam ini tentunya dapat dikembangkan lebih lanjut bahwa dalam menata kehidupan kenegaraan maka agama sebagai bagian dari ibadah harus mewarnainya. Dengan demikian Islam tidak mengenal

⁴⁸ Kahin *Ibid*, hal .54-55.

⁴⁹ *Berita Buana*, 17 Juli 1978

⁵⁰ Ahmad Suhelmi, *Op. cit*, hal.23-24.

pemisahan agama dan negara.⁵¹ Oleh karena Islam merupakan agama yang sempurna⁵²

Lebih jauh Natsir berpendapat bahwa Islam: merupakan suatu peraturan pergaulan hidup yang memberi hak sama rata, memberi kewajiban sama berat atas segenap manusia penduduk alam. Peraturan yang terkandung dalam Islam menyangkut urusan rumah tangga, mengurus hubungan dengan mereka yang berlainan agama dan berlainan negeri serta mendorong semangat untuk mencapai derajat kemanusiaan yang penuh.⁵³

Dalam tulisan Natsir berupa buku yang terbit tahun 1932 berjudul *Risalah Debat Kebangsaan*⁵⁴ terlihat bahwa gagasan Natsir cenderung mendamaikan ide-ide universalis Islam dan ide-ide kebangsaan. Buku selanjutnya terbit pada tahun 1938 berjudul *Dengan Islam Keindonesiaan Mulya*, Natsir mulai mengkritik pandangan-pandangan seorang tokoh yang menolak Islam dan menekankan kebangsaan.⁵⁵ Kedua sumber buku Natsir ini memperlihatkan bahwa Natsir mencoba mendamaikan gagasan-gagasan universal islam yang dianggap tidak nasionalis karena

⁵¹ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: Logos, 1999, hal. 156 157.

⁵² Tampaknya penafsiran Natsir relevan dengan pandangan HAR Gibb yang menyatakan pentingnya arti santri secara politis pada dasarnya berasal dari kenyataan bahwa dalam Islam batas antara agama dan politik tipis sekali. Islam adalah agama maupun cara kehidupan yang sempurna (Lihat HAR Gibb, *Modern Trends in Islam*, New York : Octagon Books, 1972, hal. 69 dan Zaini Muchatrom, *Santri dan Abangan di Jawa*, *Op. cit.*, hal. 38. Lebih lanjut Natsir berpendapat bahwa nilai-nilai hidup yang diberikan Islam tidak hanya tuntutan hidup perorangan tapi juga tuntunan hidup bermasyarakat dan bernegara (Natsir, "Peranan Islam Dalam Pembinaan Demokrasi", dalam *Media Dakwah* No. 46.

⁵³ Deliar Noer dalam apa dikutip oleh Anwar Harjono dkk, *M. Natsir Sumbangan Dan Pemikirannya Untuk Indonesia*, Jakarta:1995, hal.14.

⁵⁴ Dalam buku tersebut berisi debat tiga pihak yakni Natsir, A. Hasan melawan Mochtar Lutfi seorang Pemimpin Permi.

⁵⁵ Tentang perdebatan gagasannya dengan kalangan nasionalis sekuler seringkali termuat dalam majalah bulanan *Pembela Islam*. Majalah ini tersebar ke seluruh tanah air dengan oplah mencapai 2000 eksemplar. Pada saat itu jumlah tersebut sudah banyak. Distribusi pembacanya adalah kalangan pesantren dan ulama (Natsir, 1993, *Op. cit.*, hal.85).

universal, berhadapan dengan kebangsaan. Ide Natsir selalu didasarkan pada dalil al-Qur'an terutama surat Al-Hujarat yang mengakui eksistensi bangsa-bangsa, tapi menolak nasionalisme sempit yang mengarah kepada Ashabiyah. Bagi Natsir, kebangsaan adalah suatu fitrah dan alamiyah, jika manusia mencintai tanah air, tempat lahir dan dia dibesarkan oleh tanah airnya. Namun ide universalitas Islam harus menjadi nafas pada faham kebangsaan itu sendiri.⁵⁶

Khusus mengenai tanah air seorang tokoh Persis MS menulis dalam artikel : "Dan Janganlah ia loepa, bahwa tanah airnja sendiri itoe sebahagian dari tanah air agamanja, dan wadajib ia soenggoeh-soenggoeh pada mendjadikan kemadjoean tanah airnja sendiri itoe, sebagai wasielah (perantaraan) oentoe kemadjoean doenia Islam"⁵⁷ Demikian juga tulisan MS menjelaskan bahwa mencintai tanah air tidak dilarang oleh agama. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa seorang yang mencintai kesayangannya tidak dinamakan ashabiyah. Adapun yang dilarang agama adalah mengurus suatu negeri atau mengajak orang lain untuk mengurusnya dengan asas kebangsaan tanpa mengambil aturan Islam sebagaimana yang terjadi di Turki dan di Irak. Mengenai kecintaan untuk tanah air dengan menyatukannya dengan aturan Islam tidak dilarang bahkan terpuji.⁵⁸

Dengan demikian Natsir dapat dikatakan menilai positif terhadap nasionalisme. Pemikirannya cukup diwarnai oleh pemikiran Barat modern. Ia menilai sepanjang nasionalisme itu tidak dijadikan yang suci atau yang dipertaruhkan, maka hal tersebut merupakan kewajaran.

⁵⁶ Anwar Harjono, dkk, *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Jakarta : Pustaka Firdaus hal. 61.

⁵⁷ *Al Lisan* No.51, hal. 41. memang dalam pandangan nasionalis Islam bahwa cinta tanah air saja tidaklah tepat. Apalagi konsep kesatuan yang diusulkan oleh kalangan nasionalis sekuler merujuk pada tipe pra Islam seperti pada masa kejayaan Majapahit. Konsep semacam ini akan mengurangi arti pentingnya Islam. Nasionalis yang diajukan kalangan nasionalis sekuler dianggap sebagai konsep jahiliyyah (pra Islam) yang tidak cocok lagi dengan perkembangan (Lihat juga Andi M. Faisal Bakti, hal.128).

⁵⁸ *Al-Lisan* No.48, 5 Juni 1940, hal. 19

Sejak muda ia telah terlibat dalam perjuangan bangsa. Tidaklah mengherankan jika ia menerima pandangan dalam perjuangan pembentukan sebuah negara bangsa (*nation state*) merupakan suatu keharusan. Ia merupakan sebuah alat yang perlu untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam situasi yang kongkrit.⁵⁹

Bagi Natsir tidak ada perlunya seorang muslim menghilangkan rasa kebangsaan dan kebudayaannya. Oleh karena ajaran Islam juga mengakui bahwa manusia dijadikan dalam bergolong-golongan, bangsa-bangsa dan suku bangsa. Hal tersebut merupakan fitrah.⁶⁰ Relevan dengan tulisan Natsir ini adalah artikel yang ditulis oleh Gt. A. Rahman yang dimuat dalam majalah *Al-Lisaan*. Ia menulis: "Kebangsaan itoe soedah diakui oleh Islam. Kebangsaan itoe soetoe rahmat dari Allah. Firman Allah: "kami (Allah) djadikan kamoe dari laki-laki dan perempuan dan kami djadikan kamoe beberapa golongan dan bangsa soepaja kamoe berkenal-kenalan (berhoeboengan). Sesoengguhja orang jang terlebih moelia di sisi Allah, ialah orang jang lebih takoet kepadaNja."⁶¹

Meskipun demikian, Natsir menekankan bahwa konsep nasionalisme yang bermakna antar etnis atau meliputi suku bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara dipakai untuk pertama kali dan memperoleh makna "persatuan" yang sesungguhnya oleh kalangan Islam.⁶² Organisasi SI maupun Muhammadiyah telah lama menggunakan konsep "bangsa Indonesia" dengan anggotanya yang ratusan ribu dan tersebar ke seluruh wilayah Nusantara. Hal ini berbeda dengan Budi Utomo yang memang dilahirkan oleh rasa kebangsaan, tetapi mereka membatasi diri pada sukunya saja. Bagi Natsir Islam yang menembus batas-batas etnis dan kedaerahan

⁵⁹ Anwar Harjono dkk, *ibid*, hal. 81.

⁶⁰ Anwar Harjono dkk, *Op. cit*, hal.18.

⁶¹ *Al-Lisaan* No.35, 5 Maret 1939, hal.12.

⁶² Natsir pernah menyatakan bahwa tanpa Islam tidak akan pernah ada nasionalisme Indonesia sejak islam menjadi pertamakalnya menyatukan Indonesia (Andi M.Faisal Baki, "Islam and Nation Formation in Indonesia, " *thesis MA*, Institute of Islamic Studies McGill University Montral, 1993, hal.130-131.

sesungguhnya lebih sesuai jika dijadikan dasar dan landasan persatuan.⁶³

Dengan demikian, Natsir melihat Agama merupakan hal yang sangat mutlak dan memberi dasar yang absah serta moral bagi negara. Pemikiran Natsir juga tidak jauh berbeda dengan "seniornya" di Persis⁶⁴ yakni A. Hasan. Namun A. Hasan lebih "keras" di dalam melihat dan membela Islam. Ia dengan gigih berharap dapat menerapkan dan melaksanakan perintah Tuhan yang dijabarkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan negara. Bahkan A. Hasan berpendapat : "Islam ya Islam dan tidak perlu diberi muatan kebangsaan ataupun ketanah airan."⁶⁵ Demikian juga dengan tulisan rekan Natsir yakni Moehammad Saleh Suady dari Bangkalan yang melihat bahwa nasionalisme bila dijadikan faham atau asas bagi ummat Islam amatlah disayangkan. Islam tidak mengizinkan ummatnya untuk bergerak dengan asas dan faham kebangsaan atau dengan cara dan aturan kebangsaan. Oleh karena menurutnya sebagai asas faham dan cara, hanya Islam yang mengenal dua macam yakni asas dan faham Islam atau faham dan asas di luar Islam yakni kafir.⁶⁶

Bagi Natsir nasionalisme yang utama adalah nasionalisme yang membuka diri terhadap peranan wahyu. Jadi pengabdianya kepada bangsa dan negara merupakan ibadah⁶⁷ namun ia mengecam Nasionalisme yang sempit dan berlebih-lebihan, sebagaimana yang dia katakan: "Cinta bangsa atau katakanlah kebangsaan yang berlebih-

⁶³ Lihat Taufik Abdullah (ed), *Sejarah Ummat Islam*, Jakarta: MUI, 1991, hal. 241.

⁶⁴ Persis di mana Natsir banyak menerima sosialisasi dari organisasi ini adalah sebuah organisasi yang tokoh-tokohnya terkenal dengan ahli debat. Publikasi dari organisasi ini juga memuat perdebatan seperti terbitannya mengenai Debat PI-Ahmadiyah di Bandung yang dijual seharga f.0,30; Debat A. Hasan Versus Talqien H.A. Wahhab dengan harga f.0,25; Debat Kebangsaan Antara Pemimpin Islam di Bandung dengan H. Moehhtar Loetfi dengan harga f.0,25 (*Al-Lisaan* no extra)

⁶⁵ Lihat Noer Iskandar al-Barsany, "Pemikiran Teologi Islam A. Hasan : Kajian Analitis Untuk Mengetahui Posisi Pemikiran Teologi Islam A. Hasan, *Tesis Disertasi*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, hal.158-159. Bahkan A. Hasan melihat nasionalisme sejajar dengan Ashabiyah.

⁶⁶ *Al-Lisaan* No.47, 5 Mei 1940, hal.19

⁶⁷ Anwar Harjono dkk, *Loc. cit.*, hal34.

lebih yang biasanya merosot menimbulkan kecongkakan dan kesombongan bangsa, chauvinisme, rasialisme dan xenofobi."⁶⁸

Memang diakui bahwa dalam teks-teks yang ditulis Natsir tampak identitasnya sebagai seorang muslim yang taat. Jati dirinya sebagai seorang muslim mendorong ia melakukan kritik pedas terhadap kecenderungan nasionalisme kultural yang ingin membanggakan kebangsaan yang bertolak dari tradisi pra Islami.⁶⁹

Tidaklah mengherankan bila ia sempat melakukan debat pada tahun 1932 dengan H. Moechtar Loetfi yang memimpin Persatuan Muslim Indonesia yang berpusat di Sumatera Tengah. Luthfi menggunakan dua asas dalam organisasinya yakni Islam dan Kebangsaan. Bagi Natsir hal itu adalah aneh sebab Islam telah mencakup kebangsaan. Jadi, tidak perlu Islam dan...⁷⁰ Lebih jauh Natsir berpendapat bahwa Islam merupakan sumber motivasi, inspirasi, sumber kekuatan untuk menahan derita dan pegangan hidup yang akan dibawa mati.⁷¹ Pandangan Natsir ini relevan dengan pandangan organisasinya (Persis) maupun Muhammadiyah di mana mereka merasa cukup dengan kebulatan islam sehingga tidak perlu ditambah-tambah lagi. Bahwa cinta tanah air dan bangsa menurut mereka sudah merupakan fitrah kejadian manusia dan Islam memupuk rasa ini dengan sendirinya.⁷²

Tidak hanya dengan H. Moechtar Lutfi, Natsir dengan nama samaran Moechlish yang ketika itu aktif sebagai jurnalis berbeda pandangan dengan Hamka yang dianggapnya telah berubah. Artikel yang ditulis dengan nama samaran "F" membahas pandangan Hamka. Tulisan Hamka dimuat di *Soeara Kalimantan* no.16-17. Artikel yang ditulis Hamka diberi judul "*Nasionalist Muslim*

⁶⁸ Tatang T. Sudensyah dan Edi Ryanto (penyunting), *Op. cit.*, hal.92.

⁶⁹ Taufik Abdullah, "Natsir Seorang Guru Yang Perfeksionis Filosofis" dalam buku Anwar Haryono dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hal. 29.

⁷⁰ Anwar Harjono dkk, *Op. cit.*, hal 15.

⁷¹ Anwar dkk, *Ibid*, hal.16. Selain itu AR Sutan Mansur dan Hamka dan H. Rasul juga tidak sependapat dengan pemikiran Permi. Mereka menyatakan bahwa islam tidak perlu ditambah dengan dasar lain seperti kebangsaan. Islam telah cukup dan sempurna (Lihat Deliar Noer, *Op. cit.*, hal. 285).

⁷² Nazaruddin Sjamsuddin, *Op. cit.*, hal. 73.

Indonesia". Isi artikel Hamka, menurut "F", memuat tiga hal yakni mempertahankan pendapat, fahamnya tentang arti kebangsaan dan fitnah dirinya oleh A. Hasan. Ketidak sepahamannya "F" terhadap pandangan Hamka karena Hamka menyatakan dirinya pro kebangsaan bahkan menganggap dirinya 100% mengalir darah sebagai seorang nasionalis.⁷³

Perdebatan mengenai kebangsaan terutama dengan Hamka⁷⁴ sebenarnya telah melelahkan bagi Persis. Hal ini terlihat dari pernyataannya : "Sebenarnya soal ini boeat Persis soedah melelahkan, tetapi oentock lebih jelasnya Persis membocat bantahan". Memang tidak dapat disangkal bahwa penerbitan-penerbitan Persis selalu mengetengahkan debat publik. Surat kabar *Al Moe'min* yang diterbitkan dalam bahasa Sunda misalnya yang tergolong koran lokal juga meliput debat antara orang-orang Persis dengan tokoh yang tak seide dengannya. Salah satu judul yang termuat dalam surat kabar tersebut antara lain : "Persatoean Islam Bandoeng nantang Debat".⁷⁵

Perdebatan yang lebih seru dilakukan Natsir terhadap pandangan Soekarno⁷⁶ yang cenderung "sekuler" di mana Soekarno menghendaki pemisahan agama dan negara serta memilih istilah nasionalisme yang tidak perlu diintervensi oleh agama.⁷⁷

⁷³ *Al-Lisan* No.58, 1 April 1941 hal 28-29.

⁷⁴ Tentang hubungan Hamka dengan Natsir semakin membaik setelah periode revolusi hingga masa orde baru. Hamka bahkan memberi kata pengantar pada buku *Capita Selecta*nya M. Natsir. Pada salah satu bab dalam buku *Capita Selecta*, Natsir juga membahas perjuangan ayahnya Hamka (Haji Abdul Karim Amrullah) yang terkena tahanan oleh pemerintah pada pertengahan bulan Mei 1941.

⁷⁵ *Al-Moe'min* 15 Februari 1933, hal. 1.

⁷⁶ Tentang Soekarno yang mempunyai pandangan perlunya persatuan antara nasionalisme, Islamisme dan Marxisme karena dianggap mempunyai satu dasar yang sama yakni hasrat kebangsaan untuk melawan kapitalisme dan imperialisme Barat tampaknya tidak diterima Natsir (John Ingleson, *Op. cit.*, hal.25).

⁷⁷ Soekarno dalam pandangan pergerakan Islam dapat dikatakan kontroversial, terkadang pandangannya dianggap tidak sesuai dengan persepsi tokoh-tokoh Islam, namun dipihak lain Soekarno pernah masuk dalam pergerakan Islam. Oleh karena saking kontroversinya figur Soekarno ada penilaian dari salah seorang aktivis Persis yang menyebutkan Soekarno mempunyai 4 masa. Masa pertama dikatakan Soekarno sebagai pen-anti Islam. Oleh karenanya kita harus membenci dia, kita cambuk dia. Masa kedua, Soekarno dianggap sebagai pelajar Islam, kita puji dia dan

Pandangan Natsir Mengenai Agama dan Negara

MC.Ricklefs (Sejarawan Monash University) menyebut Natsir sebagai seorang ahli polemik Islam yang terkemuka pada kurun pergerakan nasional.⁷⁸ Selain terlibat polemik dengan tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas, ia secara intens berdebat dengan Soekarno baik mengenai paham kebangsaan maupun mengenai masalah negara tersebut.⁷⁹ Natsir merefer kepada ideologi seorang muslim yang menekankan penghambaan diri dan pengabdian diri manusia kepada Allah.⁸⁰ Oleh karena itu segala aktivitas muslim untuk berbangsa maupun bernegara haruslah ditujukan untuk pengabdian kepada Allah.

Oleh karenanya Natsir bertanya apakah sama tujuan antara orang Islam dengan tujuan orang nasionalis yang netral agama. Pertanyaan Natsir ini adalah pertanyaan proyeksi perkembangan masa depan. Lebih lanjut Natsir menguraikan bahwa tujuan kaum muslimin minimal ada tiga hal yakni :

1. mencari kemerdekaan untuk kemerdekaan Islam agar berlaku susunan dan peraturan islam
2. untuk keselamatan dan keutamaan ummat Islam khususnya
3. dan makhluk Allah pada umumnya.

kita hormati dia. Masa ketiga Soekarno masuk dalam organisasi Islam di Bengkulu, kita cinta dia dan kita hormati dia. Tapi masa keempat, Soekarno terkenal sebagai seorang pengrusak ajaran Islam, pelopor untuk membuang al-Qur'an, memusuhi ulama Islam. Sudah tentu kita amat benci dan keras hati kita akan memusuhi dia hingga di sisi Tuhan, bila dia tidak taubat (*Al Lisan* no. 51 hal.31)

⁷⁸ MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: UGM Press, 1995, hal. 285.

⁷⁹ Natsir pernah memberi komentar tentang Soekarno: "Bung Karno dulu suka mengejek-ejek Islam. Pada tahun 1930 saya diminta Pak Sarbini, ketua PSI cabang Bandung, supaya jadi anggota PSI sebelum organisasi Islam ini berubah menjadi PSII. Sejak itu, saya berkecimbung dalam politik. Apalagi ketika itu saya lihat, PNI begitu kuat (Natsir, 1993, *Op. cit.*, hal.85.)

⁸⁰ Isbodroini Suyanto, "Soekarno dan Nasionalisme" dalam Nazaruddin Sjamsuddin(ed.), *Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Jakarta: Rajawali press, 1988, hal.67.

Ketiga tujuan ini tentunya berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh mereka yang mempunyai faham netral agama.⁸¹

Natsir yang mempertanyakan tujuan tersebut sampai pada seruan (Natsir) yang menghimbau agar masyarakat Islam dapat memilih pemimpin yang Islami dan memberi bukti kongkrit mendukung gerakan Islam. Bukan pemimpin yang diragukan keislaman mereka.⁸² Tampaknya pandangan Natsir sangat relevan dengan pemikiran Ali Haji yang membahas negara dalam dunia Melayu. Ali Haji menyebutkan tujuh syarat yang perlu dipenuhi seorang pemimpin yakni harus muslim yang teguh memegang agama Islam; laki-laki yang mukallaf dan merdeka; adil; mempunyai ijtihad yang baik; sempurna bicarannya, pendengarannya dan penglihatannya, mempunyai sifat berani dan rajin serta berkemauan keras dalam menjalankan pekerjaan kebajikan.⁸³ Kepemimpinan ini dipandang Natsir sangat urgent ketika kepemimpinan mengarah kepada kepemimpinan negara atau pemerintah. Kepemimpinan semacam ini wajib hukumnya untuk berikhtiar agar akhlak dan syiar Islam berlaku di negerinya.⁸⁴

Namun Natsir sekali lagi tetap melihat bahwa cinta tanah air dalam islam merupakan fardu kifayah yang mendekati pada fardu ain.⁸⁵ Hal ini dapat ditafsirkan bahwa membela tanah air dari kekuasaan kolonial menjadi wajib hukumnya.

⁸¹ Lihat lebih lanjut Deliar Noer, *Op. cit.*, hal. 281

⁸² Deliar Noer, *Ibid.*, hal. 282.

⁸³ Syamsul Anwar, "Konsep Negara Dalam Dunia Melayu: Kajian terhadap Pemikiran Ali Haji", *tesis MA* pada fakultas Pasca Sarjana Dan Pendidikan Doktor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1991, hal.134-135. Al-Maududi menjelaskan bahwa syarat bagi penguasa yang utama harus berkaitan dengan moral akhlak keagamaannya. Sasaran proses seleksi dalam negara Islam adalah menemukan orang yang terbaik untuk tugas tersebut. Kriteria terbaik tidak hanya didasarkan pada kemampuan mengendalikan negara, pandai dan mengetahui urusan negara, tapi ia harus yang paling jujur dan paling saleh (John L. Esposito (ed.), *Dinamika Kebangkitan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, Jakarta: Rajawali, 1987, hal.148.

⁸⁴ *Al-Lisaan* No. 48, 5 Juni 1940, hal. 19

⁸⁵ Deliar Noer, *Ibid.*, hal. 299

Lebih lanjut Natsir membahas mengenai perlunya membangun negara yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Definisi tentang negara semakin jelas ditafsirkan Natsir sebagai suatu institusi yang mempunyai hak, tugas dan tujuan khusus. Institusi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu badan yang terorganisir yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri serata diakui oleh umum. Institusi perlu diakui masyarakat dan bertujuan mencukupi kebutuhan masyarakat baik jasmani maupun rohani. Institusi juga harus mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan, mempunyai peraturan-peraturan, norma-norma dan nilai-nilai tertentu, berdasarkan atas faham hidup, mempunyai keanggotaan, mempunyai wilayah, memberikan hukuman terhadap pelanggar peraturan dan norma-normanya. Dengan demikian negara sebagai institusi mempunyai wilayah, rakyat, pemerintahan, kedaulatan dan undang-undang dasar. Ia meliputi seluruh masyarakat dan segala institusi yang terdapat di dalamnya, mengikat maupun mempersatukan institusi-institusi itu dalam peraturan hukum, menjalankan koordinasi dan regulasi dari seluruh bagian-bagian masyarakat, mempunyai hak untuk memaksa anggotanya mengikuti peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang telah ditentukannya serta mempunyai tujuan untuk memimpin, memberi bimbingan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhannya.

Konsep negara semacam itu menurut Natsir, harus mempunyai akar yang langsung tertanam dalam masyarakat. Oleh karena itu dasar negara pun harus merupakan sesuatu faham yang hidup, yang dijalankan sehari-hari dan hidup dalam masyarakat. Produk undang-undang dasar dari negara harus pula mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat.⁸⁶ Sedangkan masyarakat yang ada adalah masyarakat yang telah memeluk agama Islam sejak berabad-abad lamanya.

Ia meragukan bila negara dibangun lepas dari nilai-nilai Islam yang berkembang dalam masyarakat karena dapat diragukan jaminan perlindungan terhadap ummat Islam dalam suatu negara yang netral agama. Jaminan tersebut antara lain kebebasan untuk melaksanakan

⁸⁶ Tatang T Sundesah dan Edi Ryanto (Penyunting), *Mohammad Natsir : Islam Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Media Dakwah, 2000: 52-55.

shalat, puasa, naik haji hingga zakat. Jaminan ini tidak akan pernah diperoleh dari pemerintahan Islam termasuk non pemerintahan kolonial.⁸⁷

Itupula yang ditolak Natsir terhadap pandangan Soekarno yang memisahkan agama dengan negara. Soekarno pernah berpendapat bahwa "tidak ada ijma ulama tentang agama dan negara harus bersatu" sesuai dengan ungkapan Syaikh Abdurrazak yang menyatakan bahwa Nabi hanya mendirikan agama saja tidak mendirikan negara. Dalam menanggapi hal ini Natsir memberi penjelasan bahwa memang Rasulullah tidak perlu lagi menyuruh mendirikan negara karena tanpa Islam pun negara memang bisa berdiri sebelum dan setelah Islam ada. Yang dibawa oleh Rasulullah adalah pedoman untuk mengatur negara agar negara menjadi kuat dan makmur. Negara dalam pandangan Natsir bukan tujuan tetapi alat. Urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian yang integral dari Islam.⁸⁸ Oleh karena negara merupakan alat untuk merealisasikan aturan-aturan Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian negara berfungsi sebagai alat untuk mencapai "kesempurnaan berlakunya undang-undang ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan individu maupun anggota masyarakat"⁸⁹ Bila negara telah mencapai tujuan yakni terealisasinya hukum-hukum Allah, maka dengan sendirinya ada kemungkinan negara tidak diperlukan lagi. Konsep Natsir ini menarik, tetapi sayangnya ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.⁹⁰

Natsir menolak bentuk negara sekuler modern Turki di bawah Kemal Attarturk yang dikagumi Soekarno yang telah sukses menjadi negara modern karena berhasil memisahkan agama dari politik. Natsir justru berpendapat setelah Kemal meninggal secara berangsur-angsur rakyat Turki kembali kepada Islam. Ketika Turki telah mencapai kemodernannya baru ia melepaskan agama dari

⁸⁷ Deliar Noer *Ibid.*

⁸⁸ Nazaruddin Sjamsuddin, *Op. cit.*, hal.69.

⁸⁹ Ahmad Suhelmi, *Op. cit.*, hal.55.

⁹⁰ Ahmad Suhelmi, *Ibid.*, hal.83.

kenegaraan.⁹¹ Dari pendapatnya ini, Natsir sangat menentang paham sekuler yang secara politis ingin memisahkan agama dan negara. Ia berpendapat: "Agama Islam, berbeda dengan agama lain, mempunyai beberapa aturan yang berkenaan dengan hukum-hukum kenegaraan dan pidana, dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan muamalah. Semuanya itu merupakan bagian-bagian yang tak dapat dipisahkan dari agama Islam itu sendiri."⁹² Natsir berpendapat bahwa "tiap-tiap suruhan Islam jang menyangkut ibadat bersangkutan paut dengan urusan keduniaan. Ini bedanya Islam dengan agama lain." Oleh karena itu amat sulit bagi orang Islam bisa dilarang membaca buku-buku yang berbau politik. Kalaulah mereka dilarang membaca buku-buku tersebut, tapi mereka harus membaca al-Qur'an sebagai kitab sucinya yang juga mengandung masalah tersebut. Demikian juga akan sia-sia bila pemerintah mengeluarkan larangan orang muslim pergi belajar ke Mesir karena adanya angin modernisme Islam di sana. Akan tetapi tentunya pemerintah akan kesulitan melarang orang islam melakukan ibadah haji. Padahal di tanah suci ini mereka dapat bertukar pikiran dan perasaan dengan orang muslim di dunia Islam termasuk dari Mesir."⁹³

Pada tahun 1950-an, Natsir dengan tegas menekankan keunggulan agama dibandingkan sekularisme. Agama menurut Natsir lebih dalam dan lebih diterima akal. Menurut Natsir setinggi-tinggi tujuan hidup bagi masyarakat maupun individu yang diberikan oleh sekularisme tidak melebihi konsep *humanity* (peri kemanusiaan). Konsep *humanity* berdasarkan agama jauh lebih logis dan lebih memuaskan. Paham agama memberi dasar yang tetap dan tidak berubah. Segala yang bergerak dan berubah harus mempunyai dasar yang tetap, harus mempunyai apa yang disebut *point of refrence*, titik tempat memulangkan segala sesuatu.⁹⁴ *Point of refrence* itu adalah

⁹¹ Deliar Noer, *Op. cit.*, hal. 313.

⁹² Pendapat Natsir dalam *Capita Selecta* dikutip oleh Thohir Luth, *Op. cit.*, 1999, hal. 118. Natsir menyetujui sekuler dalam arti ladhfi (harfiah yakni mengurus urusan duniawi), tapi menolak paham sekuler dalam arti politis (Thohir Luth, *Ibid* hal. 119).

⁹³ M. Natsir, *Capita Selecta*, 164-165.

⁹⁴ Tatang T. Sudensyah dan Edi Ryanto (penyunting), *Op. cit.*, hal: 76-77).

agama. Agama juga lebih luas dan lebih mendalam daripada sekularisme serta agama meliputi seluruh bagian hidup manusia.⁹⁵

Natsir menekankan bahwa yang terjadi di Turki bukan suatu pemerintahan Islam. Suatu pemerintahan Islam tidak akan membiarkan rakyatnya terjerumus dalam jurang kebodohan dan kemelaratan serta tidak akan membiarkan negara diperintah orang-orang yang memakai Islam sebagai kedok sedangkan pemerintahannya penuh dengan pelanggaran ajaran Islam seperti membiarkan berkembangnya kemaksiatan, takhyul dan khurafat sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah silam pada masa Sultan dinasti Usmani.⁹⁶

Apalagi untuk memperbaiki Turki yang bobrok bukan dengan cara memisahkan agama dari negara. Akan tetapi justru perlu dimasukkan kedalamnya dasar-dasar dan hukum muamalah antar manusia, perlu dibangkitkan kesadaran hak dan kewajiban antara yang memerintah dan yang diperintah serta perlunya diperkuat tali hubungan antara manusia dengan Ilahi.⁹⁷ Justru kebobrokan pemerintahan Usmaniyah karena pemerintahan ini telah banyak menyeleweng dari perintah Allah dan mental penguasanya tidak lagi patuh pada aturan ilahi.

Berkaitan dengan negara majalah *Al Lisan* salah satu organ Persis di mana Natsir dibesarkan, dalam salah satu artikelnya yang ditulis oleh MS-nama samaran yang kemungkinan adalah nama Natsir-memberi judul "Pendirian Islam Tentang Mengurus Negeri". Dalam artikel tersebut diuraikan bahwa orang yang mengerti Qur'an dan Hadist tentunya tidak akan memungkirinya bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur hukum-hukum tentang :

- negara dan masyarakat
- kriminal
- perdagangan
- perkawinan
- ibadah

⁹⁵ Tatang T. Sudensyah dan Edi Ryanto (penyunting) *Ibid*, 78.

⁹⁶ Nazaruddin Sjamsuddin, *Op. cit*, hal. 68.

⁹⁷ *Ibid*,

Selain itu Islam juga-demikian artikel tersebut-mengatur selain yang lima unsur di atas guna mengatur pergaulan manusia.

Sebagai seorang muslim wajib menjalankan ibadah secara Islam, begitu juga wajib bagi mereka menghukum di dalam negerinya menurut aturan islam yang telah ada di dalam al-Quran dan Hadist.

Bilamana ada yang bertanya : bagaimana memerintah secara Islam yang juga diragukan oleh Soekarno? MS dengan bersahaya memberi penjelasan bahwa di dalam hukum-hukum Allah dan rasul yang berhubungan dengan pemerintahan ada yang haram, ada yang makruh, ada juga yang sunnat. Hukum atas orang yang melanggar larangan itu sudah juga tercantum dalam Qur'an, dan hadist dan sebagian juga ada juga yang belum diatur.⁹⁸ Bila dijumpai perkara yang tidak tercantum dalam kedua sumber tersebut boleh ditafsirkan dengan akal pikiran asal tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yang ada.⁹⁹ Oleh karena menurut Natsir, agama Islam agama yang bersifat "terbuka". Oleh karenanya ia mendukung perlunya upaya untuk melakukan ijtihad guna menghadapi ajaran Islam menghadapi perubahan dan tantangan zaman.¹⁰⁰ Oleh karena itu kedudukan rasional yang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam bahkan diperbolehkan

MS sebagai penulis artikel tersebut juga meluruskan pandangan bahwa mengatur negeri secara Islam berarti harus memakai tasbih yang panjang, jubah dan sorban yang besar dan harus berpogami dan wanitanya harus menutup dengan cadar¹⁰¹.

⁹⁸ *Al-Lisaan* no.48, 5 Juni 1940, hal.19.

⁹⁹ *Al-Lisaan* no.35, 5 Maret 1939, hal.10.

¹⁰⁰ Yusril Iha Mahendra, *Op. cit.*,1995, hal.7).

¹⁰¹ Ternyata apa yang dikemukakan oleh MS mirip dengan yang dikemukakannya dalam *Capita Selecta*. Natsir dalam *Capita Selecta* menyatakan:"Kalau kita terangkan, bahwa agama dan negara harus bersatu, maka terbayang sudah di mata seorang bahlul (*bloody fool*) duduk di atas singgasana, dikelilingi "haremnnya" menonton tari "dayang-dayang". Terbayang olehnya yang duduk mengepalai "kementerian Kerajaan", beberapa orang tua bangsa memegang hoga. Sebab beginilah gambaran pemerintahan Islam yang digambarkan dalam kitab-kitab Eropa yang mereka baca dan diterangkan oleh guru-guru bangsa Barat selama ini. Sebab umumnya (kecualai amat sedikit) bagi orang Eropa: Chalifah=Harem,

Gambaran ini yang membuat salah faham orang termasuk Soekarno dalam memahami konsep negara islam,¹⁰² negara yang menyatukan agama dan politik.¹⁰³ Gambaran buruk mengenai negara Islam yang difahami Soekarno karena ia melihat betapa jeleknya Negara Islam pada masa kekhalifahan Usmaniah terakhir di Turki. Natsir justru meluruskan pandangan ini dengan menyatakan bahwa pemerintahan tersebut justru banyak mengandung penyimpangan-penyimpangan Islam dalam praktek kenegaraannya. Natsir kemudian berusaha menjernihkan kesalahpahaman mengenai gambaran negara Islam sebagaimana yang dipersepsikan oleh Soekarno dan kalangan nasionalis yang anti penyatuan antara agama dan negara.¹⁰⁴

MS lebih lanjut menanggapi pendapat sementara kalangan yang mempertanyakan kemungkinan bisa diaplikasikannya hukum Islam di Indonesia yang penduduknya terdiri dari penganut keyakinan yang berbeda. Dalam menanggapi pendapat ini MS balik bertanya" bagaimana maoe dijalankan hoekoem-hoekoem selain Islam, padahal orang Islam wadajib mendjalankan hoekoem Islam ?". Bila orang yang minoritas tidak menerima Islam sebagai hukum, maka sudah tentu - menurut MS- orang Islam yang mayoritas tidak

Islam=poligami."(Ahmad Suhelmi, *Op. cit* hal, 54). Memang dalam tulisan-tulisannya terutama massa pergerakan nasional Natsir seringkali berupaya meluruskan kesalah fahaman terhadap islam terutama dari tokoh-tokoh yang beragama islam (Yusril Ihza Mahendra, *Op. cit.*, 1995, hal. 4).

¹⁰² Tentang Negara Islam menurut Al Maududi harus memiliki minimal 4 prinsip utama. Pertama adalah pengakuannya akan kedaulatan Tuhan Tuhan adalah pembuat hukum dan penguasa khusus. Kedua adalah wewenang nabi. Artinya para nabi merupakan khalifah Allah, dan dalam kapasitas ini mereka melaksanakan kedaulatan politik dan hukum Allah. Prinsip ketiga adalah status sebagai khalifah Allah Negara tidak membuat atau memberlakukan undang-undang atas namanya sendiri, tapi bertindak sebagai wakil Sang Penguasa. Hak memerintah adalah milik seluruh masyarakat orang beriman.Penguasa dalam suatu negara Islam hanyalah khalifah atau wakil Tuhan. Prinsip yang keempat bahwa negara Islam harus melaksanakan urusannya dengan musyawarah bersama (syura) di kalangan kaum muslimin (John Esposito, *Op. cit.*, hal.136) Ada pendapat yang menyatakan bahwa pemerintahan di dalam Islam berlangsung seribu tahun lebih sejak berdirinya Negara islam yang dipimpin oleh rasulullah hingga dihapusnya sistem islam kerajaan Usmani oleh Mustafa Kamal Attaturk (Ali Qarishah, *Wajah Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta:AlKautsar, 1989,hal.58.

¹⁰³ Lihat juga Ahmad Suhelmi, *Ibid*

¹⁰⁴ Ahmad Suhelmi, *Op. cit.*, hal 77.

mau menerima hukum selain Islam.¹⁰⁵ Meskipun demikian terhadap golongan minoritas sebenarnya ia menyatakan sikap untuk tidak khawatir atau mencurigai Islam sebagai dasar negara. Oleh karena Islam akan melindungi atau memberi perlindungan terhadap kelompok minoritas dan menjaga kedamaian ketika berinteraksi dengan mereka sebagaimana layaknya hubungan sesama manusia dalam bernegara.¹⁰⁶ Lebih jauh Natsir memberi garansi bila kekuasaan berada di tangan orang Islam maka orang-orang yang beragama lain tak usah khawatir. Natsir menjamin kemerdekaan beragama secara luas dalam satu negara yang berazaskan Islam. Malah menurutnya lebih luas lagi daripada apa yang diberikan oleh negara-negara Eropa sekarang kepada agama-agama yang ada di sana.¹⁰⁷ Natsir kemudian menyatakan: "Dan takkan ada apa-apa keberatannya bagi penduduk jang bukan beragama Islam kalau dalam negeri itu berlaku hukum-hukum Islam dalam urusan muamalah karena peraturan-peraturan itu tidak akan bertentangan dengan agama mereka, lantaran dalam agama mereka memang tidak ada peraturan yang bersangkutan dengan hal-hal yang semacam itu. Dengan berlakunya undang-undang Islam, agama mereka tidak akan terganggu, tidak akan rusak dan tidak akan kurang suatu apa!¹⁰⁸ Natsir bahkan mempertanyakan orang-orang yang justru mempersoalkan dasar negara berdasarkan hukum Islam dengan lisan tak mau merusak agama lain. Tampaknya kritik Natsir ini ditujukan kepada kelompok nasionalis sekuler sebagai rival debatnya. Sikap mereka menurut Natsir tergolong zalim terhadap orang Islam yang mayoritas di negeri ini. Mereka yang menolak Islam sebagai *way of life* dalam bernegara menurut Natsir telah merusak hak-hak mayoritas.

Sementara itu, Natsir juga memberi dalil-dalil wajib hukumnya menjalankan hukum Islam. Ia mengambil beberapa surat dalam al-Qur'an yang menjadi bahan untuk memperkuat argumentasinya. Diantaranya adalah surat Annisa 105 yang artinya:

¹⁰⁵ *Al-Lisaan* No.54, 1 Desember 1940, hal.7-8.

¹⁰⁶ M. Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, dikutip oleh Thohir Luth, *Op.cit.*, hal.49.

¹⁰⁷ M. Natsir, *Capita Selecta*, 1973, hal.491.

¹⁰⁸ M. Natsir, 1973, *Ibid.*

"Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab yang haq, supaya engkau menghukum (dengan kitab itu) di antara manusia, dengan cara yang kami tunjukkan kepadamu." Dan surat Al Maidah ayat 49 yang artinya : "dan jatuhkanlah hukum di antara mereka dengan berdasar kepada apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah turutkan hawa nafsu mereka."¹⁰⁹

Natsir dalam *Capita Selekta* keduanya menyatakan bahwa orang yang enggan bila negara menjalankan semua aturan Islam yang berhubungan negara, dengan dalih demokrasi dengan menyatakan bahwa negara harus berdiri tegak di atas semua agama, pada hakekatnya bukan memisahkan agama dari negara melainkan melemparkan sebagian hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal kenegaraan dan hukum muamalah.¹¹⁰

Natsir memerlukan peran negara sebagai instrumen untuk mengaplikasikan hukum Islam tersebut. Tidak mungkin untuk menjalankan hukum Islam seperti pelaksanaan zakat diserahkan kepada individu. Di sini jelas perlunya peran negara atau pemerintah untuk mengaplikasikan hukum Islam¹¹¹.

Demikian juga MS menekankan perlunya azas islam dalam pergerakan dan menyalahkan orang-orang Islam yang masuk perkumpulan yang tidak berazaskan Islam. Selengkapny ia menyatakan: "Kami-qaoem Moeslimien-tjinta kepada qaoem moeslimin di Indonesia, maoepoen orang Indonesia atau orang asing, dan kami bekerdja...mentjari kemerdekaan dan kebaikan bocat Indonesia engan azas Islam, agama Allah. Kami salahkan orang2 Islam masoek di perkoempoelan-perkoempoelan jang tidak berazas Islam, karena memang dilarang oleh Allah dan RasulNya."¹¹²

Pada bagian yang lain Natsir melihat keunggulan tali persaudaraan yang didasarkan pada agama Islam. Dalam Islam mengandung: Loyalitas sesama, kesediaan berkorban untuk kepercayaannya, mengharamkan hidup dalam kehinaan, mewajibkan

¹⁰⁹ M.Natsir, 1973, hal. 492.

¹¹⁰ M.Natsir 1973, *Ibid.*, hal. 490.

¹¹¹ M.Natsir, 1973, hal. 492.

¹¹² *Al-Lisaan* No51 5 September 1940, hal.42.

mati dalam kemuliaan.¹¹³ Dengan demikian nilai islam bagi Natsir haruslah menjadi nilai sentral dalam memandang dan mengatasi berbagai masalah termasuk dalam kehidupan kenegaraan.

Dalam Islam juga terdapat demokrasi. Natsir dalam buku *Capita Selecta* jilid duanya berkata: "Islam bersifat demokratis dengan arti bahwa Islam anti istibdad, anti absolutisme, anti sewenang-wenang".¹¹⁴ Namun Natsir menolak versi parlemen yang dikemukakan Soekarno yang melihat aspirasi Islam dapat diperjuangkan di parlemen.¹¹⁵ Natsir meragukan bila aspirasi Islam diperjuangkan oleh wakil yang mengatasnamakan islam tetapi sebenarnya tidak memperjuangkan aspirasi tersebut. Natsir bertanya bagaimana kalau sebagian besar anggota parlemen politiknya bukan politik Islam walaupun mereka beragama islam.¹¹⁶

Islam juga mengajarkan sifat *equality* terutama dalam hal persaudaraan.¹¹⁷ Sudah lebih dari 1000 tahun Islam telah mengenal

¹¹³ Deliar Noer, *Op.cit.*, hal.283.

¹¹⁴ *Capita Selecta* jilid dua dikutip oleh Nazaruddin Syamsuddin (ed), *Op. cit.*, hal. 70.

¹¹⁵ Tentang parlemen. Natsir pernah berpendapat bahwa dengan adanya suatu parlemen sekalipun yang dipilih, belum berarti otomatis demokrasi tumbuh. Dengan adanya Undang-undang Dasar belum berarti otomatis ada kehidupan konstitusional. Dengan adanya Hakim, Jaksa, Polisi belum berarti otomatis ada *rule of law*. Ia berkehendak adanya sikap jiwa yang mengendalikan langkah-langkah dan tindak tanduk sebagai individu, masyarakat maupun penguasa. Sebab inilah yang menjadi pra syarat dari segala macam perlembagaan demokrasi dan sistem demokrasi yang hendak dipulihkan (Natsir, *Op. cit.*, hal. 5).

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Tentang persamaan dapat dilihat dari tulisan Natsir dalam melihat Islam meletakkan dasar-dasar bagi menegakkan keadilan yakni bahwa hukum berdaulat atas semua warga negara maupun penguasa. Semua sama, sederajat dihadapan hukum (Natsir. "Peranan Islam Dalam pembinaan Demokrasi", dalam *Serial Media Dakwah*, No.46,hal.25. Pada tulisan yang lain Natsir menjelaskan bahwa menurut Syariat Islam: Hukum berdaulat atas semua anggota masyarakat dari yang selemah-lemahnya sampai kepada Ulil Amri yang paling tinggi. Semuanya berkedudukan sama di hadapan hukum. Di hadapan hukum tidak ada keistimewaan lantaran pangkat, keturunan (Natsir, *Demokrasi Di Bawah Hukum*, Jakarta: Media Dakwah, 1987, hal.8-9)

yang namanya demokrasi¹¹⁸ Argumen ini didasarkan pada statement kepemimpinan Umar Ibn Khatab yang memberi pidato yang berisi: "Akoë tidak poenja haq atas engkau poenja harta lain dari sebagai satoe wet dari seorang anak piatoe atas itoe harta dari jang diwakilkan...malah engkau mempoenjai haq-haq atas dirikoe....engkau boleh boeat minta dipenoehkan haq-haq itoe dari akoe..."¹¹⁹

Bagi Natsir demokrasi adalah hal yang utama, sebab Islam hanya akan mungkin berhasil dalam suatu sistem demokratis. Melalui sistem demokratis mereka mempunyai kesempatan membuat peraturan hukum yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.¹²⁰ Dengan demikian secara tegas Natsir menyetujui demokrasi. Pandangannya bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem dan manajemen konflik. Islam mengajarkan dasar-dasar yang kondusif bagi tumbuhnya sistem pemerintahan yang demokratis. Islam merupakan agama yang mampu mengharmoniskan antara prinsip-prinsip *hablunminannas* Islam tentang syura dengan elemen-elemen demokrasi modern yang berasal dari tradisi Eropa dan mengaplikasikan konsep semacam itu dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.¹²¹

Dalam Islam juga terdapat aspek keadilan. Bagi mereka yang bukan Islam, mereka wajib dilindungi dan mempunyai persamaan di depan hukum Islam yang adil. Oleh sebab Islam tidak memandang familie, kaum, maupun suku bangsa dan agama di depan hukum. Dengan demikian islam mewajibkan kaum muslimin untuk membela orang-orang lain agama di bawah pemerintahan mereka¹²²

Oleh karena Islam dipandang sebagai yang paling baik dalam mengatur negara maupun dalam pergerakan nasional, Persis melalui artikelnya yang ditulis dengan berinitial MS (mungkin Muchlis -

¹¹⁸ *Al-Lisaan* No.46, 5 Februari 1940, hal.31.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Ahmad Suhelmi, *Op. cit.*, hal.86. Natsir memang terkenal sebagai seorang demokrat. Ia dengan Masyuminya pada tahun 1950-an mengkritik tindakan Soekarno yang mengarah kepada kediktatoran.

¹²¹ Yusril Ihza Mahendra, *Op. cit.*, 1995, hal. 8).

¹²² *Al Lisan*, No.51, 5 September 1940, hal.40.

yang tak lain adalah Natsir) memberi semacam fatwa tentang gerakan Nasional dan Kebangsaan. Dalam artikelnya ini ia juga terlibat dengan A.R. Baswedan (pemimpin PAI) yang dianggapnya membangun "Aliran Baru". Tulisan Baswedan berupa artikel dimuat dalam "Aliran Baru" No. 24 dengan tema "Kebangsaan dan Islam". Artikel ini memuat argumen Baswedan bahwa Rashid Ridha dengan *Al Manarnya* membolehkan membentuk gerakan dengan asas selain Islam; gerakan di Mesir adalah netral agama dan ia mempertanyakan bagaimana caranya bekerjasama dengan orang bukan Islam, sedangkan SI maupun PII hanya menerima pemimpin orang-orang Islam saja.¹²³

Dalam menanggapi pandangan itu, MS memberi jawaban ringkas yakni bahwa Rasjid Ridha tidak membolehkan suatu gerakan berbasas di luar Islam. MS bahkan menantang AR Baswedan untuk menghadirkan ahli bahasa Arab untuk menafsirkan kitab *al Manar* yang dianggap salah ditafsirkan oleh AR Baswedan serta merencanakan debat dalam suatu majelis pertemuan.¹²⁴

Berbeda dengan Soekarno yang mengambil contoh negara Turki yang netral agama, Baswedan mengambil contoh Mesir sebagai negara yang juga netral agama. Justru MS mempertanyakan negara Mesir yang membiarkan terbukanya kedai-kedai minuman arak, isap madat dengan terang-terangan dan merajalelanya pelacuran. MS bertanya apakah kondisi semacam itu Indonesia harus mencontoh Mesir?¹²⁵

Menanggapi hal yang ketiga, MS dengan tegas menyatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bekerjasama dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Jadi tidak perlu bekerjasama harus dengan organisasi yang bermerk Islam. Mereka yang tidak beragama islam boleh mengadakan perkumpulan sendiri dengan tidak berazas Islam dan perkumpulan mereka bisa bekerjasama dengan perkumpulan yang berazas Islam untuk mencapai kemerdekaan.¹²⁶

¹²³ *Al Lisan* No. 51, hal.42.

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ *Ibid.*, hal.43

¹²⁶ *Ibid.*

MS menekankan agar perkumpulan berasaskan Islam karena perkumpulan berusaha mencapai kemerdekaan. Tentunya untuk mencapai kemerdekaan ada korban jiwa. Bila jiwa raga dikorbankan demi negara atau tanah air maka hal itu diharamkan. Untuk lebih lengkapnya MS menulis: "Koempoelan politiek boeat mengatoer negeri atau menghasilkan kemerdekaan laloe mengatoer negeri itoe, boeat orang Islam, perloe dengan dasar Islam, lantaran perjuangan mereboet itoe sangat bisa djadi, di satoe masa, meminta qorban djiwa, sedang seorang islam tidak boleh qorbankan dirinja melainkan karena Allah, boekan dan tidak boleh karena tanah air, bangsa atau lainnja melainkan karena Allah semata-mata."¹²⁷ Bahkan A. Hasan lebih tegas lagi: "Hendaklah kamoe masoek koempoelan-koempoelan jang berazas Islam. Hendaklah kamoe menghoekoem dengan Hoekoem Allah dan Rasoelnja."

Dalam *Capita Selectanya* jilid dua Natsir dengan tegas mewajibkan setiap ummat Islam untuk berpolitik berazaskan Islam. Katanya, sebagai seorang Muslim, kita tidak dapat melepaskan diri dari politik. Sebagai orang politik, kita tidak dapat lepas dari ideologi kita, yaitu ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tidak dapat lepas dari menegakkan masyarakat, negara dan kemerdekaan.¹²⁸ Pendapat Natsir bila direlevansikan dengan pendapatnya di atas ini dapat ditafsirkan bahwa lebih baik dari seorang muslim untuk memilih perkumpulan yang berasaskan Islam, sebab perkumpulan ini akan menghasilkan kemerdekaan untuk mengatur negeri.

Penutup

Konsep Natsir mengenai agama dan negara memperlihatkan bahwa Natsir melihat bahwa Islam tidak hanya sekedar mengatur hubungan vertikal, hubungan antara manusia dengan sang pencipta, tapi juga Islam mengatur hubungan horizontal, hubungan manusia dengan manusia. Dengan demikian Islam juga mempunyai konsep aturan

¹²⁷ *Al-Lisaan* no.44, 5 Desember 1939, hal.26.

¹²⁸ Thohir Luth, *Op. cit.*, hal.85.

mengenai bagaimana caranya mengatur negara meskipun dalam garis besarnya saja.

Bagi Natsir Islam tidak semata-mata agama, tapi merupakan sebuah sistem yang mengatur masalah sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Islam merupakan sesuatu yang primer. Islam tidak memisahkan antara keagamaan dan kenegaraan, sehingga Islam dapat dijadikan pandangan hidup terutama dalam mengatur negara.

Mengenai penamaan negara Islam, Natsir tidak mempersoalkan segi formalitasnya. Ia lebih menekankan substansi bahwa moralitas nilai-nilai Islam perlu menjadi acuan bagi kehidupan bernegara. Demikian juga kecintaannya kepada bangsa negara harus dilandasi pada nilai-nilai keislaman.

Munculnya gagasan mengenai discourse wacana tersebut di atas antara Natsir dengan beberapa tokoh pergerakan nasional dapat dipahami karena pada masa tersebut dimungkinkan terjadinya pencarian identitas dan ideologi perjuangan untuk merumuskan sebuah bentuk negara yang ideal dan ideologi perjuangan yang dasarnya diidealkan.

Kerasnya sosialisasi yang dilalui Natsir dan kondisi suasana pergerakan ketika itu yang menekan di mana kekuatan real politik kolonial sangat besar menyuburkan gagasan-gagasan tentang perlunya membicarakan bentuk negara ideal. Dan Natsir merupakan salah satu yang paling intens dalam membicarakan masalah tersebut dengan mengkaitkannya dengan nilai-nilai keislaman. Walaupun Natsir mengajukan bentuk ideal negara Islam bukanlah berarti bentuk negara islamnya yang formal seperti model Kartosuwiryo, tetapi moral Islam dalam mengatur kehidupan kenegaraan.

Pemikiran M. Natsir pada masa muda memperlihatkan semangatnya untuk membela Islam dari serangan aliran pemikiran terutama dari kalangan nasionalis sekuler yang hendak memojokkannya. Pembelaannya begitu bersemangat ketika ia menjadi orang yang aktif dalam organisasi Persis.

Perdebatan yang seru terutama antara tokoh-tokoh dari kelompok Islam dengan kalangan nasionalis netral agama semakin mereda setelah keduanya pada sekitar tahun 1939 masuk ke dalam

Gapi (Gabungan Politik Indonesia) serta MRI (Majelis Rakyat Indonesia) pada tahun 1941 yang merupakan forum pertemuan anantara Gapi, MIAI (Majelis) dan Persatuan Volkbonden Pegawai Negeri yaitu Federasi pekerja jabatan pemerintahan. Tuntutan agar Indonesia Berparlemen seolah meredakan perseteruan tersebut. Tuntutan tersebut mendapat dukungan tidak hanya dari kalangan nasionalis sekuler tapi juga kalangan Islam. Namun perdebatan tersebut tidaklah sama sekali berakhir. Kedua pihak masih diwarnai sikap saling curiga. Ini terlihat dari usul juru bicara MIAI yakni Wondoamiseno yang menyatakan tuntutan Indonesia berparlemen harus "berdasarkan islam" meskipun ia tidak lebih lanjut menjelaskan apa yang dimaksudnya itu.¹²⁹

Demikian juga perdebatan Natsir mengenai hubungan agama dan negara dengan tokoh-tokoh nasionalis sekuler maupun dengan tokoh islam sendiri memperlihatkan pertentangan antara tokoh yang "ingin membela Islam" dengan tokoh "yang ingin memisahkan peran agama dari politik". Kecurigaan keduanya terlihat dari teks-teks yang mereka buat berupa tulisan terutama di surat kabar.

Konsistensi pemikiran Natsir dalam mengaplikasikan moralitas Islam terus dipertahankan hingga ia memegang tampuk pimpinan Masyumi. "Kita Masyumi" memperjuangkan kalimah Allah, terlaksananya ajaran-ajaran dan kaedah Islam dalam kehidupan orang perorang, masyarakat maupun agama. Semua itu kata Natsir perlu diperjuangkan oleh umat islam guna membangun peri kehidupan lahir dan batin, membangun akhlaq ummat, kekuatan dan kecakapan dalam mengembangkan cita-cita islam sebagai *way of life* yang memberikan rahmat bagi segenap manusia.

Natsir menekankan bahwa perjuangan tersebut harus melalui cara-cara yang syah dan melalui saluran-saluran yang lazim dalam negara demokrasi.¹³⁰ Termasuk dalam hal ini memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Perjuangannya tampak semakin nyata di konstituante pada sekitar tahun 1950-an.

¹²⁹ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafitipers, 1987, hal.19

¹³⁰ *Abadi*, 1 September 1952.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah , Taufik (ed.), *Sejarah Ummat Islam Indonesia*, Jakarta: MUI, 1991.
- dan Abdurrahman Surjomiharjo, *Ilmu Sejarah Dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Ahmad, Mumtaz (ed.), *Masalah-masalah teori Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1996.
- Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indoenesia*, Jakarta: Grafitipers,1985.
- Budiardjo, Meriam, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Effendi Bachtiar, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1998.
- Eickelman Dale F dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, Jakarta: Mizan,1998
- Esposito, John L (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam : Watak, Proses dan Tantangan*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Harjono, Anwar, *Pemikiran Dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- , M.Natsir: *Sumbangan Dan Pemikirannya Untuk Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah,1995.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Sebuah Alternatif*, Jakarta: Gramedia,1982.
- Luth, Thohir, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press,1999.
- Mahendra, Yusril, "Mohamad Natsir: Sumbangan Pemikirannya Tentang Pendidikan dan Dakwah Islam," dalam *Seminar Sehari Menyongsong 50 Tahun Indonesia Merdeka dan Mengenang Mohammad Natsir*, Padang: Yayasan kebangkitan Islam, 15 Juli 1995.

- Natsir, "Peranan Islam Dalam Pembinaan Demokrasi," dalam *Serial Media Da'wah*, No.46
- , *Demokrasi Di Bawah Hukum*, Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- , *Capita Selecta 1-2*, Jakarta: Pustaka Pendis, 1957.
- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta : LP3ES,1982 ,
- Percakapan Cendekiawan Tentang Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia*, Bandung: Mizan,1990.
- Rais, Mohamad Lukman Fatahullah, Mohammad Syah Agusdin dan Nasmay Lofita Anas, *Mohammad Natsir Pemandu Ummat: Pesan dan Kesan Tasyakkur 80 Tahun Mohammad Natsir 17 Juli 1988*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Steenbrink ,Karel A. , *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad 19*, Jakarta: Bulan Bintang,1984.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES,1996.
- Wildan, Dadan, *Yang Dai Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, Bandung: Rosda, 1999.

